

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO & PERMODALAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Desember 2025

II. C. UMUM - Ukuran Utama (Key metrics- KM1) secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Deskripsi	2025			
		Des	Sep	Jun	Mar
	Modal yang Tersedia (nilai)				
1	Modal Inti Utama (CET1)	246,050,197	251,199,234	238,524,516	222,019,717
2	Modal Inti (Tier 1)	246,050,197	251,199,234	238,524,516	222,019,717
3	Total Modal	260,024,920	264,139,855	251,035,718	234,269,499
	Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)				
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	1,234,271,906	1,148,196,485	1,107,043,498	1,087,325,091
	Rasio Modal berbasis Risiko sebagai persentase dari ATMR				
5	Rasio CET1 (%)	19.93%	21.88%	21.55%	20.42%
6	Rasio Tier 1 (%)	19.93%	21.88%	21.55%	20.42%
7	Rasio Total Modal (%)	21.06%	23.01%	22.68%	21.55%
	Tambahan modal yang berfungsi sebagai buffer sebagai persentase dari ATMR				
8	Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
9	Countercyclical Buffer (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Capital Surcharge untuk Bank D-SIB (1% - 2.5%) (%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
11	Total tambahan modal sebagai penyangga (buffer) (Baris 8 + Baris 9 dan Baris 10)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
12	Komponen modal inti utama (Common Equity Tier 1) setelah memenuhi pemenuhan tambahan modal (buffer)	14.93%	16.88%	16.55%	15.42%
	Rasio pengungkit sesuai Basel III				
13	Total Eksposur	1,920,699,682	1,896,600,371	1,870,525,414	1,927,665,524
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	12.81%	13.24%	12.75%	11.52%
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	12.81%	13.24%	12.75%	11.52%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross	12.81%	13.24%	12.75%	11.52%

II. C. UMUM - Ukuran Utama (Key metrics- KM1) secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Deskripsi	2025			
		Des	Sep	Jun	Mar
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross	12.81%	13.24%	12.75%	11.52%
	Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)				
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	333,549,806	362,148,941	329,765,611	341,217,125
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (net cash outflow)	246,688,464	244,198,371	228,552,493	219,890,607
17	Rasio Kecukupan Likuiditas (%)	135.21%	148.30%	144.28%	155.18%
	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)				
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	1,346,097,957	1,353,728,575	1,356,305,285	1,312,721,349
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	1,143,576,540	1,101,459,497	1,081,557,103	1,063,068,643
20	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (%)	117.71%	122.90%	125.40%	123.48%

II. C. UMUM - Ukuran Utama (Key metrics- KM1) secara Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Deskripsi	2025				2024
		Des	Sep	Jun	Mar	Des
	Modal yang Tersedia (nilai)					
1	Modal Inti Utama (CET1)	301,847,212	305,359,367	290,373,889	274,178,335	291,317,196
2	Modal Inti (Tier 1)	301,847,212	305,359,367	290,373,889	274,178,335	291,317,196
3	Total Modal	316,837,419	319,278,990	303,861,534	287,405,100	303,975,486
	Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)					
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	1,346,987,452	1,256,297,227	1,215,106,893	1,195,809,550	1,141,386,464
	Rasio Modal berbasis Risiko sebagai persentase dari ATMR					
5	Rasio CET1 (%)	22.41%	24.31%	23.90%	22.93%	25.52%
6	Rasio Tier 1 (%)	22.41%	24.31%	23.90%	22.93%	25.52%
7	Rasio Total Modal (%)	23.52%	25.42%	25.01%	24.03%	26.63%
	Tambahan modal yang berfungsi sebagai buffer sebagai persentase dari ATMR					
8	Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
9	Countercyclical Buffer (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Capital Surcharge untuk Bank D-SIB (1% - 2.5%) (%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
11	Total tambahan modal sebagai penyangga (buffer) (Baris 8 + Baris 9 dan Baris 10)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
12	Komponen modal inti utama (Common Equity Tier 1) setelah memenuhi pemenuhan tambahan modal (buffer)	17.41%	19.31%	18.90%	17.93%	20.52%
	Rasio pengungkit sesuai Basel III					
13	Total Eksposur	2,190,091,323	2,140,179,170	2,109,606,507	2,158,834,943	2,018,178,824
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	13.78%	14.27%	13.76%	12.70%	14.43%
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	13.78%	14.27%	13.76%	12.70%	14.43%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross	13.78%	14.27%	13.76%	12.70%	14.43%

II. C. UMUM - Ukuran Utama (*Key metrics- KM1*) secara Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Deskripsi	2025				2024
		Des	Sep	Jun	Mar	Des
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross	13.78%	14.27%	13.76%	12.70%	14.43%
	Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)					
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	339,473,424	367,870,393	335,250,863	346,853,663	337,555,743
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (net cash outflow)	247,935,815	245,939,488	230,302,667	221,497,914	210,081,677
17	Rasio Kecukupan Likuiditas (%)	136.92%	149.58%	145.57%	156.59%	160.68%
	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)					
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	1,355,934,194	1,363,031,479	1,365,170,404	1,321,662,574	1,316,826,496
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	1,149,494,783	1,107,115,183	1,087,310,740	1,068,895,699	1,029,199,906
20	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (%)	117.96%	123.12%	125.55%	123.65%	127.95%

Tabel 2.D. Umum - Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan Mapping pada Laporan Keuangan sesuai Standar akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (LI1)

		Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian (*)	Nilai tercatat masing-masing risiko				
				Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
	ASET							
1.	Kas	32,044,482	929	32,443,932				
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	40,254,114	-	40,270,620				
3.	Penempatan pada bank lain	55,168,542	1,296,738	56,879,989				
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,167,029	-		2,385,112			
5.	Surat berharga yang dimiliki	391,644,693	25,864,350	328,085,806			8,620,678	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	29,340,192	52	-	884,064			
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	24,452	-	-	24,452			
8.	Tagihan akseptasi	13,078,567	-	13,078,568				
9.	Kredit yang diberikan	1,460,729,418	-	1,531,073,176				
10.	Pembiayaan syariah 1)	56,350,282	-					
11.	Piutang Sewa Pembiayaan	4,406,157	-					
12.	Penyertaan modal	8,834,868	5,463	8,930,844				
13.	Aset keuangan lainnya	19,040,642	556,810					
14.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		-					
	a. Surat berharga yang dimiliki	- 555,017	-	-				
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	- 82,893,734	-	- 60,555,221				
	c. Lainnya	- 394,618	- 154	-				
15.	Aset tidak berwujud	806,416	-					
	akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-					
16.	Aset tetap dan inventaris	94,045,303	1,469,171	62,411,429				
	akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	- 30,751,063	- 819,493					
17.	Aset non produktif							
	a. Properti terbengkalai	17,311	-					
	b. Agunan yang diambil alih	100,471	-	55,674				
	c. Rekening tunda	-	-					
	d. Aset antarkantor	13,317	-					
18.	Aset lainnya	42,899,281	7,961,648	44,181,846				
	TOTAL ASET	2,135,371,105	36,335,514	2,056,856,665	3,293,628	-	8,620,678	-

Tabel 2.D. Umum - Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan Mapping pada Laporan Keuangan sesuai Standar akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (LI1)

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian (*)	Nilai tercatat masing-masing risiko				
			Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
LIABILITAS DAN EKUITAS							
1. Giro	448,203,670	-					
2. Tabungan	587,585,862	-					
3. Deposito	431,054,307	-					
4. Uang Elektronik	614,383	-					
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	47,462	-					
6. Liabilitas kepada bank lain	17,601,436	-					
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,101,753	-					
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	27,932,749	-					
9. Liabilitas akseptasi	13,078,567	-					
10. Surat berharga yang diterbitkan	40,901,648	-					
11. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	129,657,345	-					
12. Setoran jaminan	14,122	-					
13. Liabilitas antarkantor	-	-					
14. Liabilitas lainnya	106,636,367	21,623,431					
TOTAL LIABILITAS	1,804,429,671	21,623,431	-	-	-	-	-
EKUITAS							
15. Modal disetor							
a. Modal dasar	15,000,000	704,053					
b. Modal yang belum disetor -/-	- 7,422,050	-					
c. Sakam yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	- 4,463,270	-					
16. Tambakan modal disetor							
a. Agio	75,946,195	5,987,447					
b. Disagio -/-	-	-					
c. Dana setoran modal	-	-					
d. Lainnya	2,333,619	-					
17. Penghasilan komprehensif lain							
a. Keuntungan	22,174,083	477,240					
b. Kerugian -/-	- 2,198,097	- 12,331					
18. Cadangan							
a. Cadangan umum	3,022,685	-					
b. Cadangan tujuan	-	-					
19. Laba/rugi							
a. Tahun-tahun lalu	214,715,081	5,912,139					
b. Tahun berjalan	56,652,384	1,643,536					
c. Dividen yang dibayarkan -/-	- 51,726,772	-					
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	375,760,630	14,712,083	-	-	-	-	-
20. Kepentingan minoritas (minority interest)	6,907,576	-					
TOTAL EKUITAS	382,668,206	14,712,083	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2,187,097,877	36,335,514	-	-	-	-	-

Catatan :

(*) : Angka ini merupakan gabungan dari entitas anak yang bergerak di industri asuransi.

Tabel 2.E. Umum - Perbedaan Utama antara Nilai Tercatat sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Nilai Eksposur sesuai dengan Ketentuan OJK (LI2)

dlm jutaan rupiah

		Total	Item sesuai :			
			Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka Counterparty credit risk	Kerangka risiko pasar
1	Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada tabel LI1)	2,068,770,971	2,056,856,665	-	3,293,628	8,620,678
2	Nilai tercatat liabilitas sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada tabel LI1)	-	-	-	-	-
3	Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	2,068,770,971	2,056,856,665	-	3,293,628	8,620,678
4	Nilai rekening administratif	214,851,452	214,851,452			
5	Perbedaan valuasi	-				
6	Perbedaan karena netting rules, selain dari yang termasuk pada baris 2.	-				
7	Perbedaan provisi	-				
8	Perbedaan karena adanya prudential filters	-				
	Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-				

Umum – Penjelasan mengenai Perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan OJK (LIA)

a. Perbedaan antara nilai tercatat dalam Publikasi Laporan Keuangan dan nilai tercatat Menurut Kontraktual

Perbedaan antara nilai tercatat dalam Publikasi Laporan Keuangan dan nilai tercatat menurut kontraktual setiap aset dan liabilitas keuangan disebabkan oleh perbedaan tujuan penggunaan data aset dan liabilitas keuangan antara kepentingan pelaporan sesuai standar akuntansi dan negosiasi bisnis. Prinsip tersebut juga diterapkan pada anak perusahaan BRI.

b. Metodologi valuasi, deskripsi proses verifikasi harga independent, dan prosedur untuk penyesuaian valuasi atau reserves

Instrumen keuangan yang terekspos risiko suku bunga dan risiko nilai tukar dilakukan valuasi harga secara wajar setiap hari. Terdapat 2 (dua) pendekatan valuasi (penilaian) harga wajar yaitu Mark-to-Market dan Mark-to-Model. Metode valuasi Mark-to-Market dilakukan atas instrumen keuangan yang masuk ke dalam portofolio FVTPL (Fair Value Through Profit or Loss) dan FVOCI (Fair Value through Other Comprehensive Income) wajib dilakukan revaluasi setiap hari. Valuasi dilakukan dengan menggunakan harga penutupan (closing price) setiap hari mengikuti jam penutupan pasar sesuai ketentuan regulator. Sumber data harga penutupan harus mencerminkan transaksi aktual dan wajar, yang berasal dari penyedia data yang kredibel dan independen seperti Bloomberg, Reuters dan penyedia data lainnya menurut konvensi pasar dan regulasi yang berlaku. Bila harga pasar untuk instrumen keuangan yang akan divalusi tidak tersedia, maka dilakukan penetapan harga pasar dengan menggunakan suatu model statistika berdasarkan data historis dan/atau harga referensi yang relevan. Valuasi menggunakan simulasi harga yang dihasilkan dari suatu model (mark to model) dilakukan dengan ketentuan penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 hari kerja terakhir; apabila indikasi harga tersebut tidak tersedia, maka menggunakan harga dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat bunga/kupon, peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa; apabila kedua harga pada poin sebelumnya tidak tersedia, maka valuasi menggunakan internal model yang ada di dalam sistem aplikasi treasury dan/atau market risk yang digunakan. Hasil valuasi berdasarkan harus divalidasi secara periodik sekurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk memastikan konsistensi dan kewajaran harga pasar yang digunakan dalam proses valuasi.

Tabel G. Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen (Bahasa Inggris)		Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
Common Equity Tier I Capital : Instruments and reserves)		Modal Inti Utama (Common Equity Tier I) / CET 1 : Instrumen dan Tambahan Modal Disetor		
1.	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	Saham biasa (termasuk <i>stock surplus</i>)	79,060,875	e.
2.	Retained earnings	Laba ditahan	215,749,291	g.
3.	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya (dan cadangan lain)	24,612,738	f.
4.	<i>Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)</i>	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari CET 1	N/A	N/A
5.	<i>Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)</i>	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	411,154	d.
6.	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	CET 1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	319,834,058	
Common Equity Tier 1 capital : regulatory adjustments		CET 1 : Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)		
7.	Prudential valuation adjustments	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	-	
8.	Goodwill (net of related tax liability)	<i>Goodwill</i>	(806,416)	b.
9.	Other intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	Aset tidak berwujud lain (selain <i>Mortgage-Servicing Rights</i>)	(4,450,075)	
10.	Deferred tax assets that rely on future profitability excluding those arising from temporary differences (net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	N/A	N/A
11.	Cash-flow hedge reserve	<i>Cash-flow hedge reserve</i>	N/A	N/A
12.	Shortfall of provisions to expected losses	<i>Shortfall of provisions to expected losses</i>	N/A	N/A
13.	Securitisation gain on sale (as set out in paragraph 562 of Basel II framework)	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	
14.	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	Peningkatan / penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)	-	
15.	Defined-benefit pension fund net assets	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	N/A
16.	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di neraca)	N/A	N/A
17.	Reciprocal cross-holdings in common equity	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	

Tabel G. Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen (Bahasa Inggris)		Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
18.	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
19.	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah diatas batasan 10%)	N/A	N/A
20.	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	<i>Mortgage servicing rights</i>	-	
21.	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10% net dari kewajiban pajak)	N/A	N/A
22.	Amount exceeding the 15% threshold	Jumlah melebihi batasan 15% dari :	N/A	N/A
23.	of which : significant investments in the common stock of financials	investasi signifikan pada saham biasa financials	N/A	N/A
24.	of which : mortgage servicing rights	Mortgage servicing rights	N/A	N/A
25.	of which : deferred tax assets arising from temporary differences	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	N/A
26.	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	(12,730,356)	
26a.		Seilish PPA dan CKPN	-	
26b.		PPA atas aset non produktif	(66,714)	
26c.		Aset Pajak Tangguhan	(7,805,103)	c.
26d.		Penyertaan	(2,667,643)	a.
26e.		Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
26.f		Eksposur sekuritisasi	-	
26.g		Lainnya	(2,190,896)	
27.	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT1 dan <i>Tier</i> 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya.	-	
28.	Total regulatory adjustments to Common Equity Tier 1	Jumlah pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap CET 1	(17,986,848)	
29.	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	301,847,212	
	Additional Tier 1 capital : instruments	Modal Inti Tambahan (AT 1) : instrumen		
30.	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	
31.	of which : classified as equity under applicable accounting standards	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	

Tabel G. Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen (Bahasa Inggris)		Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
32.	of which : classified as liabilities under applicable accounting standards	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33.	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1</i>	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT 1	N/A	N/A
34.	Additional Tier 1 instruments (and CET 1 instruments not included in roe 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh entitas anak yang diakui dalam perhitungan KPMM! secara konsolidasi	-	
35.	<i>of which : instrumets issued by subsidiaries subject to phase out</i>	Instrumen yang diterbitkan entitas anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	N/A
36.	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	Jumlah AT 1 sebelum regulatory adjustment	-	
	Additional Tier 1 capital : regulatory adjustments	Modal Inti Tambahan : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)		
37.	Investments in own Additional Tier 1 instruments	Investasi pada instrumen AT1 sendiri		
38.	Resiprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain.		
39.	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
40.	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net</i> posisi <i>short</i> yang diiperkenankan)	N/A	N/A
41.	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
41.a		Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	
42.	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
43.	Total Regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap AT 1	-	
44.	Additional Tier 1 capital (AT1)	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-	
45.	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1)	Jumlah Modal Inti (<i>Tier 1</i>) (CET 1 + AT 1)	301,847,212	
	Tier 2 capital : Instruments and provisions	Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) : Instrumen dan cadangan		
46.	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	
47.	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2</i>	Modal yang termasuk <i>phase out</i> Tier 2	N/A	N/A

Tabel G. Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

	Komponen (Bahasa Inggris)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
48.	Tier 2 Instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in row 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh entitas anak yang diakui dalam perhitungan KPMM! secara konsolidasi	258,333	d.
49.	<i>of which : instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>	Modal yng diterbitkan entitas anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	N/A
50.	Provisions	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR Risiko Kredit	14,731,874	
51.	Tier 2 capital before rugulatory adjustments	Jumlah Modal Pelengkap (Tier2) sebelum faktor pengurang	14,990,207	
	Tier 2 capital : regulatory adjustments	Modal Pelengkap (Tier 2) : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)		
52.	Investemnts in own Tier 2 instruments	Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> sendiri	N/A	N/A
53.	Resiprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	Kepemilikan silang pada instrumen <i>Tier 2</i> pada entitas lain	-	
54.	Instruments in the capital of banking, financial and insurnce entities that are outside the scope of regulatory consolidations, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	Investasi pada modal bank, entiatas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
55.	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entitites that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short posistions)	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net</i> posisi <i>short</i> yang diiperkenakan)	N/A	N/A
56.	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
56.a		<i>Sinking Fund</i>	-	
56.b		Penempatan dana pada instrumen <i>Tier 2</i> pada Bank lain	-	
57.	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) Modal Pelengkap	-	
58.	Tier 2 capital (T2)	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah regulatory adjustment	14,990,207	
59.	Total capital (TC = T1 + T2)	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	316,837,419	
60.	Total risk weighted assets	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	1,346,987,452	
	Capital ratios and buffers	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM!) dan Tambahan Modal (Capital Buffer)		
61.	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	Rasio Modal Inti Utama (CET 1) - persentase terhadap ATMR	22.41%	
62.	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assest)	Rasio Modal Inti (Tier 1) - prosentase terhadap ATMR	22.41%	
63.	Total capital as percentage of risk weighted assets	Rasio Total Modal - persentase terhadap ATMR		

Tabel G. Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen (Bahasa Inggris)		Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
64.	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation buffer plus countercyclical buffer requirements plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)	Tambahan modal (<i>buffer</i>) - persentase terhadap ATMR	23.52%	
65.	of which : capital conservation buffer requirement	Capital conservation Buffer	2.50%	
66.	of which : bank specific countercyclical buffer requirement	Countercyclical Buffer	0.00%	
67.	of which : G-SIB buffer requirement	Capital surcharge untuk D-SIB	2.50%	
68.	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets) National minimum (if different from Basel 3)	Untuk bank umum konvensional : Modal Inti Utama (CET 1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal (<i>Buffer</i>) - persentase terhadap ATMR) <i>National minimal</i> (jika berbeda dari Basel 3)		
69.	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3)	Rasio minimal CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	N/A
70.	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)	Rasio minimal <i>Tier 1</i> nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	N/A
71.	National total capital minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)	Rasio minimal total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighted assets)	Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)		
72.	Non-significant investments in the capital of other financials	Investasi non-signifikan pada modal entitas keuangan lain	N/A	N/A
73.	Significant investments in the common stock of financials	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A	N/A
74.	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	<i>Mortgage servicing rights</i> (net dari kewajiban pajak)	N/A	N/A
75.	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A	N/A
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2	Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2		
76.	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)	N/A	N/A
77.	Cap on inclusion in Tier 2 under standardised approach	Cap atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan standar	N/A	N/A
78.	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)	N/A	N/A
79.	Cap of inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB	N/A	N/A

Tabel G. *Permodalan* - Komposisi Permodalan (CC1)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen (Bahasa Inggris)		Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi ¹⁾
	Capital instruments subject to phase out arrangements (only applicable between 1 Jan 2018 and 1 Jan 2022)	Instrumen Modal yang termasuk <i>phase out</i> (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 sd 1 Jan 2022)		
80.	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Cap pada CET1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	N/A
81.	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	N/A	N/A
82.	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	<i>Cap</i> pada AT 1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	N/A
83.	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	N/A	N/A
84.	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	<i>Cap</i> pada <i>Tier 2</i> yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	N/A
85.	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Jumlah yang dikecualikan dari <i>Tier 2</i> karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)	N/A	N/A

Tabel H. *Permodalan* - Rekonsiliasi Permodalan (CC2)

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Laporan Publikasi posisi keuangan	Laporan posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati- hatian	No. Referensi
		Des'25	Des'25	
	ASET			
1.	Kas	31,975,034	32,044,482	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	39,576,502	40,254,114	
3.	Penempatan pada bank lain	53,075,759	55,168,542	
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,161,614	1,167,029	
5.	Surat berharga yang dimiliki	357,542,499	391,644,693	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	29,340,140	29,340,192	
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	24,452	24,452	
8.	Tagihan akseptasi	13,078,567	13,078,567	
9.	Kredit yang diberikan	1,342,673,712	1,460,729,418	
10.	Pembiayaan syariah1)	-	56,350,282	
11.	Piutang Sewa Pembiayaan	-	4,406,157	
12.	Penyertaan modal	51,300,972	6,167,225	
	Penyertaan sebagai Faktor Pengurang di CET 1		2,667,643	a.
13.	Aset keuangan lainnya	12,281,112	19,040,642	
14.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-			
	a. Surat berharga yang dimiliki	(554,918)	(555,017)	
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(72,903,722)	(82,893,734)	
	c. Lainnya	(44,658)	(394,618)	
15.	Aset tidak berwujud	-	806,416	b.
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	
16.	Aset tetap dan inventaris	68,708,433	94,045,303	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(23,342,308)	(30,751,063)	
17.	Aset non produktif	-	-	
	a. Properti terbengkalai	17,311	17,311	
	b. Agunan yang diambil alih	50,837	100,471	
	c. Rekening tunda	-	-	
	d. Aset antarkantor	13,317	13,317	
18.	Aset lainnya			
	a. Aset Pajak Tangguhan	5,066,962	26,334,702	
	Diakui dalam Tier 1		7,805,103	c.
	b. Aset lainnya	22,494,242	8,759,475	
	TOTAL ASET	1,931,535,859	2,135,371,105	

Tabel H. *Permodalan* - Rekonsiliasi Permodalan (CC2)

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Laporan Publikasi posisi keuangan	Laporan posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati- hatian	No. Referensi
		Des'25	Des'25	
	LIABILITAS DAN EKUIT AS			
1.	Giro	450,129,463	448,203,670	
2.	Tabungan	584,892,761	587,585,862	
3.	Deposito	425,066,471	431,054,307	
4.	Uang Elektronik	614,383	614,383	
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	47,462	47,462	
6.	Liabilitas kepada bank lain	17,908,511	17,601,436	
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,101,701	1,101,753	
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	27,932,749	27,932,749	
9.	Liabilitas akseptasi	13,078,567	13,078,567	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	11,596,380	40,901,648	
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	32,599,096	129,399,012	
	Diakui dalam Tier 1		258,333	d.
12.	Setoran jaminan	14,074	14,122	
13.	Liabilitas antarkantor	-	-	
14.	Liabilitas lainnya	67,058,066	106,636,367	
	TOTAL LIABILITAS	1,632,039,684	1,804,429,671	
	EKUITAS			
15.	Modal disetor			
	a. Modal dasar	15,000,000	15,000,000	e.
	b. Modal yang belum disetor -/-	(7,422,050)	(7,422,050)	e.
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	(4,463,270)	(4,463,270)	e.
16.	Tambahan modal disetor			
	a. Agio	76,339,022	75,946,195	e.
	b. Disagio -/-	-	-	
	c. Dana setoran modal	-	-	
	d. Lainnya	575,039	2,333,619	
17.	Penghasilan komprehensif lain			
	a. Keuntungan	20,820,990	584,030	
	Diakui dalam Tier 1		21,590,053	f.
	b. Kerugian -/-	(1,686,054)	(2,198,097)	
	Diakui dalam Tier 1		-	f.
18.	Cadangan			
	a. Cadangan umum	3,022,685	0	
	Diakui dalam Tier 1		3,022,685	f.
	b. Cadangan tujuan	-	-	
19.	Laba/rugi			
	a. Tahun-tahun Lalu	198,632,659	55,268,563	
	Diakui dalam Tier 1		159,446,518	g.
	b. Tahun Berjalan	50,403,926	349,611	
	c. Diakui dalam Tier 1		56,302,773	g.
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(51,726,772)	(51,726,772)	
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	299,496,175	324,033,858	
20.	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	6,496,422	
			411,154	h.
	TOTAL EKUITAS	299,496,175	330,941,434	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1,931,535,859	2,135,371,105	

Tabel 1. *Permodalan* - Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC-Eligible (CCA)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			
No.	Pertanyaan	Informasi Kuantitatif/Kualitatif	Informasi Kuantitatif/Kualitatif
1	Penerbit	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2	Nomor identifikasi	ISIN Code: ID1000118201 Short Code: BBRI	ISIN Code: IDA000133300 Short Code: BBRI04SB
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrument TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)	N/A	N/A
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM		
4	Pada saat masa transisi	N/A	N/A
5	setelah masa transisi	CET 1	Tier 2
6	Apakah instrumen eligible untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Konsolidasi dan Individu	Konsolidasi dan Individu
7	Jenis Instrumen	Saham Biasa	Obligasi Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	80,209,581	258,333
9	Nilai par dari instrumen	7,577,950	500,000
10	Klasifikasi sesuai standar akuntansi keuangan	Ekuitas	Liabilitas
11	Tanggal penerbitan	10/11/2003	06/07/2023
12	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo	Perpetual	Dengan jatuh tempo
13	Tanggal jatuh tempo	Tidak Ada Tanggal Jatuh Tempo	06/07/2028
14	Eksekusi call option atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak	Tidak
15	Tanggal call option, jumlah penarikan dan persyaratan call option lainnya (bila ada)	-	-
16	Subsequent call option	-	-
	Kupon / dividen	-	-
17	Dividen/ kupon dengan bunga tetap atau floating	-	Fixed
18	Tingkat dari coupon rate atau index lain yang menjadi acuan	-	6.45%
19	Ada atau tidaknya dividend stopper	Tidak	Tidak
20	Fully discretionary; partial atau mandatory	-	Mandatory call by OJK
21	Apakah terdapat fitur step up atau insentif lain	-	Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif	-	Kumulatif
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	-	Tidak dapat dikonversi
24	Jika dapat dikonversi, sebutkan trigger point-nya	-	-
25	Jika dapat dikonversi apakah seluruh atau sebagian	-	-
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana rate konversinya	-	-
27	Jika dapat dikonversi; apakah mandatory atau optional	-	-
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	-	-
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan issuer of instrument it converts into	-	-
30	Fitur write-down	-	Ya
31	Jika terjadi write-down, sebutkan trigger-nya	-	1. Rasio modal inti utama (CET 1) Bank induk secara konsolidasi <= 5,125% 2. Terdapat rencana otoritas untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank induk yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan 3. Terdapat perintah dari OJK untuk melakukan <i>write down</i> .
32	Jika terjadi write-down, apakah penuh atau sebagian	-	Penuh
33	Jika terjadi write down; permanen atau temporer	-	Permanen
34	Jika terjadi write down temporer, jelaskan mekanisme write-up	-	Perintah OJK
34a	Tipe subordinasi	-	Surat Berharga Subordinasi
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	-	Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun
36	Apakah terdapat fitur yang non-compliant	-	Tidak
37	Jika Ya, jelaskan fitur yang non-compliant	-	Tidak

Pengungkapan Kualitatif Mengenai Struktur Permodalan dan Kecukupan Permodalan

a. Modal Disetor

Pada 31 Oktober 2003, BRI melakukan Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offerings) dan mulai diperdagangkan pada 10 November 2003. Selanjutnya BRI melakukan stock split dengan rasio 1:2 tanggal 11 Januari 2011 sehingga jumlah saham tercatat sebesar 24.669.162.000 lembar saham dengan porsi kepemilikan pemerintah sebesar 14.000.000.000 lembar saham dan publik sebesar 10.669.162.000 lembar saham. Pada tanggal 10 November 2017, BRI kembali melakukan stock split dengan rasio 1:5 sehingga jumlah saham diterbitkan tercatat sebesar 123.345.810.000 dengan porsi kepemilikan pemerintah sebesar 70.000.000.000 lembar saham dan publik sebesar 53.345.810.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp50,- per lembar saham.

Penerbitan Saham Baru

Pada tanggal 27 September 2021, BRI melakukan Rights Issue atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I sebanyak 28.213.191.604 lembar saham. Setelah Right Issue, jumlah saham beredar BRI bertambah menjadi 151.559.001.604 lembar saham dengan porsi kepemilikan pemerintah sebesar 80.610.976.876 lembar saham dan publik sebesar 70.948.024.728 lembar saham dengan nilai nominal Rp 50,- per lembar saham.

Saham biasa bersifat perpetual (tidak ada jatuh tempo), tidak memiliki fitur call option maupun write down. Pada laporan KPMM, saham biasa dicatat sebagai komponen modal inti utama (CET 1).

b. Obligasi Subordinasi

Sebagai bagian dari strategi bank dalam penguatan struktur permodalan dan pemenuhan kewajiban atas regulasi POJK 14/POJK.03/2017 bahwa Bank BRI sebagai bank sistemik wajib memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, pada tanggal 6 Juli 2023 Bank BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 sebesar Rp500.000,- juta dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Obligasi Subordinasi ini mendapatkan predikat idAA dari lembaga pemeringkat Pefindo dan diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 6.45% yang bersifat tetap hingga jatuh tempo. Pelunasan Obligasi Subordinasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 6 Juli 2028.

Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap (Tier 2) mengacu pada Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Inti Minimum Bank Umum. Obligasi Subordinasi ini dapat di-*write down* dalam hal Perseroan telah ditetapkan oleh OJK dalam kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non-Viability*, dan OJK telah memerintahkan Perseroan untuk melakukan *write down* tanpa kompensasi. Dalam hal terjadi likuidasi pada Perseroan, pemegang Obligasi Subordinasi mendapat prioritas paling akhir dari kreditur lainnya, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan.

Dana hasil penerbitan Obligasi Subordinasi digunakan oleh Perseroan untuk mendukung peningkatan Aset Produktif yang terkategori inklusif mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI RPIM).

c. Struktur Permodalan Bank

Pengelolaan struktur modal memiliki tujuan untuk memastikan bahwa BRI senantiasa menjaga kecukupan permodalan untuk menutup risiko-risiko yang inheren dalam mengelola bisnisnya tanpa mengurangi optimalisasi nilai bagi pemegang saham.

BRI telah memiliki Komite Tata Kelola Konglomerasi Keuangan di mana terdiri dari 6 (enam) sub komite salah satunya Sub Komite Permodalan Investasi dan Strategi. Adapun Komite sebagai organ pendukung Direksi untuk me-review, menetapkan, merekomendasikan, dan melakukan evaluasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh BRI Group. Selain itu, Komite juga melakukan review dan analisis kinerja, serta rekomendasi atas sinergi BRI Group di mana termasuk di dalamnya merupakan kegiatan terkait optimalisasi struktur modal dan pengelolaan Entitas Anak.

Selain itu, BRI juga memiliki Risk Management Committee, yang bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko secara terintegrasi. Committee ini bertanggung jawab menetapkan langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam bentuk analisis permodalan.

BRI juga berkomitmen untuk memenuhi ketentuan regulator terkait struktur modal. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (POJK 11/2016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (POJK 34/2016) bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko dan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer) dengan rincian sebagai berikut:

1. Capital Conservation Buffer sebesar 2,50% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
2. Countercyclical Buffer sebesar 0,00% dari ATMR
3. Capital Surcharge untuk Bank Sistemik sebesar 2,50% dari ATMR

Total CAR minimum BRI berdasarkan profil risiko berada di level 9,70% (bank only dan konsolidasian) maka CAR BRI pada tahun 2025 yang sebesar 21,06% (bank only) dan 23,52% (konsolidasian) mampu berada di atas minimum ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan dan jasa keuangan tersebut.

Secara struktur permodalan, hingga Desember 2025, BRI memiliki modal inti (*Tier-1*) sebesar Rp246,05 triliun (*bank only*) dan Rp301,84 triliun (konsolidasi) serta Modal Pelengkap (*Tier-2*) sebesar Rp13,97 triliun (*bank only*) dan Rp14,99 triliun (konsolidasi) dengan rasio CAR *Tier-1* mencapai 19,93% (*bank only*) dan 22,41% (konsolidasian). Modal Inti (*Tier-1*) BRI besarnya sama dengan Modal Inti Utama (CET-1) dikarenakan BRI tidak memiliki Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*).

Oleh karena itu, Rasio Modal Inti (*Tier-1*) BRI jauh di atas ketentuan minimum sebesar 6% maupun ketentuan minimum Modal Inti Utama (CET-1) sebesar 4,5% yang ditentukan oleh Regulator.

d. Rincian Struktur Modal

Uraian rincian struktur modal disajikan sebagai berikut.

Tabel Struktur Permodalan Konsolidasian

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2025	2024
Modal Inti (<i>Tier 1</i>)	301.847.212	291.317.196
Modal Inti Utama (CET 1)	301.847.212	291.317.196
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	14.990.207	12.658.290
Total Modal Tersedia	316.837.419	303.975.486
ATMR untuk Risiko Kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	1.176.866.464	981.702.825
ATMR untuk Risiko Pasar	31.859.023	33.799.657
ATMR untuk Risiko Operasional	138.261.965	125.883.982
Total ATMR	1.346.987.452	1.141.386.464
Rasio CAR	23,52%	26,63%
Rasio CET 1	22,41%	25,52%
Rasio <i>Tier 1</i>	22,41%	25,52%
Rasio <i>Tier 2</i>	1,11%	1,11%
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	9,70%	9,64%

e. Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

Pada posisi 31 Desember 2025, BRI mampu menjaga struktur permodalan sesuai target maupun level minimum yang ditetapkan regulator. Total Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) BRI sebesar 21,06% dan 23,52% secara konsolidasi dengan Rasio Modal Inti Utama (CET 1) dan Tier 1 tercatat sebesar 19,93%. Tier 1 maupun CET 1 masih terjaga di atas minimum ketentuan regulator masing-masing 6,0% dan 4,5% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal Konsolidasian
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2025		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Rasio CAR	22,08%	21,06%	95,24%
Rasio CET 1	20,95%	19,93%	94,95%
Rasio Tier 1	20,95%	19,93%	94,95%
Rasio Tier 2	1,12%	1,13%	100,89%
Rasio Minimum Tier 1	-	8,57%	-
Rasio Minimum CET 1	-	8,57%	-
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	-	9,70%	-

f. Proyeksi Struktur Modal

Modal KPMM BRI Konsolidasi posisi Desember 2026 diproyeksikan Rp345,84 triliun dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital Adequacy Ratio (CAR) akan selalu dijaga di atas ketentuan minimum regulator perbankan dan jasa keuangan. Proyeksi tersebut telah memperhitungkan reklasifikasi cadangan tujuan dan rencana revaluasi aset dan dampak dari PSAK 71. Adapun uraian proyeksi modal dan pemenuhan KPMM BRI secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Permodalan BRI Konsolidasian
(dalam %)

Uraian	Proyeksi 2026
Capital Adequacy Ratio (CAR)	24,63%

Untuk mempertahankan rasio permodalan tetap sesuai dengan ketentuan Regulator, BRI mengupayakan pemenuhannya dari *retained earning* dan pengelolaan *dividen payout ratio* yang optimal.

Manajemen Risiko – Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

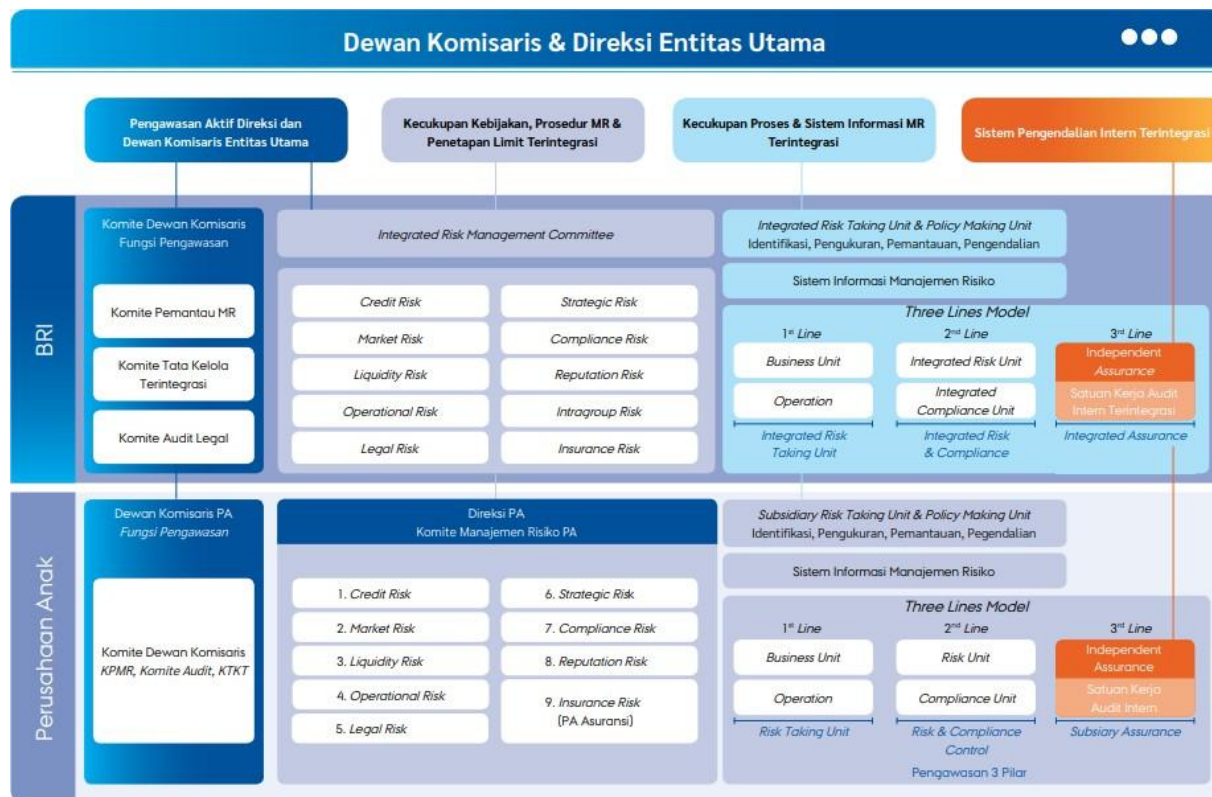
a. Model bisnis dan interaksi dengan profil risiko

Profil Risiko Bank ditetapkan untuk memberikan gambaran atas penilaian risiko-risiko yang melekat dalam aktivitas bisnis dan operasional BRI beserta kualitas penerapan manajemen risikonya baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Model bisnis Bank tercermin dalam profil risiko melalui penetapan dan pengukuran atas parameter-parameter profil risiko. Bank secara rutin melakukan evaluasi atas penetapan limit Risiko dan ambang batas (threshold) manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha, eksposur risiko, dan/atau Profil Risiko secara signifikan.

Dalam rangka menghitung tambahan modal sesuai Profil Risiko, Bank menerapkan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) berlaku bagi Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. ICAAP merupakan proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.

b. Struktur dan Tata Kelola Manajemen Risiko

Kerangka kerja Manajemen Risiko Perseroan tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko BRI yang dilakukan melalui pendekatan pengelolaan modal dan pengelolaan risiko dalam operasional dan bisnis yang meliputi seluruh jajaran organisasi BRI dan anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Secara sederhana, kerangka kerja manajemen risiko BRI dan terintegrasi dengan Perusahaan Anak digambarkan sebagai berikut:



Kerangka kerja tata kelola manajemen risiko terintegrasi di atas mengacu kepada POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Kerangka kerja dan tata kelola Manajemen Risiko yang digunakan oleh KK BRI terdiri dari 4 (empat) pilar utama, yaitu sebagai berikut:

Pilar 1 : Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;

Pilar 2 : Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit terintegrasi.

Pilar 3 : Kecukupan proses dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi; dan

Pilar 4 : Sistem pengendalian intern terintegrasi yang menyeluruh.

Dalam pelaksanaan Pilar ke-1 dan Pilar ke-2 Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi dan Dewan Komisaris pada masing-masing entitas KK BRI dibantu oleh Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi dan Komite di bawah Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan Pilar ke-3, masing-masing entitas KK BRI harus menerapkan model tata kelola risiko 3 (tiga) lini atau three lines model yaitu :

1. lini pertama sebagai unit pemilik Risiko merupakan unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelola Risiko dalam proses bisnis yang terdiri dari Core Risk Taking Unit maupun Supporting Risk Taking Unit;
2. lini kedua sebagai fungsi Manajemen Risiko dan kepatuhan independen merupakan unit yang mengukur, memantau dan memitigasi Risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan Manajemen Risiko; dan
3. lini ketiga sebagai fungsi Audit Intern merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian Risiko diterapkan secara efektif oleh perusahaan.

Dalam pelaksanaan Pilar ke-4 yaitu Sistem pengendalian intern terintegrasi, SKAIT dan SKAI Perusahaan Anak sebagai Independent Assurance memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan ketiga pilar Manajemen Risiko Terintegrasi. Terakhir, dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan sinergi antar organ pengelola risiko entitas utama dan organ pengelola risiko perusahaan anak.

c. Code of Conduct

BRI memiliki kebijakan Code of Conduct (Kode Etik) yang tertuang pada ketentuan Good Governance. Prinsip Kode Etik di BRI adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Komitmen dan Keteladanan Pemimpin
Komitmen dari pemimpin dicerminkan dari kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk menyatakan kepatuhannya terhadap Kode Etik melalui Surat Pernyataan Kode Etik. Disamping itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga menjadi teladan bagi seluruh Insan BRILiaN dalam mempedomani serta mengimplementasikan Kode Etik.
2. Prinsip Transparansi
Prinsip Transparansi tercermin dari keterbukaan dan publikasi yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan, implementasi dan pelanggaran Kode Etik yang terjadi di BRI sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Prinsip Pertanggungjawaban
Tanggung jawab BRI sebagai Bank atas implementasi Kode Etik antara lain dicerminkan dari hubungan BRI dengan nasabah, pesaing, mitra kerja, regulator, stakeholder serta masyarakat dan lingkungan. Adapun tanggung jawab untuk memenuhi Kode Etik bagi Insan BRI terdokumentasi dalam Surat Pernyataan Kode Etik serta penerapan perilaku yang sesuai dengan Kode Etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Prinsip Pengendalian
Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dilaporkan melalui sarana pelaporan Whistleblowing System (WBS). Apabila berdasarkan hasil investigasi pelanggaran Kode Etik tersebut terbukti kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Disiplin BRI.
5. Prinsip Pengawasan
Terhadap implementasi kebijakan Kode Etik di BRI dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebijakan Kode Etik di BRI telah dipahami oleh insan BRI serta diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat selalu menjadi pedoman bagi insan BRI. Adapun terhadap kebijakan Kode Etik senantiasa dilakukan perbaikan sesuai dengan kondisi terkini.

Komitmen Kode Etik berlaku bagi seluruh Insan BRI di seluruh jenjang organisasi. Penerapan Kode Etik secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen, dan ketentuan mendukung terciptanya budaya Perusahaan. Seluruh Insan BRI wajib membuat Surat Pernyataan Kode Etik setiap tahun.

Publikasi dan transparansi Kode Etik Perusahaan dilakukan melalui website BRI yang mencakup dan tidak terbatas pada kebijakan serta implementasi kode etik di BRI, sesuai ketentuan yang berlaku serta sistem kepatuhan BRI disertifikasi/diaudit/diverifikasi oleh pihak ketiga baik internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Ruang Lingkup dan Fitur Utama Sistem Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko BRI sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis BRI. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya melalui pengembangan model seperti Internal Risk Rating, Value at Risk, Portfolio Management, Stress Testing, Economic Value of Equity, model impairment dan model lainnya yang mendukung dalam pengambilan keputusan.

Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha BRI, produk, transaksi, dan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BRI.

Dalam rangka penyelarasan antara penerapan Basel II, III dan Enterprise Risk Management (ERM), BRI terus melaksanakan Implementasi Basel sesuai dengan acuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) maupun best practices lainnya, yang meliputi area di Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book), Risiko Operasional, Pengelolaan Modal dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Stress Testing serta Recovery dan Resolution Plan.

e. Pelaporan Informasi Risiko yang Diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) BRI dan seluruh Perusahaan Anak menyusun laporan manajemen risiko dalam format yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara konsolidasian maupun secara terintegrasi. Pelaporan manajemen risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pihak-pihak tertentu antara lain:

1. Laporan pemantauan Risk Appetite Statement, Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank secara Individu maupun Konsolidasi,
2. Laporan kecukupan pencadangan (CKPN)
3. Laporan ATMR untuk Risiko Kredit, Pasar dan Operasional
4. Laporan perkembangan pertumbuhan pinjaman
5. Laporan perkembangan kualitas kredit
6. Laporan perkembangan kredit yang direstrukturisasi
7. Laporan penggunaan anggaran penghapusbukuan (PH) dan realisasi pendapatan recovery
8. Laporan monitoring biaya CKPN maupun rasio pencadangan, misalnya NPL Coverage dan LAR Coverage
9. Hasil Stress Test Risiko Kredit baik secara portfolio maupun bagi nasabah besar, Stress Test Risiko Pasar maupun Likuiditas.
10. Laporan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
11. Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book).
12. Laporan Recovery & Resolution Plan.

f. Stress Test

Untuk menilai kecukupan tingkat ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas bank dalam menghadapi perubahan dan shock pada kondisi makroekonomi, maka BRI melakukan stress test. Tujuan stress test bagi BRI adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pengaruh terutama yang berdampak signifikan terhadap portofolio BRI.
2. Mengestimasi potensi kerugian BRI pada kondisi pasar yang tidak normal dan cenderung ekstrim.
3. Mengukur sensitivitas kinerja dan kondisi keuangan BRI terhadap perubahan faktor risiko.
4. Memastikan BRI memiliki ketahanan dalam tekanan krisis ekonomi.

Cakupan stress test yang diterapkan di BRI meliputi scenario stress test dan sensitivity stress test. Scenario stress test mencakup risiko kredit, pasar dan likuiditas. Dalam scenario stress test ini, risiko kredit dan pasar masuk dalam solvency Stress Test yang menilai tingkat ketahanan permodalan Bank yang tercermin pada Laporan Keuangan Bank meliputi neraca, laba/rugi dan rasio keuangan, sedangkan risiko likuiditas diperhitungkan melalui metodologi tersendiri diluar Solvency Stress Test. Sensitivity stress test dilakukan untuk melengkapi analisis scenario stress test yang meliputi risiko kredit, nilai tukar dan risiko suku bunga. Stress test di BRI dilaksanakan secara individu maupun secara konsolidasi bersama dengan Perusahaan Anak. Pelaksanaan stress test BRI Group merupakan salah satu pengelolaan risiko terintegrasi, dimana hasilnya disampaikan kepada manajemen BRI, manajemen Perusahaan Anak serta regulator untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan atas strategi pengelolaan risiko perusahaan dalam skenario pemburuan ekonomi.

BRI sebagai salah satu Bank Domestic-Systemically Important Banks (D-SIB atau Bank Sistemik) di Indonesia, maka memiliki kewajiban untuk menyusun analisis stress test yang merupakan bagian dari penyusunan Recovery Plan untuk disampaikan kepada Direksi maupun Otoritas Jasa Keuangan. BRI juga berpartisipasi dalam Joint Stress Test yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara berkala.

g. Strategi dan proses untuk mengatur, melindungi nilai dan memitigasi risiko yang muncul dari model bisnis Bank

Proses manajemen risiko pasar dilakukan sesuai dengan prinsip penerapan manajemen risiko yang diatur dalam kebijakan umum manajemen risiko dan didasarkan pada Three Lines Model dimana Dewan Komisaris dan Direksi berperan sebagai governing body dan Three Lines of Defense yang terdiri dari Unit Kerja Operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern. Pengawasan Aktif Direksi dilakukan secara berkala dalam komite direksi seperti Forum Risk Management Committee, Forum Assets & Liability Management Committee, Business Performance Review, dan Rapat Direksi. Sedangkan Pengawasan oleh komisaris dilakukan melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala (harian dan bulanan) baik itu oleh Unit Kerja Operasional maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan tools yang telah ditetapkan untuk memitigasi risiko yang akan muncul dari aktivitas bisnis.

BRI menetapkan kebijakan lindung nilai untuk mengurangi risiko yang timbul atau diperkirakan akan timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan. Hal-hal yang ditetapkan terkait lindung nilai mencakup ketentuan umum, teknik transaksi lindung nilai, batasan transaksi lindung nilai dan instrument lindung nilai.

LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT

Periode : Des-25

(Dalam Juta Rupiah)

No	Item	Bank	Konsol
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai gross sebelum dikurangi CKPN).	2,005,039,158	2,219,214,474
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	(43,694,582)	(2,667,643)
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	-	-
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	-	-
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.	-	-
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif	5,022,245	5,022,245
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi reverse repo.	1,407,391	1,407,443
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.	122,184,690	122,230,958
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.	(169,259,220)	(157,062,289)
12	Penyesuaian lainnya.	-	-
13	Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit	1,920,699,682	2,188,145,188

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

Periode : Des-25

(Dalam Juta Rupiah)

No	Item	Bank	Konsolidasi
		Dec-25	Dec-25
	Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan		
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	1,889,083,441	2,130,253,380
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan)	(73,503,299)	(83,843,369)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)	(54,556,993)	(17,986,847)
7	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6	1,761,023,149	2,028,423,164
	Eksposur Transaksi Derivatif		
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu	2,385,112	2,385,112
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivative	5,022,245	5,022,245
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central counterparty (CCP))	N.A	N.A
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit	N.A	N.A
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add-on untuk transaksi penjualan derivatif kredit)	N.A	N.A
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12	7,407,357	7,407,357
	Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)		
14	Nilai tercatat aset SFT secara gross	29,340,140	29,340,192
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan current exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	1,407,391	1,407,443
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17	30,747,531	30,747,635
	Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)		
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi Nilai gross sebelum dikurangi CKPN	214,735,779	214,851,452
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	(91,268,882)	(91,338,285)
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)	(1,945,252)	(1,946,135)
22	Total Eksposur TRA Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21	121,521,645	121,567,032
	Modal dan Total Eksposur		
23	Modal Inti	246,050,197	301,847,212
24	Total Eksposur Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22	1,920,699,682	2,188,145,188

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

Periode : Des-25

(Dalam Juta Rupiah)

No	Item	Bank	Konsolidasi
		Dec-25	Dec-25
	Rasio Pengungkit (<i>Leverage</i>)		
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	12.81%	13.79%
25.a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	12.81%	13.79%
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3.00%	3.00%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	N/A	N/A
	Pengungkapan Nilai Rata-Rata		
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	14,670,070	14,670,096
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	29,340,140	29,340,192
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	121,521,645	121,567,032
30.a	Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	121,521,645	121,567,032
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	12.81%	13.79%
31.a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	12.81%	13.79%

Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1)

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
		a	b		d	e	f	g
1	Kredit	130,162,472	1,212,511,241	72,903,722	54,973,164	17,930,558		1,269,769,991
2	Surat Berharga	-	320,880,955	89,420	-	89,420		320,791,535
3	Transaksi Rekening Administratif	3,373,909	211,361,870	1,945,252	1,282,207	663,045		212,790,527
4	Total	133,536,381	1,744,754,066	74,938,397	56,255,371	18,683,023		1,803,352,053

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
		a	b		d	e	f	g
1	Kredit	133,618,869	1,327,110,547	79,328,619	60,555,221	18,773,398		1,381,400,798
2	Surat Berharga	-	372,732,801	89,519	-	89,519		372,643,283
3	Transaksi Rekening Administratif	3,374,131	211,477,321	1,946,135	1,282,209	663,926		212,905,317
4	Total	136,993,000	1,911,320,669	81,364,273	61,837,430	19,526,843		1,966,949,398

Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2)

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	130,588,006
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	41,937,523
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	10,330,938
4	Nilai hapus buku	20,434,910
5	Perubahan lain	- 11,597,209
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan (1+2-3-4+5)	130,162,472

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	133,734,322
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	43,877,322
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	36,480,103
4	Nilai hapus buku	20,790,018
5	Perubahan lain	13,278,354
6	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan (1+2-3-4+5)	133,619,877

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

Kualitatif

Cakupan dan definisi Tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai

Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan atau pembayaran bunga atau debitur yang wanprestasi. Tagihan yang mengalami penurunan nilai merupakan tagihan yang mengalami suatu kondisi dimana terjadi peristiwa yang merugikan (bukti objektif) sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah kredit diberikan yang berdampak pada kesanggupan bayar debitur dimasa datang. Seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari masuk dalam tagihan yang mengalami penurunan nilai.

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai

a. Penggunaan informasi perkiraan masa depan (forward-looking)

Bank menggunakan informasi forward-looking dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (base case) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (output) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih. Pandangan dasar (base case) digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut:

1. Probability of Default (PD)
2. Loss of Given Default (LGD)
3. Exposure at Default (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi forward-looking.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan rating yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif, kualitatif, dan perkiraan berwawasan ke depan (forward-looking).

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. LGD juga diamati dengan mempertimbangkan jaminan tunai yang merupakan bagian integral dari aset keuangan terhutang serta biaya yang dikeluarkan dalam proses pemulihan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025									
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
		Jakarta	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia Timur	Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
a	b	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
1	Tagihan kepada Pemerintah	296,401,489	-	-	-	-	-	-	-	-	296,401,489
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	162,363,195	11,134	6,072	118	146,086	24,794	679,897	87,225	1,174,438	164,492,959
3	Tagihan kepada Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	95,619,022	1,151	-	-	376	-	2,148	18	-	95,622,715
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	4,123,403	49	-	-	5,105	-	-	-	-	4,128,557
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instr	7,606,390	-	-	-	-	-	-	-	-	7,606,390
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	14,858,788	28,672,021	10,590,079	5,399,902	22,246,824	22,454,646	24,349,417	33,165,491	341,030	162,078,198
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5,872,231	5,891,403	2,154,762	1,492,878	5,986,083	3,309,101	6,237,483	8,984,331	18,739	39,947,011
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	6,540,432	388,553	101,464	119,989	357,272	143,128	935,031	986,455	-	9,572,324
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	10,122,804	36,595,443	11,681,293	13,069,430	18,940,176	10,791,466	12,370,149	27,706,675	2,012	141,279,448
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	106,782,476	84,543,349	32,241,518	12,035,500	59,016,460	71,098,295	67,171,527	102,035,071	17,301,973	552,226,169
13	Tagihan kepada Korporasi	192,468,530	14,867,873	3,825,452	1,866,275	13,900,813	5,633,933	16,075,747	18,693,251	34,000,738	301,332,612
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	13,344,132	11,287,970	3,380,890	2,052,873	13,944,682	10,898,248	9,517,845	10,157,611	2,097,854	76,682,105
15	Aset Lainnya	28,569,230	16,516,243	2,814,183	8,345,278	7,254,034	18,564,712	12,333,013	953,061	9,575,233	104,924,987
	TOTAL	944,672,122	198,775,189	66,795,713	44,382,243	141,797,911	142,918,323	149,672,257	202,769,189	64,512,017	1,956,294,964

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024									
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
		Jakarta	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia Timur	Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
a	b	c	d	e	f	g	f	i	j	k	l
1	Tagihan kepada Pemerintah	359,596,614	-	-	-	-	-	-	-	5,976,532	365,573,146
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	105,508,957	18,967	8,911	1,121	413,180	53,861	623,845	95,041	1,925,649	108,649,531
3	Tagihan kepada Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	75,219,980	19,713	-	-	3,003	-	11,170	-	204,667	75,458,533
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	4,384,708	-	102	-	16,449	-	14	-	9,936	4,411,209
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instr	6,546,863	-	-	-	-	-	-	-	-	6,546,863
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	13,328,406	24,296,110	9,457,243	4,663,371	18,918,012	19,908,001	21,448,004	28,055,607	322,320	140,397,074
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5,283,651	5,710,039	2,513,863	1,697,039	6,281,702	3,061,311	6,438,363	8,795,541	18,632	39,800,141
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	4,023,501	423,218	84,108	166,903	520,343	210,906	664,805	1,191,659	-	7,285,443
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	9,546,635	36,961,253	11,687,475	11,771,509	19,023,291	10,749,161	12,604,073	26,538,550	943	138,882,889
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	82,415,337	82,681,127	31,917,738	12,629,579	61,242,061	74,909,268	70,443,459	97,111,812	39,603,028	552,953,409
13	Tagihan kepada Korporasi	144,473,718	14,616,741	3,389,286	1,599,228	14,173,023	6,853,097	13,404,786	14,258,667	27,213,693	239,982,238
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	14,326,811	10,296,141	4,086,178	1,755,929	13,586,134	9,990,854	8,589,568	9,108,966	1,808,176	73,548,756
15	Aset Lainnya	42,864,463	9,932,017	4,509,046	3,495,394	7,645,609	7,788,429	6,332,523	11,280,768	2,319,402	96,167,651
	TOTAL	867,519,643	184,955,327	67,653,950	37,780,073	141,822,806	133,524,888	140,560,609	196,436,611	79,402,979	1,849,656,885

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025									
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
		Jakarta	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia Timur	Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
a	b	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
1	Tagihan kepada Pemerintah	302,047,966	-	-	-	-	-	-	-	-	302,047,966
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	162,500,310	11,134	6,072	118	146,086	24,794	679,897	87,225	1,174,438	164,630,075
3	Tagihan kepada Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	101,323,474	154,692	56,867	-	40,183	51,180	64,702	91,005	5,687	101,787,790
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	4,123,403	49	-	-	5,105	-	-	-	772,233	4,900,790
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instr	8,905,851	8,331	3,086	-	2,160	2,777	3,394	4,937	309	8,930,844
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	14,939,829	28,678,819	10,590,079	5,399,902	22,252,831	22,460,658	24,371,676	33,266,883	341,030	162,301,706
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5,879,504	5,896,691	2,154,762	1,492,878	5,986,083	3,309,101	6,238,483	9,025,315	18,741	40,001,557
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	6,815,832	388,553	101,464	119,989	357,272	143,128	944,588	1,001,470	-	9,872,296
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	10,122,976	36,595,443	11,681,293	13,069,430	18,940,176	10,791,466	12,370,149	27,707,616	2,012	141,280,561
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	134,928,571	124,032,672	47,412,184	12,300,092	76,745,920	88,584,102	88,932,076	136,721,962	20,666,368	730,323,947
13	Tagihan kepada Korporasi	197,400,028	15,303,060	3,993,195	1,866,275	14,013,247	5,853,720	16,423,167	19,222,636	34,015,234	308,090,560
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	14,098,281	11,651,726	3,507,596	2,052,873	14,041,427	11,026,543	9,681,311	10,497,874	2,110,508	78,668,140
15	Aset Lainnya	41,312,415	23,488,829	5,396,623	8,345,278	9,061,742	20,888,907	15,173,696	5,084,964	10,340,430	139,092,882
	TOTAL	1,004,398,439	246,209,999	84,903,219	44,646,835	161,592,233	163,136,375	174,883,139	242,711,886	69,446,989	2,191,929,114

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024									
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah									
		Jakarta	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia Timur	Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
a	b	c	d	e	f	g	f	i	j	k	l
1	Tagihan kepada Pemerintah	365,136,429	-	-	-	-	-	-	-	5,976,532	371,112,961
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	105,622,866	18,967	8,911	1,121	413,180	53,861	623,845	95,041	1,925,649	108,763,440
3	Tagihan kepada Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	80,916,509	115,334	24,821	-	28,329	30,687	49,045	55,051	205,624	81,425,399
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	4,384,708	-	102	-	16,449	-	14	-	475,047	4,876,320
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instr	8,238,877	6,756	1,754	-	1,790	2,168	2,676	3,890	67	8,257,979
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	13,427,735	24,303,851	9,457,243	4,663,371	18,923,520	19,916,521	21,472,688	28,185,376	322,320	140,672,625
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5,292,032	5,716,216	2,513,863	1,697,039	6,281,702	3,061,311	6,445,879	8,852,027	18,632	39,878,701
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	4,327,245	423,218	84,108	166,903	520,343	210,906	672,264	1,201,659	-	7,606,646
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	9,546,751	36,961,253	11,687,475	11,771,509	19,023,291	10,749,161	12,604,073	26,540,147	943	138,884,602
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	101,980,403	112,668,554	41,020,346	12,889,185	77,672,728	88,846,486	88,707,862	126,013,344	41,665,898	691,464,806
13	Tagihan kepada Korporasi	148,914,891	14,902,775	3,455,466	1,599,228	14,247,161	6,999,048	13,564,593	14,566,797	27,216,064	245,466,023
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	15,390,299	10,525,174	4,139,403	1,756,041	13,642,616	10,068,847	8,697,170	9,374,942	1,810,361	75,404,854
15	Aset Lainnya	53,783,206	15,145,420	5,862,353	3,495,394	9,026,440	9,461,524	8,397,510	14,282,233	3,001,430	122,455,510
	TOTAL	916,961,951	220,787,519	78,255,847	38,039,791	159,797,549	149,400,520	161,237,619	229,170,506	82,618,566	2,036,269,867

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tagihan kepada Pemerintah	81,096,780	47,511,977	41,454,273	80,001,063	46,337,396	296,401,489
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	29,319,616	6,391,752	6,846,704	50,575,637	71,359,250	164,492,960
3	Tagihan kepada Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	92,869,332	1,855,953	692,972	204,457	-	95,622,715
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1,271,010	2,250,021	607,527	1	-	4,128,557
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	7,606,390	7,606,390
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	86,631,419	26,242,624	23,674,379	25,183,760	346,015	162,078,197
9	Kredit Beragun Properti Komersial	22,107,786	5,232,635	6,714,303	5,785,844	106,444	39,947,012
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	5,281,695	1,220,121	1,044,325	138,505	1,887,678	9,572,324
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1,316,679	9,902,393	16,673,833	113,380,782	5,760	141,279,447
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	84,603,297	231,019,977	95,501,541	66,371,262	74,730,093	552,226,170
13	Tagihan kepada Korporasi	136,411,809	30,553,042	31,782,058	64,167,077	38,418,628	301,332,613
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	16,925,262	24,665,557	15,276,487	8,980,448	10,834,353	76,682,106
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	104,924,987	104,924,987
	TOTAL	557,834,686	386,846,052	240,268,402	414,788,835	356,556,992	1,956,294,967

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	i	j	k	l	m	n
1	Tagihan kepada Pemerintah	66,776	-	6,097,117	-	359,409,253	365,573,146
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	29,135,375	6,784,737	9,008,615	4,367,554	59,353,249	108,649,531
3	Tagihan kepada Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	27,578,874	697,217	223,054	7,254	46,952,134	75,458,533
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1,149,017	2,579,443	681,934	815	-	4,411,209
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	6,546,863	6,546,863
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	79,398,379	27,313,932	22,068,598	11,511,535	104,630	140,397,074
9	Kredit Beragun Properti Komersial	23,858,983	5,432,243	6,248,149	4,251,618	9,149	39,800,141
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	4,687,403	849,472	140,609	29,092	1,578,867	7,285,443
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1,359,166	9,788,474	16,565,622	111,163,495	6,132	138,882,889
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	94,012,329	219,807,647	117,803,610	58,180,257	63,149,566	552,953,409
13	Tagihan kepada Korporasi	81,911,612	33,049,610	24,071,033	55,335,088	45,614,894	239,982,238
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	17,001,715	23,198,499	15,061,374	9,203,921	9,083,247	73,548,756
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	96,167,651	96,167,651
	TOTAL	360,159,630	329,501,275	217,969,715	254,050,629	687,975,636	1,849,656,885

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tagihan kepada Pemerintah	86,743,257	47,511,977	41,454,273	80,001,063	46,337,396	302,047,966
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	29,456,732	6,391,752	6,846,704	50,575,637	71,359,250	164,630,075
3	Tagihan kepada Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	98,341,316	1,855,953	692,972	328,878	568,671	101,787,790
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1,271,010	2,250,021	607,527	- 1	772,233	4,900,790
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	78	-	1,293,521	-	7,637,246	8,930,844
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	86,717,540	26,243,790	23,683,504	25,310,856	346,015	162,301,704
9	Kredit Beragun Properti Komersial	22,145,965	5,235,684	6,718,895	5,794,569	106,444	40,001,557
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	5,312,523	1,228,636	1,044,325	399,134	1,887,678	9,872,296
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1,316,679	9,902,393	16,673,833	113,381,895	5,760	141,280,561
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	109,477,494	253,728,204	98,201,401	66,961,373	201,955,477	730,323,948
13	Tagihan kepada Korporasi	137,669,578	31,254,959	32,128,569	65,474,525	41,562,934	308,090,565
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	16,974,886	24,761,389	15,337,914	9,494,175	12,099,776	78,668,140
15	Aset Lainnya	266,057	128,173	1,556,883	13,279	137,128,491	139,092,882
	TOTAL	595,693,113	410,492,931	246,240,321	417,735,383	521,767,370	2,191,929,117

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	i	j	k	l	m	n
1	Tagihan kepada Pemerintah	2,498,622	878,873	6,640,094	1,686,120	359,409,253	371,112,962
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	29,139,660	6,894,361	9,008,615	4,367,555	59,353,249	108,763,440
3	Tagihan kepada Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	33,518,211	724,746	223,054	7,254	46,952,134	81,425,400
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1,149,017	2,579,443	681,934	815	465,111	4,876,320
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	23,308	-	-	1,687,807	6,546,863	8,257,978
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	79,460,369	27,385,412	22,087,580	11,634,634	104,630	140,672,625
9	Kredit Beragun Properti Komersial	23,906,632	5,456,716	6,254,279	4,251,925	9,149	39,878,701
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	4,698,269	866,864	140,609	322,037	1,578,867	7,606,646
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1,359,240	9,788,946	16,566,562	111,163,721	6,132	138,884,602
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	202,616,367	243,889,099	123,191,204	58,618,569	63,149,566	691,464,806
13	Tagihan kepada Korporasi	84,690,150	34,525,094	24,643,712	55,992,171	45,614,894	245,466,023
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	17,768,960	23,391,494	15,233,058	9,928,096	9,083,247	75,404,855
15	Aset Lainnya	18,179,328	656,604	1,109,284	66,504	102,443,791	122,455,510
	TOTAL	499,008,135	357,037,653	225,779,985	259,727,208	694,716,887	2,036,269,869

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembiayaan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
31 Desember 2025																
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	7,338,518	-	-	-	-	-	17,984,801	3,943,269	35,589	76,718	147,260,053	34,236,281	11,348,683	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	1,970,520	-	-	-	-	-	1,462,771	320,729	44,546	1,685	20,006,835	11,500,560	360,320	-
3	Industri Pengolahan	-	3,585,843	-	-	-	-	-	11,121,997	4,606,752	1,170,133	14,953	68,235,985	32,174,946	5,367,948	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	32,042,046	-	-	-	-	-	435,876	99,235	1,157,688	155	10,751,048	11,709,039	229,705	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	271,456	43,114	-	853	441,264	71,737	106,588	-
6	Konstruksi	-	57,269,598	-	-	-	-	-	6,818,104	1,227,075	4,188,794	1,018	920,427	3,810,776	2,657,130	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	25,241,847	-	-	-	-	-	83,050,965	21,975,421	314,838	157,476	153,796,433	32,807,859	33,764,641	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	8,364,090	-	-	-	-	-	1,926,940	467,154	3,488	8,950	4,266,994	12,528,234	1,111,235	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	42,997	-	-	-	-	-	3,887,408	1,524,028	4,972	21,586	10,835,831	1,396,689	2,058,956	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	260,686	-	-	-	-	-	540,906	124,350	-	506	261,465	174,515	153,128	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	15,010,627	-	94,915,562	-	3,694,737	7,606,390	197,244	120,794	-	267	247,624	32,063,072	39,210	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	945,059	625,974	25,453	7,126	3,002,345	1,607,211	399,440	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	451,831	70,603	1,367	87	127,560	206,246	73,310	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	255	-	-	-	-	-	1,961,298	457,535	27,841	6,311	2,075,111	2,394,427	598,553	-
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	296,401,489	-	-	-	-	-	-	4,033	3,151	1,406	-	3,322	139,147	354	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	212,971	251,397	-	982	274,653	448,529	77,068	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	109,073	-	-	-	-	-	1,198,465	1,266,181	758	4,589	791,047	2,535,986	307,780	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	151,885	40,016	-	477	250,513	858,401	158,196	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	12,949,405	-	-	-	-	-	5,850,178	1,397,438	2,595,451	4,700,510	47,198,749	23,817,286	10,198,215	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	198,985	22,700	-	1,165	261,728	93,560	112,522	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	23,376,607	1,348,492	-	136,272,077	77,698,345	30,167,348	7,544,085	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,931	385	834	-	-
24	Lainnya	-	307,453	-	707,153	-	433,820	-	28,419	11,601	-	27	3,518,377	66,589,931	15,039	104,924,987
	Total	296,401,489	164,492,959	-	95,622,715	-	4,128,557	7,606,390	162,078,198	39,947,010	9,572,324	141,279,447	552,226,170	301,332,612	76,682,106	104,924,987

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembiayaan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
31 Desember 2024																
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	6,938,020	-	-	-	-	-	15,508,256	3,293,699	131,800	75,410	138,099,822	23,230,807	9,648,170	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	5,520,474	-	-	-	-	-	1,070,442	371,901	6,251	2,096	17,946,103	13,017,954	240,134	-
3	Industri Pengolahan	-	8,602,007	-	-	-	-	-	9,571,378	4,665,857	1,548,850	20,573	65,190,581	24,967,943	5,078,041	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	27,242,022	-	-	-	-	-	443,074	109,662	993	1,009	7,770,697	7,252,440	227,020	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	311,209	101,102	-	1,402	428,472	56,555	84,228	-
6	Konstruksi	-	15,012,225	-	-	-	-	-	5,895,959	1,207,951	4,228,023	1,074	907,371	6,787,964	3,442,002	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	19,436,659	-	-	-	-	-	81,304,788	23,732,070	85,620	185,505	171,797,824	25,159,864	32,546,974	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	7,908,364	-	-	-	-	-	1,971,768	433,703	840	10,882	4,788,134	8,871,216	1,161,683	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	67,969	-	-	-	-	-	3,398,641	1,442,873	373	21,828	12,129,745	1,499,019	2,091,776	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	1,485,373	-	-	-	-	-	586,007	146,323	873	374	244,409	678,363	66,704	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	9,701,795	-	75,458,532	-	4,411,210	6,546,863	137,862	121,882	353,823	170	219,615	12,658,651	32,630	-
12	Real Estat	-	60,135	-	-	-	-	-	897,215	588,753	48,526	10,439	2,078,092	352,149	406,754	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	329,298	65,672	993	241	123,073	85,006	74,744	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	1,700,237	435,816	21,166	6,948	2,099,206	1,661,757	543,636	-
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	365,573,146	-	-	-	-	-	-	644	3,528	2,006	98	4,481	201,713	827	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	198,957	186,034	-	791	258,847	254,050	65,964	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	920,001	667,244	4,608	5,647	855,608	1,356,329	198,076	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	183,311	41,332	-	772	326,583	622,092	258,663	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	4,264,057	-	-	-	-	-	5,479,149	1,463,194	830,666	4,533,912	45,076,014	30,370,346	9,634,046	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	216,734	43,235	-	941	303,864	77,791	114,165	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	9,767,666	492,050	-	133,517,376	75,470,712	29,888,288	6,799,090	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,668	495	175	-	-
24	Lainnya	-	2,410,431	-	-	-	-	-	504,478	186,260	20,031	483,734	6,833,492	50,931,765	833,430	96,167,651
	Total	365,573,146	108,649,533	-	75,458,532	-	4,411,210	6,546,863	140,397,074	39,800,141	7,285,442	138,882,890	552,953,408	239,982,238	73,548,757	96,167,651

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
31 Desember 2025																
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	7,338,518	-	-	-	-	-	17,992,569	3,946,324	35,589	76,718	160,029,893	35,592,750	11,611,996	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	1,970,520	-	-	-	-	-	1,463,163	320,729	44,546	1,685	20,058,767	11,555,391	361,536	-
3	Industri Pengolahan	-	3,585,843	-	-	-	-	-	11,134,227	4,609,738	1,170,133	14,953	69,910,580	32,765,569	5,397,868	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	32,042,046	-	-	-	-	-	435,876	99,235	1,157,688	155	10,756,085	11,709,039	229,705	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	271,456	43,114	-	853	441,267	71,737	106,961	-
6	Konstruksi	-	57,269,598	-	-	-	-	-	6,831,527	1,251,641	4,477,116	1,018	1,278,372	4,157,680	2,875,124	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	25,241,847	-	-	-	-	-	83,091,444	21,986,642	314,838	157,476	183,916,842	33,102,375	33,853,362	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	8,364,090	-	-	-	-	-	1,926,966	467,766	3,488	8,950	4,575,913	12,649,884	1,113,652	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	42,997	-	-	-	-	-	3,888,587	1,524,606	4,972	21,586	10,942,198	1,402,842	2,070,010	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	260,686	-	-	-	-	-	542,191	124,350	-	506	296,284	185,278	153,128	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	494,569	15,010,627	-	99,880,116	-	3,694,737	8,899,911	200,700	125,317	-	267	2,019,048	32,125,177	47,440	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	946,311	625,974	25,453	7,126	3,069,266	1,638,621	401,695	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	453,657	71,133	1,367	87	322,973	408,671	77,596	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	255	-	-	-	-	-	1,966,352	457,535	27,841	6,311	2,406,801	2,502,891	608,903	-
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	296,401,489	-	-	-	-	-	-	4,033	3,151	1,406	-	189,397	139,147	532	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	212,971	251,397	-	982	332,560	448,529	77,073	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	109,073	-	-	-	-	-	1,198,566	1,266,181	758	4,589	905,819	2,535,986	310,809	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	151,891	40,016	-	477	263,054	858,401	160,983	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	12,949,405	-	-	-	-	-	5,856,412	1,400,498	2,595,451	4,700,510	48,700,769	23,860,348	10,214,064	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	199,079	22,700	-	1,165	264,136	93,560	114,259	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	23,488,925	1,350,216	-	136,272,077	78,609,925	30,167,348	7,595,845	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	4,277	-	-	3,044	236,148	5,617	3,208	-
24	Lainnya	5,151,908	444,568	-	1,907,674	-	1,206,053	30,933	40,526	13,293	11,650	27	130,797,773	70,113,724	1,282,391	138,986,312
Total		302,047,966	164,630,075	-	101,787,790	-	4,900,790	8,930,844	162,301,706	40,001,557	9,872,296	141,280,561	730,323,947	308,090,563	78,668,140	139,092,882

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembiayaan Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
31 Desember 2024																
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	6,938,020	-	-	-	-	-	15,518,855	3,296,276	131,800	75,410	149,591,847	24,402,433	10,160,762	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	5,520,474	-	-	-	-	-	1,070,985	371,901	6,251	2,096	18,034,641	13,076,303	243,212	-
3	Industri Pengolahan	-	8,602,007	-	-	-	-	-	9,585,766	4,675,332	1,548,850	20,573	66,901,890	25,671,951	5,105,662	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	27,242,022	-	-	-	-	-	445,013	109,662	993	1,009	7,850,733	7,259,153	227,020	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	311,209	101,102	-	1,402	428,486	56,555	84,669	-
6	Konstruksi	-	15,012,225	-	-	-	-	-	5,924,401	1,242,356	4,238,023	1,074	1,391,207	6,991,554	3,775,847	316,337
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	19,436,659	-	-	-	-	-	81,354,193	23,747,166	85,620	185,505	204,368,896	25,397,105	32,651,858	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	7,908,364	-	-	-	-	-	1,971,855	434,411	840	10,882	5,187,430	9,014,293	1,167,949	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	67,969	-	-	-	-	-	3,400,487	1,443,773	373	21,828	12,283,668	1,499,019	2,104,091	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	1,485,373	-	-	-	-	-	587,352	146,323	873	374	286,576	688,289	66,665	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	216,104	9,701,795	-	80,762,110	-	4,411,210	8,234,670	143,129	127,478	353,823	170	1,446,795	12,796,753	41,716	231,282
12	Real Estat	-	60,135	-	-	-	-	-	898,656	588,753	48,526	10,439	2,181,910	375,715	411,512	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	331,563	66,294	993	241	477,361	144,818	77,680	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	1,701,564	435,816	21,166	6,948	2,615,453	1,744,059	568,198	-
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	365,573,146	-	-	-	-	-	-	644	3,528	2,006	98	348,734	201,713	404	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	198,983	186,034	-	791	363,118	254,050	66,426	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	924,113	667,328	4,608	5,647	1,060,726	1,358,661	203,382	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	183,341	41,332	-	772	342,842	622,092	262,220	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	4,264,057	-	-	-	-	-	5,492,863	1,465,184	830,666	4,533,912	46,065,307	30,370,346	9,650,425	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	217,387	43,235	-	941	304,782	77,791	115,682	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	9,767,666	496,857	-	133,517,376	75,472,409	30,044,534	6,799,090	3,570
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	136,104	2,300	-	1,668	959,052	7,542	76,332	-
24	Lainnya	5,323,712	2,524,340	-	663,288	-	465,111	23,308	506,496	186,260	331,234	485,447	93,500,776	53,411,290	1,544,053	121,904,321
	Total	371,112,962	108,763,441	-	81,425,398	-	4,876,321	8,257,979	140,672,625	39,878,701	7,606,645	138,884,603	691,464,805	245,466,023	75,404,855	122,455,510

1) Bank secara Individu

[illegible]

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

[illegible]

632,763

[illegible]

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31 Desember 2025							
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	234,932,975	-	19,480,672	4,458,042	2,151,933	5,983,827	7,294,941
2	Pertambangan dan Penggalian	48,393,005	-	2,924,389	269,895	721,321	1,696,815	143,821
3	Industri Pengolahan	147,642,097	-	10,353,299	1,506,383	3,132,035	1,741,016	5,777,706
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	61,675,045	-	490,474	387,661	133,562	17,961	52,906
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	999,217	-	153,399	18,520	20,030	25,742	-
6	Konstruksi	84,609,181	-	3,855,187	224,427	1,202,007	836,130	571,716
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	379,851,963	-	51,830,592	6,408,790	6,127,784	11,625,603	19,328,121
8	Pengangkutan dan Pergudangan	32,307,874	-	1,772,015	366,826	203,892	438,787	623,061
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	21,098,439	-	3,165,265	447,886	464,667	619,891	1,174,815
10	Informasi dan Komunikasi	1,682,781	-	281,302	20,749	21,691	104,818	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	155,741,147	-	88,950	91,588	8,980	18,790	35,953
12	Real Estat	6,915,959	-	585,286	128,818	79,549	101,825	421,466
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,019,324	-	110,945	11,548	14,611	18,715	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	8,582,181	-	965,880	124,804	100,502	253,402	-
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	296,554,169	-	790	71,882	214	-	98
16	Pendidikan	1,300,958	-	104,914	22,639	11,538	15,536	18,911
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	6,729,779	-	403,717	89,543	53,666	59,589	84,669
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	2,324,311	-	1,014,509	10,631	14,683	847,797	2,274,797
19	Aktivitas Jasa Lainnya	134,569,508	-	21,899,610	1,402,647	8,509,704	3,331,818	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	743,656	-	152,029	10,702	18,429	20,412	45,284
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	78	-	-	2	-	-	-
22	Rumah Tangga	291,345,377	-	12,423,269	2,135,322	1,140,769	3,657,169	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,151	-	-	18	-	-	2,377,750
24	Lainnya	184,797,045	-	1,479,889	518,358	705,004	3,157	568,575
	Total	2,103,819,218	-	133,536,381	18,727,681	24,836,573	31,418,800	40,794,588

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31 Desember 2024							
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	207,779,817	-	17,945,196	3,875,379	3,048,872	4,475,870	6,054,294
2	Pertambangan dan Penggalian	46,025,862	-	2,631,091	315,323	702,414	1,656,021	105,832
3	Industri Pengolahan	140,234,498	-	14,076,815	1,530,057	3,948,782	4,966,379	2,986,485
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	48,597,028	-	281,591	267,347	40,101	14,049	19,798
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1,033,852	-	124,090	21,679	18,731	19,163	31,010
6	Konstruksi	45,337,599	-	6,430,598	455,741	2,257,712	526,529	543,898
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	380,425,787	-	50,033,159	6,838,042	7,330,396	9,613,215	19,213,955
8	Pengangkutan dan Pergudangan	25,927,500	-	1,871,642	300,036	396,859	291,988	459,535
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	22,305,625	-	3,432,627	518,669	791,707	525,482	1,161,622
10	Informasi dan Komunikasi	3,335,700	-	96,159	29,354	11,247	16,735	79,226
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	113,102,360	-	51,633	77,488	6,430	10,849	17,646
12	Real Estat	4,706,230	-	600,238	96,353	102,866	84,803	144,071
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	751,311	-	111,045	10,529	13,317	19,709	27,316
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	7,370,697	-	766,281	121,773	113,805	102,552	214,701
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	365,794,642	-	885	39,312	58	-	-
16	Pendidikan	980,023	-	91,433	21,398	13,874	11,579	16,163
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3,915,979	-	298,424	70,430	43,398	52,319	67,538
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	2,595,575	-	1,191,360	20,925	902,580	29,316	40,884
19	Aktivitas Jasa Lainnya	114,733,774	-	19,007,170	1,284,868	8,234,935	1,275,235	2,652,905
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	840,855	-	167,223	13,038	24,622	26,278	46,870
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	166	-	-	3	-	-	1
22	Rumah Tangga	271,557,801	-	10,581,534	1,804,885	1,054,595	2,717,920	1,482,390
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2,404	-	58	11	-	35	15
24	Lainnya	181,157,607	-	49,552	868,078	7,766	6,043	6,580,704
	Total	1,988,512,692	-	129,839,804	18,580,719	29,065,068	26,442,069	41,946,858

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31 Desember 2025							
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	253,207,430	440,534	20,369,344	4,604,557	2,570,347	7,117,464	7,379,438
2	Pertambangan dan Penggalian	48,874,986	1,548	2,951,349	322,841	737,031	1,700,794	135,164
3	Industri Pengolahan	151,215,683	38,618	10,459,855	1,526,733	3,219,702	1,804,736	5,488,250
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	62,154,918	-	499,338	387,952	136,511	23,604	50,279
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1,007,490	-	155,012	18,521	20,448	26,033	-
6	Konstruksi	86,839,765	471,407	4,002,339	230,244	1,434,554	949,616	543,759
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	416,088,739	79,885	52,334,835	6,776,938	7,014,625	13,395,508	21,210,535
8	Pengangkutan dan Pergudangan	33,021,714	35,127	1,811,648	368,521	212,235	466,562	610,129
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	21,392,031	6,464	3,193,965	450,315	475,834	625,964	1,101,194
10	Informasi dan Komunikasi	1,744,155	592	283,397	21,774	22,568	105,259	529
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	161,085,317	11,073	108,597	95,919	17,404	47,861	42,781
12	Real Estat	7,074,957	12,141	593,001	129,621	82,050	105,355	395,475
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,441,195	8,454	117,611	13,375	16,094	23,052	869
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	9,114,860	12,459	976,200	131,455	105,588	263,359	24,057
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	296,747,041	7,403	3,333	73,017	1,627	2,483	18,419
16	Pendidikan	1,370,186	830	106,334	23,005	11,908	16,260	18,134
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	6,903,613	2,636	411,486	90,107	55,666	63,427	79,556
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	2,359,021	-	1,023,011	11,081	16,137	850,047	2,134,600
19	Aktivitas Jasa Lainnya	137,310,085	8,177	22,080,595	1,430,460	8,715,050	3,377,680	50,524
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	754,000	1,899	153,341	10,835	18,960	20,524	42,540
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	79	-	-	2	-	-	-
22	Rumah Tangga	294,726,711	58,588	12,584,159	2,149,255	1,173,919	3,711,315	127,850
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	265,138	8,083	9,495	2,992	1,438	7,456	2,225,702
24	Lainnya	350,405,716	10,857,674	2,765,762	703,228	913,193	160,182	737,004
	Total	2,345,104,829	12,063,592	136,994,008	19,572,748	26,972,890	34,864,542	42,416,786

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami		CKPN Stage 1	CKPN Stage 2	CKPN Stage 3	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31 Desember 2024							
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	224,206,139	1,186,541	18,164,849	4,007,335	3,896,656	5,011,196	6,280,703
2	Pertambangan dan Penggalian	46,456,825	2,437	2,664,961	365,067	711,965	1,660,660	107,931
3	Industri Pengolahan	143,872,982	50,966	14,278,670	1,561,915	4,033,099	5,031,161	3,099,844
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	49,099,982	-	284,686	271,504	42,459	20,595	20,191
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1,041,383	587	125,572	21,901	19,175	19,215	31,686
6	Konstruksi	47,384,883	507,879	6,605,216	468,433	2,498,765	563,910	568,291
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	419,460,033	129,458	50,667,978	7,207,325	7,984,910	12,211,601	19,728,262
8	Pengangkutan dan Pergudangan	26,689,590	29,412	1,907,695	306,265	405,005	311,856	479,186
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	22,653,600	14,137	3,473,144	526,148	803,547	535,953	1,186,108
10	Informasi dan Komunikasi	3,406,795	1,933	97,521	30,405	11,635	17,796	80,798
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	115,250,511	14,247	56,097	79,816	7,971	14,385	25,224
12	Real Estat	4,873,927	8,005	608,171	98,275	104,788	87,027	148,681
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,182,937	11,646	114,268	11,618	14,413	22,529	30,570
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	8,077,417	29,547	785,948	132,230	119,955	143,190	243,410
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	369,068,495	9,977	4,662	40,980	1,106	5,094	3,598
16	Pendidikan	1,092,042	568	92,882	21,962	14,263	12,227	16,549
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	4,164,678	7,041	308,417	72,004	44,690	58,916	68,885
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	2,631,287	3,756	1,204,441	21,589	915,663	34,042	41,695
19	Aktivitas Jasa Lainnya	116,682,468	11,899	19,156,507	1,314,254	8,303,937	1,329,286	2,705,538
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	851,147	1,556	169,209	13,450	25,034	26,493	47,800
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	168	-	-	3	-	-	1
22	Rumah Tangga	273,672,971	91,472	10,743,489	1,832,947	1,078,480	2,757,680	1,553,728
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1,198,700	7,576	6,762	2,077	932	5,098	35,253
24	Lainnya	297,980,297	9,465,308	1,301,061	4,290,133	132,643	255,578	6,858,068
	Total	2,180,999,258	11,585,950	132,822,205	22,697,635	31,171,092	30,135,487	43,362,000

Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2025				31 Desember 2024			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan				Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total	> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4,955,220	8,544,189	116,663,063	130,162,472	4,233,911	7,145,451	114,107,914	125,487,276
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	4,955,220	8,544,189	116,663,063	130,162,472	4,233,911	7,145,451	114,107,914	125,487,276

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2025				31 Desember 2024			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan				Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total	> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	5,237,556	8,925,465	119,455,848	133,618,869	4,499,633	7,499,040	116,470,660	128,469,333
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	5,237,556	8,925,465	119,455,848	133,618,869	4,499,633	7,499,040	116,470,660	128,469,333

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET BERMASALAH (CRB-A)

Kualitas Aset:

- a) Aset bermasalah atau non-performing adalah aset yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Untuk kredit dengan eksposur diatas nilai tertentu, penilaian kolektibilitas dilakukan secara individu berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu ketepatan dalam membayar, prospek usaha debitur, dan kondisi keuangan debitur.
- b) Kredit dan Surat Berharga yang telah jatuh tempo merupakan tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan atau pembayaran bunga atau debitur yang wanprestasi. Tagihan tersebut termasuk aset yang mengalami penurunan nilai dan telah dibentuk cadangan penurunan nilai (CKPN).
- c) Aset Performing merupakan aset yang memiliki kualitas lancar dan dalam perhatian khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
- d) Aset Restrukturisasi adalah aset dalam upaya perbaikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Aset dapat direstrukturisasi apabila debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi. Suatu asset restrukturisasi dapat keluar dari kategori tersebut, apabila dalam jangka waktu restrukturisasi, kondisi usaha debitur telah kembali normal sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai kondisi normal.

Segmentasi kredit:

Pengkategorian segmen kredit berdasarkan jenis kredit dan besaran fasilitas kreditnya.

Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing*

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		<i>Performing</i> (Kualitas L dan DPK)		<i>Non Performing</i>					
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
						Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h
1	Surat Berharga	320,880,955	89,420	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	1,298,527,440	41,657,261	44,146,271	31,246,461	-	-	-	-
	a. Korporasi	404,539,729	15,206,175	8,616,022	8,149,877	-	-	-	-
	b. Ritel	441,722,376	10,237,722	17,023,893	11,110,423	-	-	-	-
	c. Mikro	452,265,335	16,213,364	18,506,356	11,986,160	-	-	-	-
3	Transaksi Rekening Administratif	211,361,870	663,045	3,373,909	1,282,207	-	-	-	-

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

		<i>Performing</i> (Kualitas L dan DPK)		<i>Non Performing</i>					
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
						Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h
1	Surat Berharga	372,732,801	89,519	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	1,411,580,656	43,832,122	49,148,761	35,496,497	-	-	-	-
	a. Korporasi	409,843,565	15,635,313	9,312,988	8,839,881	-	-	-	-
	b. Ritel	442,875,691	10,279,413	17,341,855	11,356,731	-	-	-	-
	c. Mikro	558,861,400	17,917,396	22,493,918	15,299,885	-	-	-	-
3	Transaksi Rekening Administratif	211,451,390	663,097	3,400,062	1,283,038	-	-	-	-

Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non-Performing*

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		<i>Performing</i> (Kualitas L dan DPK)		<i>Non Performing</i> (Kualitas KL, D, M)		<i>Stage 1</i>		<i>Stage 2</i>		<i>Stage 3</i>	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	65,724,482	19,106,215	16,282,881	11,951,033	-	-	65,632,382	19,052,383	16,374,981	12,004,865
	a. Korporasi	18,412,007	12,461,711	5,245,667	4,920,698	-	-	18,412,007	12,461,711	5,245,667	4,920,698
	b. Ritel	26,759,559	3,382,592	5,543,764	3,480,711	-	-	26,676,663	3,334,422	5,626,660	3,528,882
	c. Mikro	20,552,917	3,261,912	5,493,450	3,549,624	-	-	20,543,712	3,256,250	5,502,655	3,555,286
3	Transaksi Rekening Administratif	443,039	63,409	51,705	-	-	-	440,556	63,409	54,188	-

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

		<i>Performing</i> (Kualitas L dan DPK)		<i>Non Performing</i> (Kualitas KL, D, M)		<i>Stage 1</i>		<i>Stage 2</i>		<i>Stage 3</i>	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit	69,633,597	21,764,670	17,510,490	13,123,750	41,728	629	67,865,849	20,264,883	19,236,510	14,622,907
	a. Korporasi	18,711,548	12,467,990	5,258,221	4,952,422	-	-	18,711,548	12,486,991	5,258,221	4,933,420
	b. Ritel	27,756,484	3,768,351	6,522,131	4,391,740	41,728	629	27,631,861	3,719,551	6,605,027	4,439,910
	c. Mikro	23,165,564	5,528,329	5,730,138	3,779,589	-	-	21,522,440	4,058,341	7,373,262	5,249,577
3	Transaksi Rekening Administratif	446,971	63,458	51,705	-	-	-	444,488	63,458	54,188	-

PENGUNGKAPAN KUALITATIF TERKAIT TEKNIK MRK (CRC)

Dalam menghitung ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar, Bank mempertimbangan penggunaan Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) sesuai dengan ketentuan OJK. Teknik MRK yang digunakan Bank adalah teknik MRK-Agunan dan teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit. Teknik MRK-Agunan yang digunakan adalah agunan berupa uang tunai (cash collateral) yang disimpan pada Bank dan emas yang disimpan pada Entitas Anak. Sedangkan teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit digunakan untuk kredit yang dijamin oleh asuransi kredit dari Perusahaan Asuransi berstatus BUMN. Kredit yang dijamin oleh perusahaan asuransi yang merupakan Anak Perusahaan Bank tidak diperhitungkan sebagai penjamin dalam teknik MRK karena merupakan pihak yang terafiliasi dengan Bank.

Kriteria agunan yang dapat diterima antara lain:

1. Agunan diikat dengan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan serta barang jaminan berupa emas (entitas anak).
2. Penetapan nilai agunan harus didasarkan pada pertimbangan atas penilaian, pengikatan, penguasaan, pengamanan dan pemanfaatan.
3. Penilaian agunan harus dilakukan secara objektif, jujur, bertanggung jawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar.
4. Review agunan dilakukan untuk melihat kecukupan agunan dibandingkan dengan total kewajiban debitur, antara lain meliputi:
 - a. Kondisi agunan pada saat review
 - b. Nilai agunan
 - c. Pengamanan agunan (penyimpanan, pengikatan dan berlakunya agunan)
 - d. Informasi lain yang relevan dengan penilaian kecukupan agunan
5. Periode review agunan dilakukan sebagaimana dicantumkan dalam syarat dan ketentuan kredit, namun wajib dilakukan minimal sekali setahun bersamaan dengan review kredit sebagaimana diatur dalam masing-masing bidang bisnis. Periode review agunan dapat ditetapkan berbeda apabila diatur secara khusus oleh regulator (BI, OJK atau instansi terkait lainnya). Untuk kepentingan perhitungan ATMR, khusus kredit konsumtif beragun rumah tinggal maka wajib dilakukan valuasi agunan secara berkala minimal 30 (tiga puluh) bulan.

Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK (CR3)

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	1,043,693,760	226,076,231	20,700,877	205,375,354	
2	Surat Berharga	320,791,535	-	-	-	
3	Total	1,364,485,296	226,076,231	20,700,877	205,375,354	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	74,640,376	548,932	249,591	299,341	

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	1,056,788,606	324,612,192	110,395,892	214,216,299	
2	Surat Berharga	372,643,283	-	-	-	
3	Total	1,429,431,889	324,612,192	110,395,892	214,216,299	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	76,625,591	549,663	250,322	299,341	

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik MRK (CR4)

1) Bank secara Individu

Kategori Portofolio		(dalam jutaan rupiah)					
		Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah Penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
1	Tagihan kepada Pemerintah	296,401,489	-	296,401,489	-	-	0.00%
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	145,936,006	35,215,050	145,288,414	18,556,954	82,470,516	50.33%
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0.00%
4	Tagihan kepada Bank	94,915,562	707,153	94,915,562	707,153	49,613,182	51.88%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾	3,671,242	457,315	3,671,242	457,315	5,174,273	125.33%
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	0.00%
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum ²⁾	213,820,978	89,754,967	198,453,876	63,942,115	256,559,020	97.78%
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain ³⁾	-	-	-	-	-	0.00%
	Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾	23,207,302	905,546	21,675,367	362,218	23,134,148	104.98%
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	7,606,390	-	7,606,390	-	18,985,975	249.61%
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	522,696,499	66,480,674	371,365,692	29,529,671	321,089,432	80.09%
9	Kredit Beragun Properti	195,735,870	15,723,347	181,777,895	6,289,339	98,832,216	52.55%
	Kredit Beragun Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	157,599,923	11,195,684	145,371,957	4,478,274	69,353,111	46.28%
	Kredit Beragun Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0.00%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	38,135,947	4,527,663	36,405,938	1,811,065	29,479,105	77.14%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0.00%
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	8,725,499	2,117,063	7,048,813	846,825	11,379,248	144.12%
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	75,189,308	2,091,702	74,700,244	1,492,798	82,428,645	108.18%
11	Aset Lainnya	104,924,987	-	104,924,987	-	72,975,370	69.55%
12	Total	1,692,831,132	213,452,817	1,507,829,972	122,184,388	1,022,642,025	62.74%

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Kategori Portofolio		(dalam jutaan rupiah)					
		Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah Penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
		Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
		a	b	c	d	e	f
1	Tagihan kepada Pemerintah	302,047,966	-	302,047,966	-	0	0.00%
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	146,073,121	35,215,050	145,425,529	18,556,954	82,497,939	50.31%
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	0	0.00%
4	Tagihan kepada Bank	101,080,637	707,153	100,508,096	707,153	50,898,078	50.29%
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain ¹⁾	4,443,475	457,315	4,443,475	457,315	5,328,719	108.73%
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	0	0.00%
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum ²⁾	220,565,099	90,332,870	203,524,402	63,955,945	261,543,830	97.78%
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain ³⁾	-	-	-	-	-	0.00%
	Eksposur Pembiayaan Khusus ⁴⁾	23,207,302	362,218	21,675,367	362,218	23,134,148	104.98%
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	8,930,844	-	8,930,844	-	22,266,255	249.32%
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	700,772,392	66,535,385	411,280,817	29,551,555	356,985,857	80.98%
9	Kredit Beragun Properti	196,008,227	15,737,584	182,049,697	6,295,034	99,051,008	52.59%
	Kredit Beragun Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	157,818,425	11,208,198	145,589,904	4,483,279	69,526,726	46.33%
	Kredit Beragun Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0.00%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	38,189,802	4,529,386	36,459,793	1,811,755	29,524,282	77.14%
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0.00%
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	9,020,700	2,128,991	7,338,829	851,596	11,821,428	144.33%
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	77,175,254	2,091,922	76,685,459	1,492,886	83,676,186	107.03%
11	Aset Lainnya	139,092,882	-	139,092,882	-	106,676,786	76.69%
12	Total	1,928,417,901	213,568,488	1,603,003,363	122,230,656	1,103,880,235	63.98%

PENGUNGKAPAN INFORMASI KUALITATIF TERKAIT RISIKO KREDIT SECARA UMUM (CRA)

A. Model Bisnis yang tercermin dalam Komponen Profil Risiko Kredit Bank

Model bisnis untuk BRI secara individu tercermin dalam parameter/indikator yang digunakan dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit serta yang digunakan dalam penentuan besaran pencadangan risiko kredit, yang meliputi :

1. Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi

Komposisi kredit yang diberikan terhadap total asset dijaga pada kisaran 70%, dengan maksimum portofolio kredit pada satu segmen pada kisaran 40%. Komposisi kredit kepada 25 debitur (group) terbesar bukan bank diluar pihak terkait terhadap total kredit dijaga pada kisaran 20%. Bank juga menetapkan limit konsentrasi kredit per sektor industri, dan dalam profil risiko kredit tercermin pada jumlah pelampauan konsentrasi kredit pada sektor industri tertentu dijaga dengan jumlah pelampauan maksimal sebesar 3 (tiga) sektor industri.

2. Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan

Kualitas penyediaan dana tercermin pada indikator besarnya kredit kualitas rendah (LaR/Loan at Risk) terhadap total kredit dijaga pada kisaran 10%, Loan at Risk ini juga dipantau per segmen bisnis. Besarnya kredit bermasalah terhadap total kredit (NPL) dijaga pada kisaran 3%, besarnya NPL ini juga dipantau per segmen bisnis. Kecukupan pencadangan tercermin pada LaR coverage, NPL coverage serta besarnya CKPN atas kredit terhadap total kredit. Besarnya LaR coverage dijaga minimum pada kisaran 50% - 55%, sedangkan NPL coverage dijaga minimum pada kisaran 160% - 200%.

3. Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana

Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana yaitu tercermin pada target pertumbuhan kredit tahunan serta target LDR atau Loan to Deposit Ratio. Penetapan target pertumbuhan kredit dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta kondisi likuiditas industri perbankan.

4. Faktor eksternal

Beberapa faktor eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan maupun kualitas kredit antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, exchange rate dan unemployment rate.

Model bisnis untuk BRI secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak tercermin dalam parameter/indikator yang digunakan dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit mencakup:

1. Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi

Dalam mengukur risiko tingkat konsentrasi, Perusahaan Anak menggunakan parameter antara lain sebagai berikut : Komposisi kredit, pembiayaan dan investasi yang diberikan terhadap total asset; Komposisi kredit, pembiayaan dan investasi kepada debitur besar bukan bank diluar pihak terkait; serta Konsentrasi kredit per-sektor industri.

2. Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan

Kualitas penyediaan dana tercermin pada indikator antara lain: Rasio kredit, pembiayaan dan investasi kualitas rendah (LaR/Loan at Risk) terhadap total kredit, pembiayaan dan investasi; Rasio kredit, pembiayaan dan investasi

bermasalah terhadap total kredit, pembiayaan dan investasi (NPL); serta Kecukupan pencadangan tercermin pada LaR coverage, NPL coverage serta besarnya CKPN atas kredit terhadap total kredit.

3. Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana

Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana yaitu tercermin pada target pertumbuhan kredit tahunan serta target LDR atau Loan to Deposit Ratio. Penetapan target pertumbuhan kredit dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta kondisi likuiditas industri perbankan.

4. Faktor eksternal

Beberapa faktor eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan maupun kualitas kredit antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, exchange rate, harga emas dan unemployment rate.

B. Kriteria dan Pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit

1. Kriteria dan pendekatan yang digunakan oleh BRI secara individu untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit adalah sebagai berikut:

Penyusunan Kebijakan dan Prosedur harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan.
- b. Hierarki dan kewenangan
- c. Lingkup pengaturan yang jelas
- d. Direktif, aplikatif dan mengandung unsur pengendalian.
- e. Berorientasi pada efektivitas dan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam menyalurkan kredit, BRI menerapkan prinsip kehati-hatian yang dituangkan ke dalam kebijakan dan prosedur yaitu Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) SK Nomor.KU.01-DIR/KRD/11/2022 dan Pedoman Pelaksanaan Kredit di setiap segmen yaitu SE.02-DIR/KRD/01/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, SE.04-DIR/KRD/01/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis SME, SE.04-DIR/KRD/01/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis SME, dan SE.06-DIR/KRD/07/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Korporasi; dimana pokok-pokok pengaturan mengenai tata kelola risiko kredit meliputi prinsip utama:

- a. Pemisahan fungsi dalam pemberian kredit yang terdiri atas jajaran Relationship management (RM) dan Credit risk management (CRM)
- b. Penerapan Four Eyes Principle dalam melaksanakan kewenangan memutus kredit minimal 2 (dua) pejabat kredit lini
- c. Penerapan Internal Risk Rating System, standar penilaian risiko baik credit risk scoring maupun rating.
- d. Pemisahan pengelolaan kredit bermasalah
- e. Penerapan prinsip pembiayaan yang sehat berpedoman pada Loan Portfolio Guidelines (LPG) yang terdiri atas Sector Classification (SC), Sector Acceptance Criteria (SAC) dan Sector Limit.

Penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang terdiri atas Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) dan ketentuan turunannya, harus sesuai dengan organisasi, sehingga penerapannya:

- a. Wajib digunakan, diterapkan dan dilaksanakan serta dipatuhi oleh seluruh pekerja yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara konsekuen dan konsisten.
- b. Berlaku juga bagi unit kerja luar negeri, namun dalam pelaksanaannya dapat

disesuaikan dengan peraturan perbankan setempat.

- c. Untuk dapat mendukung penerapan dan pelaksanaan KPB, selain memahami dan mematuhi KPB dengan sebaik-baiknya, setiap pejabat kredit juga wajib:
 - 1) Memahami dan mematuhi pedoman pelaksanaan masing-masing bidang bisnis serta peraturan perkreditan lain dibidangnya, termasuk perubahannya.
 - 2) Memahami dan mematuhi peraturan-peraturan maupun kebijakan dari regulator, mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan serta semua masalah yang berkaitan dengan perkreditan, baik yang bersifat local, regional, nasional maupun yang berlingkup internasional.

Penetapan Limit Risiko Kredit dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Limit Risiko Kredit ditetapkan untuk suatu segmen bisnis, sektor industri, nasabah (debitur) atau counterparty, pihak terkait, sektor ekonomi atau bentuk-bentuk penggolongan lainnya.
 - b. Limit Risiko Kredit ditetapkan pada level portofolio atau level secara keseluruhan atas seluruh produk dan aktivitas yang memiliki eksposur berisiko kredit meliputi: portofolio kredit, transaksi surat berharga, transaksi trade finance, dan produk-produk dan aktivitas-aktivitas lain yang mengandung Risiko Kredit.
 - c. Limit Risiko Kredit ditetapkan setiap tahun sesuai risk appetite dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Penetapan limit dilakukan dengan menggunakan data historis dan memperhitungkan data rata-rata dan standar deviasi selama periode pengambilan data.
 - e. Adapun untuk parameter yang belum tersedia data historis sebagai penunjang, maka dapat ditetapkan secara expert judgment dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), data eksternal, keahlian, pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh pemutus dan ketentuan regulasi yang berlaku.
 - f. Dalam penetapan limit risiko selain mempertimbangkan hal-hal tersebut, juga dapat mempertimbangkan faktor forward looking seperti variabel makroekonomi, risk issue, dan faktor-faktor lainnya.
 - g. Group dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang membidangi bersama dengan Unit Kerja Operasional merumuskan dan mengusulkan obyek dan dimensi Limit Risiko Kredit kepada Direksi atau RMC untuk diputus dan ditetapkan.
2. Kriteria dan Pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit
- Pengelolaan kebijakan dan prosedur harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Prinsip keselarasan
 - b. Prinsip kesesuaian kewenangan
 - c. Prinsip efektivitas dan efisiensi
 - d. Prinsip keberlanjutan
 - e. Prinsip penatakerjaan dan aksesibilitas yang baik

Pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit adalah sebagai berikut:

- a. Business process approach dengan menyusun kebijakan dan prosedur didalam setiap bisnis proses pembiayaan.
- b. Risk scoring approach dengan menyusun perangkat analisis berdasarkan statistical method untuk menilai profil risiko calon debitur secara individual didalam memprediksi probability of default (PD).
- c. Proses pengukuran dan perhitungan risiko pembiayaan secara corporate

dilakukan dalam bentuk pengukuran profil risiko dan penetapan serta pemantauan Risk Appetite

Penetapan limit risiko kredit dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Limit risiko kredit ditetapkan untuk suatu segmen bisnis, sektor industri, nasabah atau counterparty, pihak terkait, sektor ekonomi atau bentuk-bentuk penggolongan lainnya.
- b. Limit risiko kredit ditetapkan sesuai risk appetite, portfolio, RKAP dan ketentuan regulator maupun internal yang berlaku.
- c. Penetapan limit dilakukan dengan menggunakan data historis dan memperhitungkan data rata-rata dan standar deviasi selama periode pengambilan data. Apabila belum tersedia data historis sebagai penunjang, dapat ditetapkan secara expert judgment dengan mempertimbangkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), data eksternal, keahlian, pengetahuan, pengalaman yang dimiliki dan ketentuan regulasi yang berlaku.
- d. Dalam penetapan limit risiko selain mempertimbangkan hal-hal tersebut, dapat mempertimbangkan faktor forward looking seperti variabel makro ekonomi, risk issue dan faktor-faktor lainnya. Direksi menyetujui dan menandatangani penetapan limit risiko dalam dokumen pernyataan limit risiko (Risk Appetite Statement/RAS) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
- e. Dalam menerapkan prinsip pembiayaan yang sehat, limit konsentrasi pembiayaan dikelola dengan menyusun Financing Portfolio Guidelines (LPG, limitasi pembiayaan heavy equipment mining, pengaturan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) dan penetapan Putusan Delegasi Wewenang Pembiayaan (PDWP).
- f. Limit risiko kredit ditetapkan antara lain meliputi limit untuk kewenangan pengambilan keputusan pembiayaan yang disesuaikan dengan kompetensi pengambilan keputusan dan tingkat risikonya serta mempertimbangkan agar tidak ada conflict of interest dalam proses pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, penetapan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP) termasuk batas wewenang penanganan pembiayaan bermasalah serta pendelegasian wewenang memutus pembiayaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perusahaan.

3. Kriteria dan Pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan Efek untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit. Kebijakan Manajemen Risiko mengatur prinsip-prinsip manajemen risiko, antara lain berisi:
 - a. Kebijakan pengelolaan risiko.
 - b. Tata kelola Manajemen Risiko.
 - c. Framework Manajemen Risiko.
 - d. Penerapan / Proses Manajemen Risiko.
 - e. Kriteria Risiko.
 - f. Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - g. Kebijakan Kewenangan Pemberian Persetujuan.
 - h. Kebijakan Transaksi Perdagangan Efek.
 - i. Kebijakan Marjin.
 - j. Kebijakan Tradable shares.
 - k. Kebijakan Short Term Warehouse.
 - l. Kebijakan Non-Performing Asset.

- m. SOP Transaksi Marjin (pembukaan rekening marjin sampai penutupan rekening marjin serta perpanjangan marjin).
- n. SOP Transaksi perdagangan efek.

Pelaksanaan penerapan manajemen risiko kredit tercermin dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat due diligence dan analisa risiko atas transaksi maupun produk sebelum dijalankan oleh Group Bisnis. Due Diligence dan analisa risiko tersebut dilakukan oleh Jajaran Bisnis dan Jajaran Analisa Risiko yang dituangkan dalam bentuk Memorandum Evaluasi Risiko (MER) yang menjadi dasar atas pengambilan keputusan yang signifikan oleh Direksi maupun Komisaris.
 - b. Pemberian limit kredit (marjin ataupun pembiayaan lainnya) kepada nasabah brokerage sesuai dengan latar belakang, profil keuangan nasabah dan riwayat transaksi. Persetujuan pemberian limit ini berdasarkan matriks kewenangan pemberian persetujuan sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance yang telah ditentukan.
 - c. Pembatasan saham-saham yang dapat dijamin dan ditransaksikan oleh nasabah brokerage. Pembatasan ini meliputi:
 - 1) Nilai saham yang diakui sebagai nilai portofolio nasabah dengan penentuan haircut saham berdasarkan aturan regulator dan penilaian ulang oleh Risk Management.
 - 2) Jenis-jenis saham marjin yang boleh ditransaksikan berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bursa Indonesia setiap bulannya dan valuasi ulang oleh Risk Management sesuai Risk Appetite Perusahaan.
 - 3) Investment Universe (Bond Universe dan Equity Universe) ialah daftar efek yang telah memperoleh persetujuan Komite Pengelolaan Risiko (KPR) yang dapat menjadi underlying asset oleh Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio. Bank Universe ialah daftar Bank Counterparty yang telah memperoleh persetujuan Komite Pengelolaan Risiko (KPR) yang dapat digunakan untuk penempatan time deposit. Limit penempatan time deposit pada Bank Counterparty ditetapkan oleh Komite Pengelolaan Risiko (KPR) dan direview setiap 2 (dua) kali dalam setahun.
4. Kriteria dan Pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan Asuransi untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit. Kebijakan Manajemen Risiko mengatur prinsip-prinsip manajemen risiko, antara lain berisi kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, kepatuhan terhadap hierarki dan kewenangan, lingkup pengaturan yang jelas, direktif serta berorientasi pada efektifitas dan bisnis yang berkelanjutan. Penetapan limit risiko kredit dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Limit risiko kredit ditetapkan untuk risiko yang berkaitan dengan reasuransi dan investasi.
 - b. Limit risiko kredit ditetapkan setiap tahun sesuai Risk Appetite dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Penetapan limit risiko menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode regulatory, historical, expert judgment dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dll.

C. Struktur dan Organisasi Manajemen Risiko Kredit serta Fungsi Kontrol

Untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan, maka disamping keterkaitan pejabat-pejabat bank dalam perkreditan seperti Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Perkreditan lainnya dan/atau satuan-satuan kerja, BRI serta Perusahaan Anak Bank dan Pegadaian juga memiliki Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK) yang merupakan perangkat perkreditan BRI.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat perkreditan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris sebagai perangkat perkreditan adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui RBB yang mencakup: rencana kredit tahunan, rencana pemberian kredit kepada pihak terkait, dan kredit kepada debitur-debitur besar tertentu yang disampaikan kepada OJK.
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit
- c. Menyetujui Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)
- d. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi atas:
 - 1) Perkembangan dan kualitas portfolio perkreditan secara keseluruhan
 - 2) Langkah-langkah perbaikan atas apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang ditetapkan.
 - 3) Penyimpangan dalam pelaksanaan KPB.

2. Direksi

Tugas dan tanggungjawab Direksi sebagai perangkat perkreditan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan bertanggungjawab atas:
 - 1) Penyusunan KPB.
 - 2) Penyusunan rencanan prekreditan yang tertuan di dalam RBB
 - 3) Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan oleh Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
 - 4) Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan audit intern
- b. Memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan sesuai konsekuen dan konsisten.
- c. Menetapkan anggota KKP dan Komite Kredit (KK)
- d. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris perihal perkembangan kualitas portolio secara keseluruhan dan Penyimpangan dalam pelaksanaan KPB.

3. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Tugas dan tanggungjawab KKP sebagai perangkat perkreditan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan KPB khususnya perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana diatur dalam PPKPB OJK.
- b. Mengawasi penerapan KPB dilaksanakan secara bertanggungjawab dan penuh kesinambungan.
- c. Melakukan review KPB secara berkala
- d. Melakukan evaluasi kebenaran atas pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau penyediaan dana, proses pemberian kredit atau penyediaan dana, pelaksanaan ketentuan BMPK, penyisihan pencadangan, penyelesaian kredit bermasalah dan ketaatan perundang-undangan lainnya.
- e. Melakukan kajian efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan.
- f. Melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris perihal Hasil pengawasan

atas penerapan KPB dan Laporan hasil evaluasi.

- g. Memantau perkembangan kualitas portfolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

4. Komite Kredit (KK)

Tugas dan tanggungjawab KK sebagai perangkat perkreditan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan kredit berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat serta seksama.
- b. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dalam permohonan kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
- c. Melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan kredit

5. Satuan Kerja Perkreditan dan Pejabat kredit

Satuan Kerja Perkreditan (SKP) adalah jajaran Relationship Management (RM) dan jajaran Credit Risk Management (CRM) yang berada di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit serta Unit Kerja BRI di luar negeri. Pejabat kredit terdiri dari pekerja kredit lini dan pekerja kredit support.

Untuk Perusahaan Pembiayaan, berdasarkan akuntabilitas perusahaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terdiri dari Group Manajemen Risiko yang terdiri atas Departemen Kebijakan dan Prosedur, Bagian Enterprise Risk Management, Bagian Manajemen Risiko Operasional, serta Modelling dan Manajemen Portfolio. SKMR bertanggung jawab atas tercapainya portfolio pembiayaan yang sehat, melakukan review kebijakan dan pedoman pembiayaan secara periodik, mendelegasikan wewenang memutus pembiayaan kepada pejabat jajaran Credit Risk Management sesuai dengan limit, mengesahkan Financing Portfolio Guidelines dan anggota Komite Pembiayaan.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan pembiayaan, struktur organisasi dan manajemen pembiayaan diatur untuk mendukung prinsip pembiayaan yang sehat dan penerapan manajemen risiko didalam proses bisnis pembiayaan melalui:

- a. Unit kerja terkait pembiayaan yang terdiri atas jajaran Relationship Management (RM) dan Credit Risk Management (CRM).
- b. Satuan Kerja Pembiayaan dan Pejabat Pembiayaan yang terdiri atas Pejabat Pembiayaan Lini dan Pejabat Pembiayaan Support.
- c. Komite Pembiayaan sebagai perangkat operasional yang bersifat kolegial dalam melakukan evaluasi dan putusan pembiayaan.
- d. Risk Scoring System dengan menerapkan credit risk scoring granular per kriteria debitur dan produk.
- e. Penguatan Collection dengan enhancement collection tools dan asset management.

Dengan mempertimbangkan perkembangan risiko kredit dan kompleksitas bisnis pada Perusahaan Pembiayaan dengan fokus pada pengelolaan risiko kredit, maka dilaksanakan dengan kelayakan calon nasabah ditentukan melalui credit scoring, menetapkan tingkat persetujuan dan batas wewenang memutus pembiayaan oleh Komite Pembiayaan yang tertuang pada Kebijakan Pembiayaan dan Operasional ULaMM/ULaMM Syariah dan Mekaar/Mekaar Syariah serta penetapan skema tingkat persetujuan dan batas wewenang memutus pembiayaan yang berjenjang.

Untuk Perusahaan Ventura, pembentukan Struktur Organisasi dengan mempertimbangkan kompleksitas proses bisnis dan operasional sehari-hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan Ventura membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada dibawah supervisi Direktur Portofolio & Keuangan. Unit Kerja yang bersentuhan dengan risiko investasi adalah seluruh Group yang berada di bawah Direktorat Investasi dan Kantor Cabang Pembiayaan Kupang yang berada di bawah supervisi Direktorat Portofolio & Keuangan. Untuk mewujudkan kegiatan usaha yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern, maka Perusahaan membentuk komite untuk kegiatan investasi (baik deploy/divestasi).

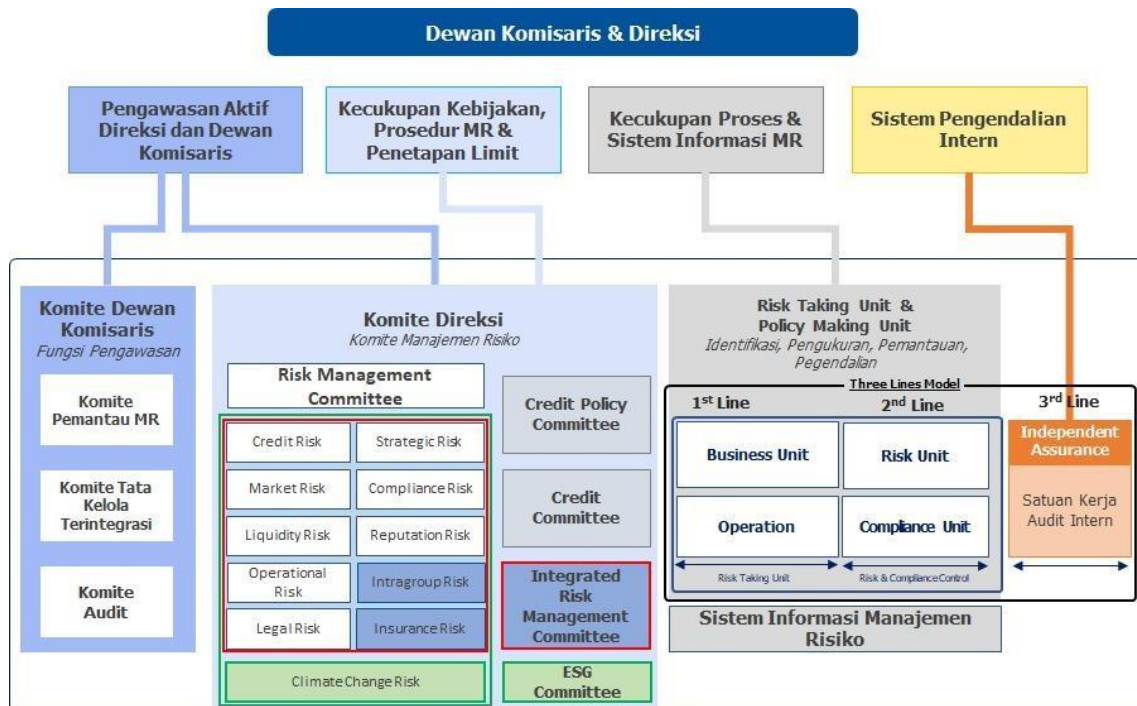
Untuk Perusahaan Efek, Group Manajemen Risiko merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang bersifat independen terhadap unit kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko. Dalam pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis serta mengkordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan risiko, maka dibentuk Komite-Komite Eksekutif terkait, yang antara lain mencakup:

- a. Komite Pengelolaan Risiko yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan penyusunan/penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, penetapan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan- keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), penetapan kebijakan dan prosedur, penetapan/persetujuan Investment Universe, dan persetujuan atas limit-limit transaksi.
- b. Komite Investasi yang bertugas untuk membahas, mengevaluasi, merekomendasi, dan menetapkan jangkauan investasi, batasan investasi, jenis investasi, dan strategi investasi yang harus dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi.
- c. Komite Produk yang bertugas untuk melakukan persetujuan pembentukan produk, evaluasi produk yang sudah berjalan, mengusulkan pengembangan/penggabungan produk, dan mengajukan konsep pemasaran produk kepada Direksi.

Untuk Perusahaan Asuransi, untuk mengontrol pertumbuhan risiko kredit dan penerapan unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan, maka disamping keterkaitan pejabat-pejabat dalam risiko kredit seperti Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat-pejabat lainnya dan/atau satuan-satuan kerja, maka Perusahaan Asuransi memiliki Komite Investasi.

Untuk Perusahaan Remittance, pengelolaan aktivitas perkreditan dilaksanakan melalui perangkat perkreditan yang terdiri dari Non-Executive Director, Executive Director, dan Internal Control and Compliance Groupon (ICC). Perangkat perkreditan tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan perkreditan, proses pemberian kredit, serta pengawasan atas kualitas portofolio kredit dilaksanakan secara prudent dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Hubungan antara fungsi Manajemen Risiko Kredit, Pengendalian Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal



Dalam implementasi Manajemen Risiko Kredit di BRI, Direktur Manajemen Risiko membawahi fungsi Manajemen Risiko Kredit sekaligus Unit Pengendali Risiko Kredit. Fungsi Manajemen Risiko Kredit merupakan bagian dari Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terdiri dari:

1. Credit & Product Risk Policy Group berperan dalam penyusunan kebijakan perkreditan, kebijakan portfolio kredit dan penyusunan model Internal Risk Rating.
2. Market, Portfolio & Enterprise Risk Group berperan dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko, penetapan limit risiko kredit, pengembangan Model CKPN, penyusunan kebijakan & perhitungan ATMR untuk risiko kredit, monitoring portfolio, serta Stress Test risiko kredit.

Unit Pengendali Risiko Kredit terbagi berdasarkan segmen bisnisnya yaitu:

1. Small Risk Group berperan mengendalikan risiko kredit pada segmen small dengan menetapkan appetite, pengelolaan risiko secara portofolio dan transactional basis.
2. Consumer Risk Group berperan mengendalikan risiko kredit pada segmen consumer dengan menetapkan appetite, pengelolaan risiko secara portofolio dan transactional basis.
3. Micro Risk Group berperan mengendalikan risiko kredit pada segmen micro dengan menetapkan appetite dan pengelolaan risiko secara portofolio.
4. Corporate Credit Risk Group berperan mengendalikan risiko kredit pada segmen korporasi secara transactional basis.
5. Commercial Credit Risk berperan dalam mengendalikan risiko kredit pada segmen commercial secara transactional basis.
6. Small Medium Enterprise (SME) Credit Risk Analysis - Regional Office berperan dalam mengendalikan risiko kredit pada segmen SME secara transactional basis.

Fungsi Kepatuhan dilaksanakan oleh Compliance Group dan Policy & Procedure Group yang memiliki peran dalam penyusunan kebijakan, penyusunan Standard Operating Procedure, serta melaksanakan Uji Kepatuhan untuk memastikan BRI telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku serta menjaga agar kegiatan usaha tidak menyimpang dari peraturan perundangan.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai Independent Assurance memiliki peran penting dalam menilai efektivitas implementasi manajemen risiko kredit, baik pada transactional basis maupun secara portfolio basis. Selain itu, SKAI juga masuk dalam keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan sehingga rekomendasi hasil audit merupakan bagian dari perbaikan kebijakan kredit.

Pada Perusahaan Anak, implementasi second line dan third line sesuai framework Three Lines model disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan kompleksitas operasional yang terlihat dari struktur organisasi masing-masing Perusahaan Anak. Untuk Perusahaan Anak Bank, Pegadaian dan Perusahaan Pembiayaan, fungsi manajemen risiko berperan dalam memantau dan mengendalikan risiko secara agregat serta menyusun kebijakan & metodologi risiko kredit. Pengendalian terhadap kredit bermasalah (Kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet) dilakukan oleh jajaran Credit Risk Management (CRM) atau petugas jajaran Relationship Management (RM) yang ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah. Selain itu, fungsi kepatuhan memastikan due diligence atas pemberian kredit dengan putusan komite kredit dan Satuan Kerja Audit Intern berperan memastikan bahwa pemberian kredit telah memenuhi prinsip pemberian kredit yang sehat dan sesuai dengan Kebijakan perkreditan maupun Pedoman Pemberian Kredit.

Untuk Perusahaan Asuransi, fungsi Risk Management memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola penyusunan/evaluasi/penyempurnaan perencanaan dan strategi manajemen risiko serta kebijakan, metodologi, pedoman perangkat dan pengukuran manajemen risiko. Fungsi Kepatuhan memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola dan evaluasi kegiatan, aktivitas operasional, kebijakan dan pedoman Perusahaan yang memadai sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi, serta mengelola seluruh kebijakan Regulator terimplementasi pada setiap Unit Kerja. Fungsi Audit Internal memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan kegiatan audit intern berupa jasa Assurance dan jasa konsultasi sebagai Strategic Business Partner terhadap proses bisnis perusahaan. Dalam melakukan kontrol pertumbuhan risiko kredit dan penerapan unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan, maka disamping keterkaitan pejabat-pejabat dalam risiko kredit seperti Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat-pejabat lainnya dan/atau Group-Group, juga dibentuk suatu Komite Investasi untuk menentukan investment policy maupun putusan investasi kepada pihak terkait dan pihak ketiga dengan nominal dan jangka waktu tertentu.

Untuk Perusahaan Ventura, fungsi manajemen risiko investasi dibagi dalam dua bagian yaitu sebelum investasi dilakukan (investment risk management) dan setelah investasi dilakukan (portfolio risk management). Pada tahap pre-investment, tim investasi berkoordinasi dengan bagian manajemen risiko, kepatuhan, dan legal untuk memastikan seluruh tahapan investasi sudah comply. Selain SKMR BRI Ventures, terdapat Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BRI Ventures yang berfungsi sebagai kontrol internal dan third

line defense dalam penerapan manajemen risiko perusahaan. SKAI BRI Ventures berkontribusi dalam memberikan support pengendalian internal dan indikasi fraud. SKAI BRI Ventures juga secara berkala melakukan risk based audit. Dalam pelaksanaannya, proses audit juga dimonitor oleh tim SKAI BRI secara offsite. Apabila diperlukan, tim SKAI BRI dapat melakukan joint-audit secara ad-hoc. Hal ini ditujukan untuk menjaga efisiensi operasional di BRI Ventura tanpa menurunkan kualitas hasil audit.

Untuk Perusahaan Remittance, Groupon Head ICC membawahi fungsi Policy and Risk yang sekaligus berperan sebagai unit pengendali risiko kredit. Groupon Head ICC juga membawahi fungsi kepatuhan yang dilaksanakan oleh Compliance Officer serta fungsi Anti-Money Laundering (AML) yang dilaksanakan oleh Money Laundering Reporting Officer. Kedua fungsi tersebut berperan dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan uji kepatuhan untuk memastikan kegiatan usaha BGF telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Internal Auditor sebagai fungsi independent assurance memiliki peran dalam menilai efektivitas implementasi manajemen risiko kredit, baik secara transaksional maupun secara portofolio. Internal Auditor berada di bawah Groupon Head ICC, namun memiliki akses langsung kepada Executive Director untuk penyampaian hasil audit.

E. Cakupan dan Informasi Utama dari Pelaporan Tentang Eksposur Risiko Kredit dan Fungsi Manajemen Risiko Kredit Kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) BRI dan seluruh Perusahaan Anak yang membidangi risiko kredit menyusun laporan manajemen risiko dalam format yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara konsolidasian maupun secara terintegrasi. Pelaporan manajemen risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pihak-pihak tertentu antara lain:

- a. Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank secara Individu maupun Konsolidasi
- b. Laporan CKPN dan ATMR untuk Risiko Kredit
- c. Laporan perkembangan pertumbuhan pinjaman
- d. Laporan perkembangan kualitas kredit
- e. Laporan perkembangan kredit yang direstrukturisasi
- f. Laporan penggunaan anggaran penghapusbukuan (PH) dan realisasi pendapatan recovery
- g. Laporan monitoring biaya CKPN maupun rasio pencadangan, misalnya NPL Coverage dan LAR Coverage
- h. Hasil Stress Test Risiko Kredit baik secara portofolio maupun bagi nasabah besar.

Pengungkapan Kualitatif *Counterparty Credit Risk* (CCRA)

Counterparty credit risk adalah risiko kredit yang timbul dari jenis transaksi secara umum memiliki karakteristik:

- a. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
- b. nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu;
- c. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; dan
- d. karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu:
 - 1) jika nilai wajar kontrak bernilai positif maka bank terekspos risiko kredit dari pihak lawan; atau
 - 2) jika nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terkepos risiko kredit dari bank.

Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dapat terjadi akibat transaksi repo, transaksi reverse repo dan transaksi derivatif.

Dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), BRI menggunakan pendekatan standar untuk perhitungan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).

EKSPOSUR TERKAIT TRANSAKSI DENGAN CCP
1) Bank secara Individu

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR
I	II	III	IV
1.	Total Eksposur kepada QCCP	94,097	1,100
2.	(tidak termasuk initial margin dan default fund contribution)	2,026	41
	(i) derivatif OTC	2,026	41
	(ii) transaksi derivatif melalui bursa	0	0
	(iii) securities financing transactions	0	0
	(iv) netting set (dalam hal cross-product netting diperbolehkan)	0	0
3.	Initial margin yang terpisah (segregated)	39,101	
4.	Initial margin yang tidak terpisah (nonsegregated)	0	0
5.	Prefunded default fund contribution	52,970	1,059
6.	Unfunded default fund contribution	0	0
7.	Total Eksposur kepada NonQCCP	0	0
8.	margin dan default fund contribution)	0	0
	(i) derivatif OTC	0	0
	(ii) transaksi derivatif melalui bursa	0	0
	(iii) securities financing transactions	0	0
	(iv) netting set (dalam hal cross-product netting diperbolehkan)	0	0
9.	Initial margin yang terpisah (segregated)	0	
10.	Initial margin yang tidak terpisah (nonsegregated)	0	0
11.	Prefunded default fund contribution	0	0
12.	Unfunded default fund contribution	0	0
13.	Total Eksposur kepada QCCP dan NonQCCP	94,097	1,100

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR
I	II	III	IV
1.	Total Eksposur kepada QCCP	94,097	1,100
2.	(tidak termasuk initial margin dan default fund contribution)	2,026	41
	(i) derivatif OTC	2,026	41
	(ii) transaksi derivatif melalui bursa	0	0
	(iii) securities financing transactions	0	0
	(iv) netting set (dalam hal cross-product netting diperbolehkan)	0	0
3.	Initial margin yang terpisah (segregated)	39,101	
4.	Initial margin yang tidak terpisah (nonsegregated)	0	0
5.	Prefunded default fund contribution	52,970	1,059
6.	Unfunded default fund contribution	0	0
7.	Total Eksposur kepada NonQCCP	0	0
8.	margin dan default fund contribution)	0	0
	(i) derivatif OTC	0	0
	(ii) transaksi derivatif melalui bursa	0	0
	(iii) securities financing transactions	0	0
	(iv) netting set (dalam hal cross-product netting diperbolehkan)	0	0
9.	Initial margin yang terpisah (segregated)	0	
10.	Initial margin yang tidak terpisah (nonsegregated)	0	0
11.	Prefunded default fund contribution	0	0
12.	Unfunded default fund contribution	0	0
13.	Total Eksposur kepada QCCP dan NonQCCP	94,097	1,100

PENGUNGKAPAN PENGGUNAAN PERINGKAT KREDIT EKSTERNAL (CRD)

Lembaga pemeringkat yang digunakan adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Moody's Investor Service, Standard and Poor's, Fitch Ratings dan PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Apabila terdapat Surat Berharga yang memiliki lebih dari 1 (satu) peringkat, maka yang digunakan adalah peringkat yang paling buruk. Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah Tagihan kepada Pemerintah, Tagihan kepada Entitas Sektor Publik, Tagihan kepada Bank, Tagihan kepada Perusahaan Efek & Jasa Keuangan, dan Tagihan kepada Korporasi. Sedangkan tagihan yang lain menggunakan unrated (tanpa peringkat) karena tidak tersedianya data peringkat.

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio		0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	296,401,489	-	-	-	-		296,401,489

Kategori Portofolio		20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	323,332	162,232,372	1,289,664	-		163,845,368

Kategori Portofolio		0%	20%	30%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-		-

Kategori Portofolio		20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
4	Tagihan kepada Bank	-	425,042	-	93,123,720	219,546	44,921	1,809,486		95,622,715
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	295,104	-	526,877	145,852	56,344	3,104,380		4,128,557

Kategori Portofolio		10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-		-

Kategori Portofolio		20%	50%	65%	75%	80%	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
6	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum		216,978		385,873		49,221,962	225,298,912		2,639,367		262,395,990
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya											
	Eksposur Pembiayaan Khusus							19,855,167	3,714,354			22,037,585

Kategori Portofolio		100%	150%	250%	400%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	20,000	-	7,586,390	-		7,606,390

Kategori Portofolio		45%	75%	85%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	3,303,209	445,741,332	90,312,284	12,869,345		400,895,363

Kategori Portofolio		0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65%	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
9	Kredit Beragun Properti	-	30,360,260	8,313,932	25,529,688	-	27,312,224	-	22,406,621	6,715,213	-	38,688,008	23,795,834	14,995,165	-	3,908,264	-	-	-		188,067,234
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarananya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	30,360,260	8,313,932	25,529,688		27,312,224		22,406,621		-	38,688,008	6,092,073	274,288		3,101,102			-		149,850,230
	tanpa pendekatan pembagian kredit																				-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)																				-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)																				-
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayarananya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti																				-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarananya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-		-		-		-	6,715,213	-		17,703,761	14,720,876		807,162.20			-		38,217,003
	tanpa pendekatan pembagian kredit																				-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)																				-
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)																				-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayarananya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti																				-
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi															927,641			6,967,997		7,895,639

Kategori Portofolio		50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	13,415,250	36,877,912	26,388,944		76,193,042

Kategori Portofolio		0%	20%	100%	150%	1250%5)	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
11	Aset Lainnya	31,975,036	-	72,899,114	50,837	-		104,924,987

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	390,684,819	7,347,659	2,939,064	388,301,499
2	40% - 70%	345,926,457	43,649,715	5,023,213	362,610,310
3	75%	464,082,707	14,966,228	1,034,288	316,677,033
4	85%	130,565,824	59,908,968	4,792,717	151,405,486
5	90% - 100%	309,056,603	85,008,966	4,066,290	359,270,407
6	105% - 130%	3,655,286	147,669	59,068	3,655,212
7	150%	41,273,045	2,423,612	431,564	40,508,021
8	250%	7,586,390	-	-	7,586,390
9	400%	-	-	-	-
10	1250%	-	-	-	-
11	Total Tagihan Bersih	1,692,831,131	213,452,817	18,346,204	1,630,014,358

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Kategori Portofolio		0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih
1	Tagihan kepada Pemerintah	302,047,966						296,401,489

Kategori Portofolio		20%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih
2	Tagihan kepada Kualitas Sektor Publik	460,447	162,879,964	1,289,664	0		163,845,368

Kategori Portofolio		0%	20%	30%	50%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional								

Kategori Portofolio		20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih
4	Tagihan kepada Bank	5,606,575	425,042	-	93,682,220	219,546	44,921	1,809,486		95,622,715
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain 1)	772,233	295,104	-	526,877	145,852	56,344	3,104,380		4,128,557

Kategori Portofolio		10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>									

Kategori Portofolio		20%	50%	65% 5)	75%	80%	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih
6	Tagihan kepada Korporasi Umum 2)	107,189	260,282	-	400,449	0	49,221,962	231,868,791	-	2,662,371		262,395,990
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain 3)											
	Eksposur Pembiayaan Khusus 4)	-	-	-	-	0	0	19,855,167	3,714,354	-		22,037,585

Kategori Portofolio		100%	150%	250%	400% 5)	Lainnya	Tagihan Bersih
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas dan Instrumen Modal Lainnya	20,000	30,856	8,879,988			7,606,390

Kategori Portofolio		45%	75%	85%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3,303,209	623,838,823	90,312,284	12,869,345		400,895,363

Kategori Portofolio		0% 5)	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65% 5)	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih
9	Kredit Beragun Properti		30,360,260	8,313,932	25,529,688		27,312,224	0	22,406,621	6,715,213		38,688,008	23,966,640	15,102,411		3,908,264					188,067,234
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara material pada Arus Kas Properti		30,360,260	8,313,932	25,529,688		27,312,224	0	22,406,621	0		38,688,008	6,251,024	338,846		3,101,102					149,850,230
	tanpa pendekatan pembagian kredit 5)									0			0	0	0						
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) 5)									0			0	0	0						
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) 5)									0			0	0	0						
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti									0			0	0	0						
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti									6,715,213			17,715,616	14,763,565		807,162					38,217,003
	tanpa pendekatan pembagian kredit 5)																				
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) 5)																				
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) 5)																				
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti																				
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi 5)														997,600				8,574,724		7,895,639

Kategori Portofolio		50%	100%	150%		Lainnya	Tagihan Bersih	
10	Tagihan yang Telah Jatuh tempo	14,983,234	37,204,233	26,480,673			76,193,042	
Kategori Portofolio		0%	20%	100%	150%	1250% 5)	Lainnya	Tagihan Bersih
11	Aset Lainnya	32,443,932		106,593,276	55,674			104,924,987
No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan		Tagihan Bersih TRA	Rata-Rata FKK		Tagihan Bersih	
1	< 40%		403,423,305	13,483,380	2,707,300			397,532,250
2	40%-70%		348,096,246	134,251,880	5,446,265			342,113,891
3	75%		642,343,656	-	589,844			350,571,483
4	85%		130,667,702	-	2,612,255			127,543,222
5	90%-100%		349,633,134	65,833,228	3,673,551			333,112,703
6	105%-130%		3,655,286	-	300,621			3,596,144
7	150%		41,718,583	-	259,280			39,653,682
8	250%		8,879,988	-	-			8,879,988
9	400%		-	-	-			-
10	1250%		-	-	-			-
11	Total Tagihan Bersih		1,928,417,901	213,568,488	15,589,116			1,603,003,363

Tabel X. Risiko Kredit - Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1).

		a	b	c	d	e	f
	Indonesia	<i>Replacement cost</i> (RC)	<i>Potential future exposure</i> (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan <i>regulatory</i> EAD	Tagihan Bersih (1,4 x [RC + PFE])	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	2,385,112	5,022,245		1.4	10,464,397	3,409,250
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)						
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
5	VaR untuk SFT						
6	Total						3,409,250

LAPORAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KUALITATIF

Credit Valuation Adjustment (CVAA)

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bulan Laporan : Desember 2025

1. Proses Manajemen Risiko CVA

Risiko CVA merupakan risiko kerugian yang timbul dari perubahan nilai CVA sebagai akibat dari perubahan credit spread pihak lawan dan faktor risiko pasar yang mempengaruhi harga transaksi derivatif.

BRI telah menerapkan proses manajemen risiko pasar termasuk untuk risiko CVA sesuai dengan prinsip penerapan manajemen risiko yang diatur dalam kebijakan umum manajemen risiko dan didasarkan pada *Three Lines Model* dimana Dewan Komisaris dan Direksi berperan sebagai *governing body* dan *Three Lines of Defense* yang terdiri dari Unit Kerja Operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern.

Aktivitas transaksi derivatif dilakukan oleh Unit Kerja Business Treasury dan dilakukan pemantauan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (Market, Portofolio & Enterprise Risk). BRI secara reguler menetapkan dan melakukan review limit untuk transaksi derivatif melalui limit pre settlement risk, limit transaksi aktivitas treasury dan limit risiko pasar.

2. Metode CVA

BRI menggunakan metode pendekatan dasar yang disederhanakan (BA-CVA) dalam perhitungan beban modal untuk risiko CVA. Pendekatan BA-CVA menghitung dan menjumlahkan untuk seluruh pihak lawan yang masuk dalam cakupan Perhitungan CVA sesuai dengan ketentuan regulator.

BA-CVA yang Disederhanakan (CVA 1)

1. Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

Risiko	Komponen	ATMR BA-CVA
	a	b
Agregasi komponen sistematis CVA	117,886	
Agregasi komponen <i>idiosyncratic</i> risiko CVA	48,865	
Total		589,559

2. Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Risiko	Komponen	ATMR BA-CVA
	a	b
Agregasi komponen sistematis CVA	117,886	
Agregasi komponen <i>idiosyncratic</i> risiko CVA	48,865	
Total		589,559

Tabel Z. Risiko Kredit - Eksposur CCR berdasarkan portofolio dan bobot risiko berdasarkan pendekatan standar

Bobot Risiko Kategori Portofolio	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Others	Total Tagihan Bersih
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral	594								594
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik									-
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional									-
Tagihan kepada Bank Lain				243,002	664,920				907,922
Tagihan kepada perusahaan sekuritas									-
Tagihan kepada Korporasi									-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel									-
Tagihan aset lainnya									-
Total	594	-	-	243,002	664,920	-	-	-	908,516

Tabel AA. Risiko Kredit - Tagihan Bersih Derivatif Kredit

	a	b
	Proteksi yang dibeli	Proteksi yang dijual
Notional	nihil	nihil
<i>Single-name credit default swaps</i>	nihil	nihil
<i>Index credit default swaps</i>	nihil	nihil
<i>Total return swaps</i>	nihil	nihil
<i>Credit options</i>	nihil	nihil
Derivatif kredit lainnya	nihil	nihil
Total notional	nihil	nihil
Nilai wajar	nihil	nihil
Nilai wajar positif (aset)	nihil	nihil
Nilai wajar negatif (kewajiban)	nihil	nihil

Tabel CC. Risiko Kredit - Securitisation exposures in the banking book

Analisa Kuantitatif: Bank diharapkan menambahkan dengan penjelasan mengenai perubahan signifikan dan penyebab utama perubahannya.

[illegible]

Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Pendekatan Standar (MR1)

1. Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

Risiko	Beban Modal Pendekatan Standar	Beban Modal Pendekatan Standar
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Risiko GIRR	745,044	701,934
Risiko CSR nonsekuritisasi	357,839	479,718
Risiko CSR sekuritisasi nonCTP	-	-
Risiko CSR sekuritisasi CTP	-	-
Risiko Ekuitas	-	-
Risiko Komoditas	-	-
Risiko Nilai Tukar	671,106	805,030
DRC - nonsekuritisasi	17,066	178,842
DRC - sekuritisasi nonCTP	-	-
DRC - sekuritisasi CTP	-	-
Total	1,791,054	2,165,525

2. Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

Risiko	Beban Modal Pendekatan Standar	Beban Modal Pendekatan Standar
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Risiko GIRR	751,280	705,991
Risiko CSR nonsekuritisasi	362,341	484,460
Risiko CSR sekuritisasi nonCTP	-	-
Risiko CSR sekuritisasi CTP	-	-
Risiko Ekuitas	104,789	96,028
Risiko Komoditas	550,747	256,101
Risiko Nilai Tukar	697,356	943,671
DRC - nonsekuritisasi	35,043	201,434
DRC - sekuritisasi nonCTP	-	-
DRC - sekuritisasi CTP	-	-
Total	2,501,557	2,687,685

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO PASAR

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bulan Laporan : Desember 2025

1. Strategi dan Proses Manajemen Risiko Pasar

Strategi pengelolaan *trading book* BRI tercermin pada Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Pengelolaan posisi *trading* ditetapkan secara berkala dalam komite direksi seperti Asset & Liability Committee (ALCO), Risk Management Committee (RMC) maupun komite direksi lainnya. Aktivitas *trading* BRI dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek dari instrumen keuangan yang dihasilkan dari aktivitas seperti *proprietary positions*, *matched book*, *brokering* dan *market making*.

Proses manajemen risiko pasar dilakukan sesuai dengan prinsip penerapan manajemen risiko yang diatur dalam kebijakan umum manajemen risiko dan didasarkan pada *Three Lines Model* dimana Dewan Komisaris dan Direksi berperan sebagai *governing body* dan *Three Lines of Defense* yang terdiri dari Unit Kerja Operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern.

Pengukuran risiko pasar dilakukan secara berkala (harian dan bulanan) antara lain dengan menetapkan *mark to market* pada akhir hari, menghitung beban modal atas risiko pasar dengan pendekatan standar, melakukan pengukuran *value at risk* (VaR), *backtesting*, dan melakukan analisa sensitivitas suku bunga atas pergerakan suku bunga pasar secara berkala.

BRI menetapkan kebijakan lindung nilai untuk mengurangi risiko yang timbul atau diperkirakan akan timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan. Hal-hal yang ditetapkan terkait lindung nilai mencakup ketentuan umum, teknik transaksi lindung nilai, batasan transaksi lindung nilai dan instrumen lindung nilai.

2. Kebijakan Aktivitas *Trading*

BRI menetapkan klasifikasi instrumen keuangan sesuai dengan kebijakan standar akuntansi pada kebijakan umum keuangan dan akuntansi BRI. Klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan karakteristik arus kas dan model bisnis dalam mengelola asset keuangan dan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh regulator. BRI memasukkan instrumen keuangan dan instrumen nilai tukar ke dalam *trading book* apabila tidak ada hambatan hukum untuk menjual atau melakukan lindung nilai secara keseluruhan terhadap instrumen dimaksud. Adapun instrumen *trading* ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. jual beli jangka pendek
- b. mengambil keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek

- c. mengunci keuntungan arbitrase; dan/atau
- d. risiko lindung nilai yang timbul

Selain karakteristik di atas, penetapan instrumen *trading* merujuk kepada ketentuan regulator terkait ATMR Risiko Pasar.

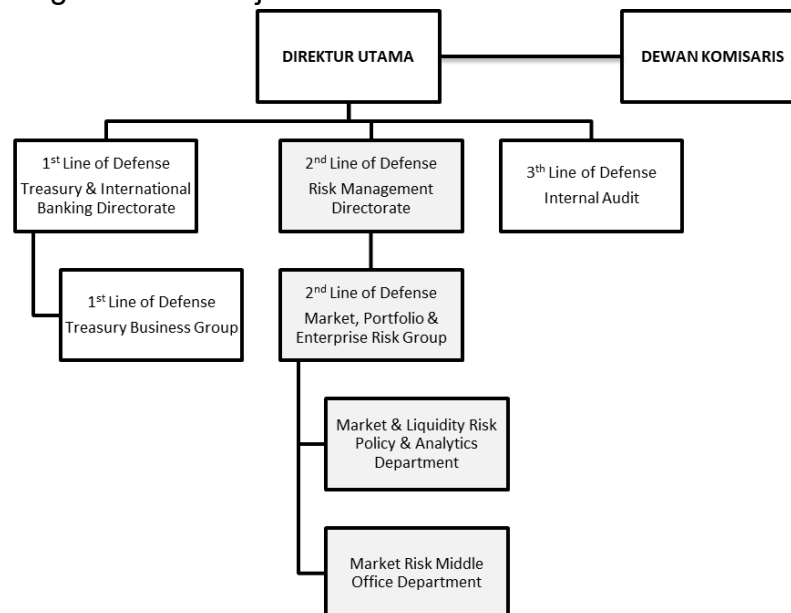
Kebijakan pengelompokan instrumen keuangan pada *trading book* dan *banking book* serta perpindahan instrumen antar *regulatory book* diatur pada kebijakan ATMR Risiko Pasar dan Kebijakan Umum Keuangan dan Akuntansi BRI. Dalam aktivitas *trading*, BRI menetapkan kebijakan limit transaksi dan limit risiko pasar aset keuangan terkait aktivitas Treasury dan dilakukan pemantauan secara periodik.

3. Struktur dan Organisasi Fungsi Manajemen Risiko Pasar

Pemantauan dan Pengendalian eksposur risiko pasar BRI dilakukan oleh Market, Portfolio & Enterprise Risk Group yang memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan termasuk limit risiko pasar, perhitungan dan pengukuran risiko pasar serta pemantauan harian atas *mark to market* (MTM) dengan melibatkan *Front Office* (Treasury Business Group) dan *Back Office* (Central Operation Group).

Pengawasan Aktif Direksi dilakukan secara berkala dalam komite direksi seperti Forum Risk Management Committee, Forum *Assets & Liability Management Committee*, *Business Performance Review*, dan Rapat Direksi. Sedangkan Pengawasan oleh komisaris dilakukan melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Pasar BRI



4. Ruang lingkup Pelaporan

BRI melakukan Perhitungan ATMR Risiko Pasar menggunakan pendekatan standar yang terdiri dari perhitungan beban modal metode *sensitivity based*, perhitungan beban modal *Default Risk Charge*, perhitungan beban modal *Residual Risk Add On* dan perhitungan beban modal *Credit Valuation Adjustment*. Adapun instrumen yang dilakukan perhitungan yaitu untuk surat berharga trading, portofolio reksadana, transaksi derivatif, dan posisi devisa neto. Perhitungan ATMR Risiko Pasar dengan pendekatan standar dilakukan secara reguler setiap bulan.

**LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK
(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)**

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Individu)
Bulan Laporan : Desember 2025

Analisa Kualitatif	
1	<i>Interest Rate Risk in The Banking Book</i> (IRRBB) merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar akibat berlawanan dengan posisi <i>Banking Book</i> yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas BRI baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Risiko pergerakan suku bunga BRI terjadi karena penyesuaian suku bunga aset lebih lambat dari penyesuaian suku bunga liabilitas. Risiko ini disebabkan komposisi aset BRI yang didominasi suku bunga <i>fixed</i> dan mempunyai <i>repricing maturities</i> lebih panjang.
2	Dalam mitigasi risiko IRRBB, BRI merumuskan strategi pengelolaan dampak pergerakan suku bunga melalui komite <i>Asset & Liability Management</i> (ALCO) dan <i>Risk Management Committee</i> (RMC). ALCO dilaksanakan setiap bulan membahas strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang diantaranya adalah <i>balanced pricing, assets allocation, funding mix, gap management dan capital management</i> . RMC dilakukan secara reguler dengan pembahasan update kondisi makroekonomi, profil risiko pasar, parameter risiko pasar dan <i>risk issue</i> terkini.
3	BRI melakukan perhitungan IRRBB secara triwulanan dengan menggunakan metode <i>Economic Value of Equity</i> (EVE) dan <i>Net Interest Income</i> (NII). Metode EVE menggunakan perspektif jangka panjang dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap modal Tier 1 BRI. Metode EVE ini sesuai dengan <i>guideline</i> dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan metode NII menggunakan perspektif jangka pendek dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap estimasi pendapatan BRI dalam satu tahun ke depan.
4	Skenario yang digunakan dalam perhitungan IRRBB adalah sebagai berikut: a) <i>Parallel Up</i> (400 bps) b) <i>Parallel Down</i> (400 bps) c) <i>Steeper</i> (350 bps) d) <i>Flattener</i> (350 bps) e) <i>Short Rate Up</i> (500 bps) f) <i>Short Rate Down</i> (500 bps)
5	Dalam perhitungan IRRBB, BRI menggunakan asumsi-asumsi utama permodelan dan parametrik sebagai berikut:

Analisa Kualitatif	
	a) Perhitungan arus kas, <i>instrument</i> dengan suku bunga <i>float</i> menggunakan <i>risk free</i> yang bersumber dari <i>Government Bonds IDR & Government Bonds USD</i>. Margin yang digunakan bersumber dari margin rata-rata setiap <i>instrument</i>. Sedangkan <i>Instrument</i> dengan suku bunga fix menggunakan acuan <i>effective interest rate</i> sebagai dasar proyeksi <i>cashflow</i>. b) <i>Account Non Maturity Deposit</i> (NMD) yang terdiri dari giro dan tabungan ditempatkan pada <i>time bucket overnight</i>, <i>time bucket</i> 3 s.d 4 tahun & <i>time bucket</i> 4 s.d 5 tahun sesuai dengan <i>caps</i> maksimal yang telah ditentukan oleh regulator. NMD yang ditempatkan pada <i>time bucket</i> terpanjang merupakan <i>core fund</i> BRI yang mempunyai tingkat sensitivitas suku bunga lebih rendah daripada <i>non core fund</i> yang ditempatkan pada <i>time bucket overnight</i>. c) Penentuan <i>prepayment risk</i> berdasarkan data historis sesuai dengan segmen & produk pinjaman dalam jangka waktu yang dianggap memadai. Perhitungan <i>baseline</i> persentase <i>prepayment</i> merupakan ratas total saldo pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh tempo terhadap total saldo pinjaman tersebut pada setiap segmen. Sedangkan dalam menentukan <i>early redemption</i>, metode yang dipakai menggunakan pendekatan historis s.d posisi laporan untuk menetapkan saldo deposito yang dilunasi sebelum jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu terhadap total saldo deposito bulan berjalan. d) Selain permodelan <i>prepayment risk</i> dan <i>early redemption</i>, BRI juga menetapkan permodelan internal untuk <i>account-account</i> NPL. NPL Ritel Komersial dengan plafond maksimal 5 miliar rupiah ditempatkan pada <i>time bucket</i> 3.5 tahun. Sedangkan NPL Menengah Korporasi dengan plafond di atas 5 miliar rupiah ditempatkan pada <i>time bucket</i> 3 tahun. Account NPL termasuk <i>non rate</i> dimana estimasi <i>cashflow</i> nya tidak memperhitungkan <i>interest</i>. e) Perhitungan IRRBB menggunakan mata uang rupiah dan USD. Mata uang asing selain mata uang tersebut diagregasikan ke dalam perhitungan USD.
Analisa Kuantitatif	
1	Giro dan Tabungan merupakan simpanan yang tidak mempunyai jangka waktu dan secara kontraktual mempunyai <i>maturity overnight</i>. Sedangkan secara behavioural, BRI menempatkan giro dan tabungan pada <i>time bucket overnight</i>, <i>time bucket</i> 3 s.d 4 tahun dan <i>time bucket</i> 4 s.d 5 tahun. Penyebaran <i>Non Maturity Deposit</i> BRI sesuai jangka waktu posisi 31 Desember 2025: a. Giro; <i>time bucket Overnight</i> (60,78%), <i>time bucket</i> 3 s.d 4 tahun (31,04%) dan <i>time bucket</i> 4 s.d 5 tahun (8,18%). b. Tabungan; <i>time bucket Overnight</i> (22,28%) dan <i>time bucket</i> 4 s.d 5 tahun (77,72%).

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Individu)
Bulan Laporan : Desember 2025

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
	T	T - 1	T	T - 1
<i>Parallel Up</i>	(19.199.538)	(18.067.862)	(16.826.008)	(17.128.710)
<i>Parallel Down</i>	19.872.671	18.712.549	16.598.169	16.786.955
<i>Steepener</i>	(10.359.422)	(9.889.637)		
<i>Flattener</i>	5.716.514	5.517.805		
<i>Short Rate Up</i>	(3.721.658)	(3.394.319)		
<i>Short Rate Down</i>	3.734.584	3.406.230		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	19.199.538	18.067.862	16.826.008	17.128.710
Modal Tier 1(untuk Δ EVE) atau	244.158.213	251.199.234	107.923.941	100.347.386
<i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)				
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier	7,86%	7,19%	15,59%	17,07%
1 (untuk Δ EVE) atau <i>Projected</i>				
<i>Income</i> (untuk Δ NII)				

**LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK
(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)**

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Konsolidasi)
Bulan Laporan : Desember 2025

Analisa Kualitatif	
1	<i>Interest Rate Risk in The Banking Book</i> (IRRBB) merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar akibat berlawanan dengan posisi Banking Book yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas BRI baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Risiko pergerakan suku bunga BRI terjadi karena penyesuaian suku bunga aset lebih lambat dari penyesuaian suku bunga liabilitas yang disebabkan komposisi aset BRI yang didominasi suku bunga <i>fixed</i> dan mempunyai <i>repricing maturities</i> lebih panjang.
2	Dalam mitigasi risiko IRRBB, BRI merumuskan strategi pengelolaan dampak pergerakan suku bunga melalui komite <i>Assets & Liability Management</i> (ALCO) dan <i>Risk Management Committee</i> (RMC) Terintegrasi. ALCO dilaksanakan setiap bulan membahas strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang diantaranya adalah <i>balanced pricing, assets allocation, funding mix, gap management, dan capital management</i> . Sedangkan RMC Terintegrasi dilaksanakan dengan perusahaan anak untuk membahas <i>assessment</i> profil risiko pasar dan <i>risk issue</i> terkini.
3	BRI melakukan perhitungan IRRBB Konsolidasi secara semesteran dengan menggunakan <i>metode Economic Value of Equity</i> (EVE) dan <i>Net Interest Income</i> (NII). Metode EVE menggunakan perspektif jangka panjang dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap modal Tier 1 BRI dan telah disesuaikan dengan <i>guideline</i> dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan metode NII menggunakan perspektif jangka pendek dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap estimasi pendapatan BRI dalam satu tahun.
4	Skenario yang digunakan dalam perhitungan IRRBB BRI adalah sebagai berikut: a) Parallel Up (400 bps) b) Parallel Down (400 bps) c) Steepener (350 bps) d) Flattenner (350 bps) e) Short Rate Up (500 bps) f) Short Rate Down (500 bps)
5	a) Dalam perhitungan arus kas, <i>instrument</i> dari aset dan liabilitas dengan suku bunga <i>float</i> menggunakan <i>risk free</i> yang bersumber dari <i>Government Bonds</i> IDR dan <i>Government Bonds</i> USD. Margin yang digunakan bersumber dari margin rata-rata setiap segmen

Analisa Kualitatif	
	instrumen. Instrumen aset dan liabilitas dengan suku bunga fix menggunakan acuan <i>yield</i> yang dibebankan pada instrumen sebagai dasar proyeksi <i>cashflow</i>. b) <i>Account Non Maturity Deposit</i> (NMD) yaitu giro dan tabungan ditempatkan pada jangka waktu <i>overnight</i>, skala waktu 3 s.d 4 tahun & 4 s.d 5 tahun sesuai dengan <i>caps</i> maksimal yang telah ditentukan oleh regulator. NMD yang ditempatkan pada skala waktu terpanjang merupakan <i>core fund</i> BRI yang mempunyai tingkat sensitivitas suku bunga lebih rendah daripada <i>non core fund</i> yang ditempatkan pada skala waktu <i>overnight</i>. c) Penentuan <i>prepayment risk</i> berdasarkan data historis sesuai dengan segmen & produk pinjaman dalam jangka waktu yang dianggap memadai. Perhitungan <i>baseline</i> persentase <i>prepayment</i> merupakan ratas total saldo pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh tempo terhadap total saldo pinjaman tersebut per masing-masing segmen. Sedangkan dalam menentukan <i>early redemption</i>, menggunakan pendekatan historis dengan sumber data yang memadai. Persentase <i>baseline</i> yang digunakan dalam <i>early redemption</i> merupakan saldo deposito yang dilunasi sebelum jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu terhadap total saldo deposito bulan berjalan. d) Perhitungan IRRBB menggunakan mata uang rupiah dan USD. Semua mata uang selain mata uang tersebut diagregasikan ke dalam perhitungan USD.
Analisa Kuantitatif	
1	Giro dan Tabungan merupakan simpanan yang tidak mempunyai jangka waktu dan secara kontraktual mempunyai <i>maturity overnight</i>. Secara behavioural, BRI secara konsolidasi menempatkan giro dan tabungan posisi 31 Desember 2025 pada 3 <i>time bucket</i> terpisah yaitu : - Overnight (<i>non corefund</i>), Giro (60,80%) dan Tabungan (22,43%) 3 s.d 4 tahun (<i>corefund</i>), Giro (31,04%) dan Tabungan (0,01%) 4 s.d 5 tahun (<i>corefund</i>), Giro (8,16%) dan Tabungan (77,57%)

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Konsolidasi)

Bulan Laporan : Desember 2025

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
	T	T – 1 (Jun)	T	T – 1 (Jun)
Parallel Up	(19.435.984)	(18.397.018)	(17.071.059)	(16.732.105)
Parallel Down	20.115.300	19.065.641	16.843.221	16.317.933
Steepener	(10.465.005)	(10.136.731)		
Flattener	5.764.642	5.689.086		
Short Rate Up	(3.785.481)	(3.402.258)		
Short Rate Down	3.798.708	3.413.896		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	19.435.984	18.397.018	17.071.059	16.732.105
Modal Tier 1(untuk Δ EVE) atau	247.532.865	241.789.319	108.920.762	102.780.852
Projected Income (untuk Δ NII)				
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1	7,85%	7,61%	15,67%	16,28%
(untuk Δ EVE) atau Projected				
Income (untuk Δ NII)				

LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) TRIWULANAN

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Posisi Laporan : Triwulan IV 2025

(dalam Jutaan Rupiah)

No	Komponen	Individual				Konsolidasi			
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).
1	Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		92 hari		92 hari		92 hari		92 hari
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)									
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		333,549,806		362,148,941		339,473,424		367,870,393
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)									
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	654,593,819	37,483,070	646,103,606	37,087,749	658,020,323	37,735,031	649,029,115	37,295,000
	a. Simpanan/ Pendanaan stabil	559,526,234	27,976,312	550,452,241	27,522,612	561,340,020	28,067,001	552,158,239	27,607,912
	b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil	95,067,585	9,506,759	95,651,364	9,565,136	96,680,303	9,668,030	96,870,876	9,687,088
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	653,530,350	201,734,182	645,543,335	205,994,234	656,913,431	203,376,542	649,406,942	207,826,403
	a. Simpanan operasional	411,559,620	102,060,310	363,450,601	90,178,439	412,047,855	102,177,649	364,195,952	90,359,856
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	240,263,530	97,966,672	281,166,932	114,889,992	243,158,376	99,491,694	284,285,189	116,540,745
	c. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank	1,707,200	1,707,200	925,802	925,802	1,707,200	1,707,200	925,802	925,802
5	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)	27,759,165	0	18,852,207	0	27,759,165	0	18,865,756	0
6	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:	396,344,461	103,934,239	362,505,165	73,965,071	396,910,231	104,352,924	363,271,887	74,596,385
	a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif	74,289,306	74,289,306	50,280,364	50,280,364	74,289,306	74,289,306	50,280,364	50,280,364
	b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	120,731,120	10,965,221	116,295,742	10,539,018	120,901,214	10,988,230	116,455,394	10,563,263
	e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	0	0	0	0	395,676	395,676	607,069	607,069
	f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	188,293,117	5,648,794	188,436,465	5,653,094	188,293,117	5,648,794	188,436,465	5,653,094
	g. Arus kas keluar kontraktual lainnya	13,030,917	13,030,917	7,492,595	7,492,595	13,030,917	13,030,917	7,492,595	7,492,595
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		343,151,491		317,047,053		345,464,497		319,717,787
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)									
8	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	803,739	0	4,450,466	0	803,739	0	4,450,466	0
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	44,794,582	22,397,307	44,861,497	22,430,768	46,890,241	23,448,873	46,681,171	23,347,544
10	Arus kas masuk lainnya	74,065,720	74,065,720	50,417,915	50,417,915	74,093,897	74,079,809	50,443,595	50,430,755
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		96,463,027		72,848,682		97,528,682		73,778,299
			TOTAL ADJUSTED VALUE¹		TOTAL ADJUSTED VALUE¹		TOTAL ADJUSTED VALUE¹		TOTAL ADJUSTED VALUE¹
12	TOTAL HQLA		333,549,806		362,148,941		339,473,424		367,870,393
13	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		246,688,464		244,198,371		247,935,815		245,939,488
14	LCR (%)		135.21%		148.30%		136.92%		149.58%

Keterangan:

¹Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

LAPORAN PERHITUNGAN
NET STABLE FUNDING RATIO

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bulan Laporan : Desember 2025

(Dalam Jutaan Rupiah)

Komponen ASF		Nilai Tertcat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tertcat	Faktor ASF	Nilai Tertcat	Faktor ASF	Nilai Tertcat	Faktor ASF	Nilai Tertcat	Faktor ASF	
1	Modal									311,342,780
1.1	Modal Bagi Bank Umum berkantor pusat di Indonesia	0		0		0		0		
1.1.1	Modal Inti (Tier 1)	297,456,566	100%	0	n.a	0	n.a	0	n.a	297,456,566
1.1.2	Modal Pelengkap (Tier 2)	13,886,214	100%	0	0%	0	0%	0	100%	13,886,214
1.2	Modal bagi KCBA	0	100%	0	0%	0	0%	0	100%	
1.3	Instrumen modal lainnya	0	100%	0	0%	0	0%	0	100%	
2	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan :									634,842,288
2.1	Simpanan Stabil	0		0		0		0		
2.1.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	501,521,144	95%	0	n.a	0	n.a	0	n.a	476,445,087
2.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)	0	n.a	85,835,705	95%	3,136,847	95%	661,632	100%	85,185,557
2.2	Simpanan Kurang Stabil	0		0		0		0		
2.2.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	31,093,151	90%	0	n.a	0	n.a	0	n.a	27,983,836
2.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)	0	n.a	46,806,118	90%	2,263,920	90%	1,064,774	100%	45,227,808
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil :									56,775,684
3.1	Simpanan Stabil	0		0		0		0		
3.1.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	49,337,236	95%	0	n.a	0	n.a	0	n.a	46,870,374
3.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)	0	n.a	2,976,027	95%	264,552	95%	71,705	100%	3,150,255
3.2	Simpanan Kurang Stabil	0		0		0		0		
3.2.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	6,111,529	90%	0	n.a	0	n.a	0	n.a	5,500,376
3.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)	0	n.a	1,317,110	90%	57,520	90%	17,512	100%	1,254,679
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi :									333,393,870
4.1	Simpanan operasional	434,163,209	50%	0	50%	0	50%	0	100%	217,081,605
4.2	Simpanan non - operasional dan/atau liabilitas lainnya yang bersifat non-operasional yang berasal dari:	0		0		0		0		116,312,266
4.2.1	perusahaan non-keuangan	0	0%	192,344,379	50%	4,906,152	50%	1,499,970	100%	100,125,235
4.2.2	Pemerintah Indonesia	0	0%	81,819	50%	23,609	50%	0	100%	52,714
4.2.3	pemerintah negara lain	0	0%	0	50%	0	50%	0	100%	0
4.2.4	entitas sektor publik	0	0%	6,801,914	50%	6,757	50%	361,025	100%	3,765,360
4.2.5	bank pembangunan multilateral	0	0%	0	50%	0	50%	0	100%	0
4.2.6	Bank Indonesia	0	0%	0	0%	0	50%	0	100%	0
4.2.7	bank sentral negara lain	0	0%	0	0%	0	50%	0	100%	0
4.2.8	lembaga keuangan	0	0%	68,310,489	0%	2,078,003	50%	830,365	100%	1,869,367
4.2.9	Lainnya	0	0%	879,430	0%	500,000	50%	10,249,590	100%	10,499,590
5	Liabilitas yang memiliki hubungan ketergantungan dengan aset tertentu	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
6	Liabilitas dan ekuitas lainnya:									9,743,335
6.1	NSFR Liabilitas Derivatif	0		0		0%				0
6.2	Liabilitas pajak Tangguhan	0	100%	9,358,987	0%	0	50%	0	100%	0
6.3	kepentingan non-pengendali yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal inti utama (Tier 1)	0	100%	0	0%	0	50%	0	100%	0
6.4	Utang tanggal perdagangan (trade date payable)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
6.5	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas, termasuk liabilitas lainnya tanpa jangka waktu*)	62,894,598	0%	41,489,701	0%	0	50%	9,743,335	100%	9,743,335
7	Total ASF									1,346,097,957

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
Aset Pada Neraca										
3.1	Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) yang diberikan kepada:									968,745,172
3.1.1	Lembaga keuangan yang dijamin oleh HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan	0		24,422		0		0		2,442
3.1.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	24,422	10%	0	50%	0	100%	2,442
3.1.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		
3.1.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	10%	0	50%	0	100%	0
3.1.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	100%	0
3.1.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.2	Lembaga keuangan yang dijamin oleh non-HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan	0		0		0		0		0
3.1.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	0	15%	0	50%	0	100%	0
3.1.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		
3.1.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	15%	0	50%	0	100%	0
3.1.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	100%	0
3.1.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.3	Lembaga keuangan dan tanpa agunan, termasuk penempatan dana (tanpa jangka waktu dan dengan jangka waktu) pada lembaga keuangan lain dan bukan untuk aktivitas operasional	0		0		0		0		0
3.1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	15%	0	15%	0	50%	0	100%	0
3.1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.3.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	15%	0	50%	0	100%	0
3.1.3.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	100%	0
3.1.3.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.4	Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan pinjaman lain , yang diantaranya:	0		85,997,534		129,756,037		894,230,956		867,973,098
3.1.4.1	dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar	0		0		0		0		0
3.1.4.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.4.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.4.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.4.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.4.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.4.2	dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar	0		85,997,534		129,756,037		894,230,956		867,973,098
3.1.4.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	85,997,534	50%	129,756,037	50%	894,230,956	85%	867,973,098
3.1.4.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.4.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	85%	0
3.1.4.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	85%	0
3.1.4.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.5	Tagihan (termasuk pinjaman) kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun selain surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain	0		0		0		0		0
3.1.5.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	0	0%	0	50%			0
3.1.5.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0				0
3.1.5.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	0%	0	50%			0
3.1.5.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%			0
3.1.5.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%			0

Komponen RSF		Nilai Tertcat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tertcatat	Faktor RSF	Nilai Tertcatat	Faktor RSF	Nilai Tertcatat	Faktor RSF	Nilai Tertcatat	Faktor RSF	
3.1.6	Tagihan kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain (contoh: surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain)	0		0		0		0		
3.1.6.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	0	0%	0	5%	0	5%	0
3.1.6.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		
3.1.6.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	0%	0	5%	0	5%	0
3.1.6.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	50%	0
3.1.6.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.7	Kredit beragun rumah tinggal, yang diantaranya :	0		29,408,897		40,736,196		87,320,689		100,769,632
3.1.7.1	dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar	0		7,544,434		11,801,732		42,627,499		37,380,957
3.1.7.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	7,544,434	50%	11,801,732	50%	42,627,499	65%	37,380,957
3.1.7.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.7.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.7.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.7.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.7.2	dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar	0		21,864,464		28,934,464		44,693,190		63,388,675
3.1.7.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	21,864,464	50%	28,934,464	50%	44,693,190	85%	63,388,675
3.1.7.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.7.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	85%	0
3.1.7.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	85%	0
3.1.7.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.2	Surat berharga yang tidak mengalami gagal bayar dan non-HQLA serta saham yang diperdagangkan di bursa dan non-HQLA, dengan syarat tertentu									9,000,506
3.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	1,431,818	50%	989,890	50%	9,164,297	85%	9,000,506
3.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	85%	0
3.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	85%	0
3.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
4	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung									
5	Aset lainnya									127,368,222
5.1	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	0	85%							0
5.2	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)			0	Max (85% ,faktor RSF aset)	0	Max (85% ,faktor RSF aset)	52,970	Max (85% ,faktor RSF aset)	45,025
5.3	NSFR aset derivatif			55,690	100%	0	100%	0	100%	55,690
5.4	20% liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin			0	100%	0	100%	0	100%	0
5.5	Piutang tanggal perdagangan	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
5.6	Kredit atau pinjaman dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (Non-Performing Loan)	0	100%	3,775,719	100%	891,041	100%	7,970,890	100%	12,637,650
5.7	Saham yang tidak diperdagangkan di bursa	0	n.a	0	100%	0	100%	4,463,270	100%	4,463,270
5.8	Aset tetap	0	n.a	0	100%	0	100%	45,366,125	100%	45,366,125
5.9	Faktor pengurang modal	0	n.a	0	100%	0	100%	51,160,634	100%	51,160,634
5.10	Surat berharga yang gagal bayar	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
5.11	Aset lainnya yang tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0	mengikuti	0		0		0	100%	0
5.12	Aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)	13,639,828	100%	0	100%	0	100%	0	100%	13,639,828
6	Total aset	0		0		0		0		1,136,768,481

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
	Transaksi Rekening Administratif									
7	Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat tidak dapat dibatalkan (irrevocable) atau dapat dibatalkan dengan syarat (conditionally revocable)			27,266,638	5%	22,014,389	5%	85,423,348	5%	6,735,219
8	fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat dapat dibatalkan tanpa syarat (unconditionally revocable)			0	0%	0	0%	0	0%	0
9	kewajiban yang berasal dari instrumen trade finance (termasuk garansi dan letters of credit (L/C))			2,428,004	3%	0	3%	0	3%	72,840
10	letters of credit (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban trade finance			0	5%	0	5%	0	5%	0
11	kewajiban non-kontraktual			0	5%	0	5%	0	5%	0
12	Total transaksi rekening administratif	0		0		0		0		6,808,059
13	Total RSF									1,143,576,540
14	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i> (%))									117.71%

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Konsolidasi)
Bulan Laporan : Desember 2025

Komponen ASF		Nilai Tertcatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tertcatat	Faktor ASF	Nilai Tertcatat	Faktor ASF	Nilai Tertcatat	Faktor ASF	Nilai Tertcatat	Faktor ASF	
1	Modal									314,922,151
1.1	Modal Bagi Bank Umum berkantor pusat di indonesia							0		
1.1.1	Modal Inti (Tier 1)	300,965,536	100%		n.a		n.a	0	n.a	300,965,536
1.1.2	Modal Pelengkap (Tier 2)	13,956,615	100%	0	0%	0	0%	0	100%	13,956,615
1.2	Modal bagi KCBA	0	100%	0	0%	0	0%	0	100%	
1.3	Instrumen modal lainnya	0	100%	0	0%	0	0%	0	100%	
2	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan :									637,269,205
2.1	Simpanan Stabil									
2.1.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	502,354,948	95%		n.a		n.a		n.a	477,237,201
2.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)		n.a	85,879,197	95%	3,137,575	95%	661,955	100%	85,227,888
2.2	Simpanan Kurang Stabil									
2.2.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	32,539,891	90%		n.a		n.a		n.a	29,285,901
2.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)		n.a	47,122,592	90%	2,270,120	90%	1,064,774	100%	45,518,215
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil :									58,639,821
3.1	Simpanan Stabil									
3.1.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	49,537,811	95%		n.a		n.a		n.a	47,060,920
3.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)		n.a	2,998,262	95%	264,612	95%	71,705	100%	3,171,435
3.2	Simpanan Kurang Stabil									
3.2.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	6,131,042	90%		n.a		n.a		n.a	5,517,938
3.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)		n.a	3,131,108	90%	60,020	90%	17,512	100%	2,889,527
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi :									335,359,681
4.1	Simpanan operasional	434,879,398	50%	0	50%	0	50%	0	100%	217,439,699
4.2	Simpanan non - operasional dan/atau liabilitas lainnya yang besifat non-operasional yang berasal dari:									117,919,982
4.2.1	perusahaan non-keuangan	0	0%	195,237,313	50%	4,906,152	50%	1,499,970	100%	101,571,702
4.2.2	Pemerintah Indonesia	0	0%	81,819	50%	23,609	50%	0	100%	52,714
4.2.3	pemerintah negara lain	0	0%	0	50%	0	50%	0	100%	0
4.2.4	entitas sektor publik	0	0%	7,124,414	50%	6,757	50%	361,025	100%	3,926,610
4.2.5	bank pembangunan multilateral	0	0%	0	50%	0	50%	0	100%	0
4.2.6	Bank Indonesia	0	0%	0	0%	0	50%	0	100%	0
4.2.7	bank sentral negara lain	0	0%	0	0%	0	50%	0	100%	0
4.2.8	lembaga keuangan	0	0%	69,217,976	0%	2,078,003	50%	830,365	100%	1,869,367
4.2.9	Lainnya	0	0%	886,430	0%	500,000	50%	10,249,590	100%	10,499,590
5	Liabilitas yang memiliki hubungan ketergantungan dengan aset tertentu		0%		0%		0%		0%	0
6	Liabilitas dan ekuitas lainnya:									9,743,335
6.1	NSFR Liabilitas Derivatif			0			0%			0
6.2	Liabilitas pajak Tangguhan	0	100%	9,358,987	0%	0	50%	0	100%	0
6.3	kepentingan non-pengendali yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal inti utama (Tier 1)	0	100%	0	0%	0	50%	0	100%	0
6.4	Utang tanggal perdagangan (trade date payable)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
6.5	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas, termasuk liabilitas lainnya tanpa jangka waktu	63,099,209	0%	41,824,762	0%	0	50%	9,743,335	100%	9,743,335
7	Total ASF									1,355,934,194

Komponen RSF			Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
			Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
			Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
Aset Pada Neraca											
1	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR										10,458,584
1.1	HQLA Level 1										10,299,032
1.1.1	kas dan setara kas		31,984,262	0%		n.a		n.a		n.a	0
1.1.2	penempatan pada Bank Indonesia		35,437,374	0%	677,613	0%	0	0%	0	0%	0
1.1.3	HQLA Level 1 tidak termasuk aset yang mendapatkan faktor RSF 0%										
1.1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		0	n.a	36,175,775	5%	2,651,224	5%	40,586,638	5%	3,970,682
1.1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset		0	n.a	21,390,000	5%	0	50%	5,258,850	100%	6,328,350
1.2	HQLA Level 2A										154,552
1.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		0	n.a	388,217	15%	127,923	15%	514,205	15%	154,552
1.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset		0	n.a	0	15%	0	50%	0	100%	0
1.3	HQLA Level 2B										5,000
1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		0	n.a	0	50%	0	50%	0	50%	0
1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset		0	n.a	10,000	50%	0	50%	0	100%	5,000
2	Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk aktivitas operasional										21,747,773
2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		42,988,117	50%	507,429	50%	0	50%	0	100%	21,747,773
2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)										
2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		0	50%	0	50%	0	50%	0	100%	0
2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		0	50%	0	50%	0	50%	0	100%	0
2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0
3	Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default)										982,147,347
3.1	Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) yang diberikan kepada:										973,146,841
3.1.1	Lembaga keuangan yang dijamin oleh HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan										2,442
3.1.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		0	n.a	24,422	10%	0	50%	0	100%	2,442
3.1.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)		0		0		0		0		
3.1.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		0	n.a	0	10%	0	50%	0	100%	0
3.1.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		0	n.a	0	50%	0	50%	0	100%	0
3.1.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.2	Lembaga keuangan yang dijamin oleh non-HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan										0
3.1.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		0	n.a	0	15%	0	50%	0	100%	0
3.1.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)		0		0		0		0		
3.1.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		0	n.a	0	15%	0	50%	0	100%	0
3.1.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		0	n.a	0	50%	0	50%	0	100%	0
3.1.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.3	Lembaga keuangan dan tanpa agunan, termasuk penempatan dana (tanpa jangka waktu dan dengan jangka waktu) pada lembaga keuangan lain dan bukan untuk aktivitas operasional										0
3.1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)		0	15%	0	15%	0	50%	0	100%	0

Komponen RSF		Nilai Tertecat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tertecat	Faktor RSF	Nilai Tertecat	Faktor RSF	Nilai Tertecat	Faktor RSF	Nilai Tertecat	Faktor RSF	
3.1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.3.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	15%	0	50%	0	100%	0
3.1.3.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	100%	0
3.1.3.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.4	Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan pinjaman lain , yang diantaranya:									871,900,682
3.1.4.1	dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									0
3.1.4.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.4.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.4.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.4.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.4.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.4.2	dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									871,900,682
3.1.4.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	87,539,240	50%	131,101,450	50%	897,153,338	85%	871,900,682
3.1.4.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.4.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	85%	0
3.1.4.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	85%	0
3.1.4.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.5	Tagihan (termasuk pinjaman) kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun selain surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain									0
3.1.5.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	0	0%	0	50%			0
3.1.5.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0				0
3.1.5.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	0%	0	50%			0
3.1.5.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%			0
3.1.5.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%			0
3.1.6	Tagihan kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain (contoh: surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain)									
3.1.6.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	0	0%	0	5%	0	5%	0
3.1.6.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		
3.1.6.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	0%	0	5%	0	5%	0
3.1.6.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	50%	0
3.1.6.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.7	Kredit beragun rumah tinggal, yang diantaranya :									101,243,717
3.1.7.1	dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									37,380,957
3.1.7.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	7,544,434	50%	11,801,732	50%	42,627,499	65%	37,380,957
3.1.7.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.7.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.7.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.7.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	

[illegible]

NN. Risiko Likuiditas – Aset Terikat (*Encumbrance*) (ENC)

	a	b	c	d
	Aset Terikat (<i>Encumbered</i>)	Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas	Aset tidak terikat (<i>Unencumbered</i>)	Total
Aset-aset dalam laporan posisi keuangan dapat disajikan terperinci sepanjang dibutuhkan	25.145.761.177.300	40.404.372.286.215	217.835.373.667.259	283.385.507.130.774
Analisa Kualitatif				
Sesuai SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Pada tabel di atas disajikan data terkait dengan risiko likuiditas yang dibagi atas beberapa kriteria yakni <u>Aset Terikat, Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Sentral namun belum digunakan untuk likuiditas dan Aset Tidak Terikat</u>. Aset tersebut merupakan asset likuid yang digunakan untuk kebutuhan likuiditas sesuai dengan POJK Nomor 42/POJK.03/2015 perihal Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR). Total Aset yang memenuhi kualifikasi tabel di atas posisi 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp283,39 T. Apabila dilihat dari pembagiannya, maka Nilai Total Aset tersebut terdiri dari : • Aset Terikat sebesar Rp25,15 T atau sebesar 8,87% dari Total Aset Likuid. • Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas sebesar Rp40,40 T atau sebesar 14,26% dari Total Aset Likuid. • Aset Tidak Terikat sebesar Rp217,84 T atau sebesar 76,87% dari Total Aset Likuid.				

Table LIQA – Manajemen Risiko Likuiditas

1. Tata Kelola Risiko
- BRI mengelola risiko likuiditas dalam rangka mitigasi risiko yang dapat muncul dari produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik untuk eksposur risiko saat ini maupun yang akan timbul di masa datang. - Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) terkait risiko likuiditas telah dilakukan sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan. - BRI secara berkala melakukan review terhadap Risk Appetite Statement dan parameter limit terhadap risiko likuiditas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penetapan Taksonomi Risiko dan Parameter & Limit Atas Risk Appetite, Profil Risiko, Rentabilitas & Permodalan dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko dan Profil Risiko Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. - Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Liquidity & Funding Management Group dan Treasury Business Group bertanggung jawab untuk mengelola likuiditas nasional, sedangkan Market, Portfolio & Enterprise Risk Group bertanggung jawab dalam menyusun dan melakukan review kebijakan manajemen risiko likuiditas serta pemantauan secara limit risiko likuiditas.
2. Strategi Pendanaan
Diversifikasi Pendanaan Dilakukan dengan memperhatikan karakteristik sumber dan jangka waktu pendanaan serta Rencana Bisnis Bank (RBB), dengan mempertimbangkan counterparty, kondisi keberadaan jaminan, jenis instrumen, jenis mata uang, serta lokasi geografis pasar sumber pendanaan Stabilisasi Pertumbuhan Dana Merupakan pemeliharaan stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK) agar trend pertumbuhan positif, antara lain melalui strategi pricing, penerbitan dan/atau pengembangan produk simpanan, peningkatan pemasaran berkualitas yang menunjang stabilitas pertumbuhan dana, serta melakukan review kebijakan pengembangan dan pemasaran produk Evaluasi dan Analisis Strategi Pendanaan Kegiatan ini dilakukan secara berkala dalam rapat ALCO / forum lainnya dengan memperhatikan perubahan factor internal maupun eksternal Liquidity & Funding Management Group dan Treasury Business Group bersama-sama dengan groupi terkait melakukan identifikasi, pemantauan, dan evaluasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemampuan BRI dalam memperoleh pendanaan, termasuk alternatif sumber dana yang dapat memperkuat kapasitas untuk bertahan pada kondisi krisis.

- **Memelihara Akses Pasar**

Pemeliharaan akses pasar rupiah dan valuta asing meliputi: memperluas pasar untuk penjualan aset atau meningkatkan jumlah fasilitas siaga dengan/tanpa agunan, aktif bertransaksi di pasar yang sejalan dengan strategi pendanaan, dan memelihara hubungan baik dengan penyedia dana sehingga dapat melakukan diversifikasi sumber dana dengan baik.

3. Proses Manajemen Risiko

- Kegiatan identifikasi risiko likuiditas dilakukan oleh setiap unit kerja operasional dengan melakukan identifikasi terhadap risiko likuiditas yang berasal dari produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif serta risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas (misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional).
- Pengukuran risiko likuiditas antara lain dilakukan secara berkala dengan menggunakan *Dashboard daily liquidity & early warning indicators*, proyeksi arus kas, rasio likuiditas dan *stress testing* likuiditas.
- Pemantauan dan pengendalian hasil pengukuran risiko dilakukan oleh *Liquidity & Funding Management Group* (contoh: pemantauan GWM dan evaluasi pencapaian *cash ratio* nasional secara triwulanan) dan *Market, Portfolio & Enterprise Risk Group* (contoh: *Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio*) untuk memonitor kepatuhan terhadap limit yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan risiko likuiditas disajikan dalam bentuk laporan berkala (*dashboard* Risiko Likuiditas) yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BRI. Terhadap hasil pemantauan yang menunjukkan indikasi risiko likuiditas berpotensi meningkat dilakukan rekomendasi mitigasi eksposur risiko likuiditas serta putusan tindak lanjut pengendaliannya.
- Dilakukan penyusunan *dashboard* profil risiko likuiditas secara berkala atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan strategi bisnis. Teknologi Sistem Informasi yang digunakan untuk menyediakan informasi terkini dan tepat waktu mengenai likuiditas di BRI adalah BI-RTGS, BRINets, BRISIM, *Treasury and Market Risk System*, SKNBI, Swift, serta aplikasi lainnya yang dikembangkan untuk monitoring aset dan kewajiban BRI.

4. Contingency Funding Plan

- *Contingency Funding Plan* (Rencana Pendanaan Darurat) adalah rencana dan strategi dalam menghadapi kondisi krisis yang berdampak pada likuiditas guna memastikan kemampuan BRI memperoleh sumber pendanaan yang dibutuhkan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar.

- *Contingency Funding Plan* telah diatur dan disesuaikan pada Buku 5 Early Warning Indicators dan Contingency Funding Plan sesuai Surat Edaran Manajemen Risiko Likuiditas No SE.68-DIR/MPE/12/2022 yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan CFP, Management Action CFP serta Wewenang dan Tanggung Jawab. Uji Coba CFP dilakukan secara regular minimal 1 tahun sekali yang di koordinatori oleh LFM Group sebagai Sekretaris ALCO.
- Pengujian rencana pendanaan darurat dilakukan dengan metode walk on paper based, dimana seluruh unit kerja terkait dengan pendanaan darurat (Tim Manajemen Krisis Likuiditas) berkumpul untuk menjalankan skenario pengujian di atas kertas tanpa melakukan transaksi di pasar keuangan.
- *Market, Portfolio & Enterprise Risk Group* melakukan monitoring terhadap parameter-parameter dalam Contingency Funding Plan yang tertuang dalam dashboard Early Warning Indicators.

5. Stress Testing Risiko Likuiditas

- Pelaksanaan *stress testing* dilakukan untuk mengukur kemampuan dan ketahanan BRI memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis (*stress condition*).
- *Stress Testing* risiko likuiditas dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan internal BRI dan/atau permintaan regulator. Stress Testing juga dilaporkan secara berkala kepada direksi melalui *Risk Management Commitee (RMC)*.
- Pelaksanaan *stress testing* dilakukan dengan menggunakan skenario-skenario *stress test* yang dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek bisnis dan tingkat risiko yang dikelola oleh BRI.
- Hasil *stress test* menunjukkan implikasi setiap skenario yang digunakan untuk menunjukkan daya tahan likuiditas BRI.

6. Konsentrasi Pendanaan

- BRI telah menetapkan limit parameter *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Rupiah dengan *appetite* limit 94,50% - 96,50% pada profil risiko moderate dan >98,50% pada profil risiko *high*.
- BRI menetapkan limit parameter Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan limit 89,50% - 92,50% pada profil risiko moderate dan >94,00% pada profil risiko *high*.
- Dalam mitigasi risiko konsentrasi, BRI melakukan pemantauan terhadap komposisi deposito inti, rasio pendanaan non inti dan rasio pendanaan non DPK.

7. Maturity Profile

- Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi BRI di masa mendatang diukur melalui *liquidity gap analysis*, yang merupakan proyeksi kelebihan dan kekurangan likuiditas

atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di BRI sekaligus meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

- BRI menetapkan limit maturity profile < 1 tahun (Asset jatuh tempo < 1 tahun/liability jatuh tempo < 1 tahun) dengan limit >86,50% - 73,00% pada profil risiko *moderate* dan <59,50% pada profil risiko *high*.

PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) RISIKO OPERASIONAL

Sesuai dengan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020, Perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar per Januari 2023 sudah diimplementasikan. Berikut merupakan tabel perhitungan ATMR operasional dengan Pendekatan Standar Tahun 2025 sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Individual

No.	Pendekatan Yang Digunakan	Indikator Bisnis (IB)	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	Komponen Kerugian Risiko Operasional (KKRO)	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	ATMR Risiko Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Standar	93.923.043	13.638.456	4.821.510	0.76710712	10.562.157	130.776.963
Total		93.923.043	13.638.456	4.821.510	0.76710712	10.562.157	130.776.963

Ket:

(3), (4), (5), (7), (8) dalam satuan (Rp. Juta)

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Konsolidasi

No.	Pendekatan Yang Digunakan	Indikator Bisnis (IB)	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	Komponen Kerugian Risiko Operasional (KKRO)	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	ATMR Risiko Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Standar	130.991.497	19.198.721	5.439.801	0.73376272	14.087.306	176.087.306
Total		130.991.497	19.198.721	5.439.801	0.73376272	14.087.306	176.087.306

Ket:

(3), (4), (5), (7), (8) dalam satuan (Rp. Juta)

Memperhatikan ketentuan publikasi perhitungan ATMR pada SEOJK tersebut di atas, berikut pengungkapan data kuantitatif yang dipergunakan dalam perhitungan ATMR Risiko Operasional menggunakan Pendekatan Standar:

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Kerugian Risiko Operasional (KRO)

Individual Form D1. Laporan Data Kerugian Historis

(Batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (loss event) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau lebih).
(Rp. Juta)

Tahun Pembukuan Kerugian	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Ratas 10 Tahun
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan (tanpa pengecualian)	775.712,60	150.315,11	235.501	188.957,13	1.317.711,35	357.238,43	84.555,47	46.053,27	41.278,16	17.17,53	321.434,01
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional	30	23	31	26	18	17	12	5	5	11	18
Jumlah kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan kerugian risiko operasional yang dikecualikan	775.712,60	150.315,11	235.501	188.957,13	1.317.711,35	357.238,43	84.555,47	46.053,27	41.278,16	17.17,53	321.434,01

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Kerugian Risiko Operasional (KRO)

Konsolidasi Form D1. Laporan Data Kerugian Historis

(Batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (loss event) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau lebih).

(Rp. Juta)

Tahun Pembukuan Kerugian	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Ratas 10 Tahun
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan (tanpa pengecualian)	778.107,62	208.352,72	258.984,56	474.224,49	1.328.993,23	363.065,09	109.653,72	46.790,25	41.278,16	17.017,53	362.646,74
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional	32	35	35	37	24	25	16	8	5	11	23
Jumlah kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan kerugian risiko operasional yang dikecualikan	778.107,62	208.352,72	258.984,56	474.224,49	1.328.993,23	363.065,09	109.653,72	46.790,25	41.278,16	17.017,53	362.646,74

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Indikator Bisnis (IB)
Individu Form D3. Laporan Rincian Indikator Bisnis

(Rp. Juta)

No.	Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	2025	2024	2023
1	Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)	45.263.085,52		
1.1	Pendapatan Bunga	163,626,472.00	162,321,720.00	147,036,619.00
1.2	Beban Bunga	56,710,855.00	57,367,303.00	43,862,637.00
1.3	Aset Produktif	1,995,284,737.00	1,893,132,061.00	1,887,747,049.00
1.4	Pendapatan Dividen	3,155,538.00	2,574,899.00	95,133.00
2	Komponen Jasa (KJ)	45.038.806,33		
2.1	Pendapatan Jasa dan Komisi	20,662,869.00	20,407,827.00	20,292,184.00
2.2	Beban Jasa dan Komisi	2.00	4.00	-
2.3	Pendapatan operasional lainnya	28,286,308.00	26,149,285.00	19,317,946.00
2.4	Beban operasional lainnya	4,540,525.00	6,719,537.00	5,054,770.00
3	Komponen Keuangan (KK)	3.621.151,33		
3.1	Laba Rugi Bersih Trading Book	4,332,365.00	2,385,394.00	165,364.00
3.1	Laba Rugi Bersih Banking Book	950,851.00	884,221.00	2,145,259.00
4	IB	93.923.043,19		
5	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	13.638.456,47		

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Indikator Bisnis (IB)
Konsolidasi Form D3. Laporan Rincian Indikator Bisnis

(Rp. Juta)

No.	Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	2025	2024	2023
1	Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)	47.517.470		
1.1	Pendapatan Bunga	203,140,879	198,271,440	179,154,986
1.2	Beban Bunga	66,163,582	65,394,717	50,909,627
1.3	Aset Produktif	2,243,276,652	1,975,608,961	1,965,316,665
1.4	Pendapatan Dividen	3,158,396	165,162	84,301
2	Komponen Jasa (KJ)	79.347.045		
2.1	Pendapatan Jasa dan Komisi	22,662,756	21,309,342	21,563,040
2.2	Beban Jasa dan Komisi	134,233	39,348	228,572
2.3	Pendapatan operasional lainnya	96,231,152	46,679,385	29,595,461
2.4	Beban operasional lainnya	70,595,309	26,359,831	16,170,555
3	Komponen Keuangan (KK)	4.126.964		
3.1	Laba Rugi Bersih Trading Book	4,909,695	2,876,351	341,696
3.1	Laba Rugi Bersih Banking Book	996,702	1,005,410	2,251,038
4	IB	130.991.479		
5	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	19.198.721,92		

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – ATMR Risiko Operasional (Individu)
Form D5. Laporan Perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar

(Rp. Juta)

No	Rincian	Nominal
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	13.638.456,48
2	Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI)	0,76710712
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	10.462.157,07
4	ATMR untuk Risiko Operasional	130.776.963,37

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – ATMR Risiko Operasional (Konsolidasi)
Form D5. Laporan Perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar

(Rp. Juta)

No	Rincian	Nominal
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	19.198.721,92
2	Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI)	0,73376272
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	14.087.306,42
4	ATMR untuk Risiko Operasional	176.091.330,24

Risiko Operasional – Pengungkapan Kualitatif Umum

ANALISIS KUALITATIF	
1	Penyusunan kerangka kerja manajemen risiko operasional BRI mengacu pada POJK Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, dan best practices. Dalam ketentuan internal BRI, kerangka kerja tersebut dituangkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) yang diatur dalam SK Direksi No. KU.02-DIR/MPE/04/2024 tanggal 30 April 2024, mengatur prinsip-prinsip kebijakan manajemen risiko Bank. Khusus untuk manajemen risiko operasional, Bank menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (P3MRO) dengan tetap mengacu pada KMR BRI yang diatur dalam Surat Edaran No. SE.58-DIR/ORD/11/2022 tanggal 22 November 2022 dengan cakupan: - Framework manajemen risiko operasional. - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). - Strategi anti fraud. - Fungsi Manajemen Risiko (Fungsi MR) di Unit Kerja. Selain itu, penerapan manajemen risiko operasional juga diatur dalam bentuk Surat Edaran (SE), Surat Keputusan (SK), dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) lainnya, antara lain: a. Surat Edaran No. SE.17-DIR/MOP/03/2020 tentang Perangkat Manajemen Risiko Operasional BRI. b. Surat Edaran No. SE.04-DIR/CTR/01/2023 tentang Corporate Culture yang mencakup Budaya Risiko. c. Surat Edaran No. SE.30-DIR/PPM/11/2024 tentang Pengelolaan Produk yang mencakup Pengelolaan Risiko Penyelenggaraan Produk. d. Surat Edaran No. SE.10-DIR/MPE/08/2025 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang mencakup Perhitungan ATMR Operasional e. Surat Edaran No. SE.12-DIR/MPE/12/2023 tentang Manajemen Kelangsungan Usaha yang mencakup Business Continuity Management (BCM). f. SOP No. SO.36-ORD/12/2024 tentang SOP Regional Risk Management. g. SOP No. SO.0-ORD/03/2025 tentang Pengelolaan Kelangsungan Usaha. h. SOP No. SO. 31-ORD/12/2024 tentang SOP Strategi Anti Fraud yang mencakup Modul 1 tentang Dashboard e-KYE (Know Your Employee) dan Modul 2 tentang Identifikasi Kerawanan

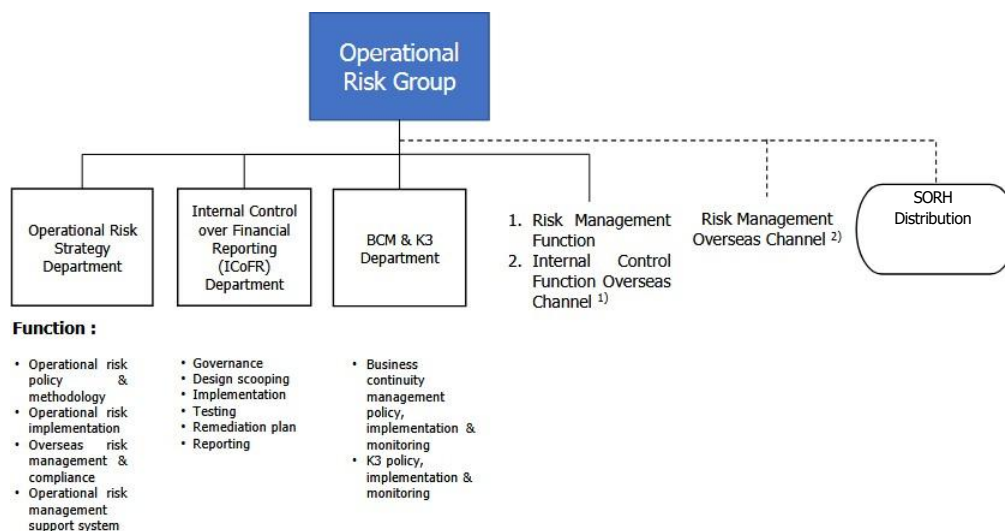
- 2 Operational Risk Group fokus pengelolaan risiko bidang operasional yang mencakup penyusunan kebijakan, pengembangan, dan implementasi framework manajemen risiko operasional, penyusunan kebijakan dan implementasi Business Continuity Management (BCM) serta SMK3.

BRI melakukan penguatan implementasi dan integrasi manajemen risiko operasional dengan pembentukan organisasi Senior Operational Risk Head (SORH) di jajaran first line pada Triwulan II – 2025 yang terdiri dari SORH Distribution, SORH Information Technology, SORH Procurement dan SORH Corporate Center. SORH berfungsi sebagai control tower yang menjaga kualitas portofolio seluruh risiko perusahaan di tingkat Head Office pada Group di Direktorat yang menjadi bidangnya dan dipimpin oleh Pejabat setingkat Executive Vice President (EVP) yang disebut dengan SORH.

SORH Distribution mengelola fungsi manajemen risiko di Kantor Pusat pada Direktorat Network dan Retail Funding serta Regional Operational Risk & Compliance (ORC) yang berkedudukan di Regional Office mensupervisi Micro & Retail Risk & Compliance (MRR) yang berkedudukan di Kantor Cabang dan mensupervisi Unit kerja Retail dan Mikro.

BRI memandang pentingnya diterapkan pengendalian internal atas laporan keuangan (Internal Control over Financial Reporting) untuk mendukung integritas dan keandalan proses pelaporan keuangan kepada pihak eksternal serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku umum. Implementasi ICOFR di BRI dibagi menjadi 4 fase dan di mulai pada tahun 2021. Saat ini BRI mengimplementasikan ICOFR pada fase 3.5 dengan ruang lingkup Kredit Mikro, Kredit Ritel & Menengah, Customer Deposit, Financial Reporting, Kredit Konsumer, Kredit Korporasi, Treasury, Trade Finance dan Fixed Asset. Dalam mengimplementasikan ICOFR, BRI mengacu ke POJK No 15 tahun 2024 dan Juknis ICOFR dari KBUMN SK-5/DKU.MBU/11/2024.

Adapun struktur organisasi Operational Risk Group saat ini sebagai berikut :



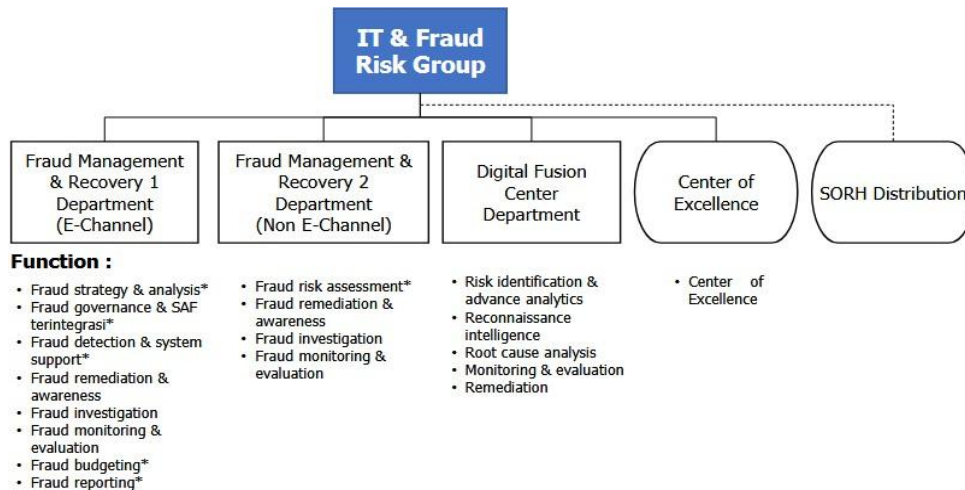
Keterangan :

- 1) Risk Management dan Internal Control Function di Unit Kerja Luar Negeri yang memiliki garis supervisi dengan Operational Risk Group
2) Risk Management di Unit Kerja Luar Negeri yang memiliki garis koordinasi dengan Operational Risk Group

Selain itu, untuk penguatan pelaksanaan GCG dan penerapan POJK No.12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan, serta penguatan dalam fungsi pengelolaan fraud, maka sesuai SK Direksi No. 2989-DIR/PPM/06/2025 tanggal 24 Juni 2025, BRI membentuk IT & Fraud Risk Management Group yang mempunyai tugas menyusun

kebijakan strategi anti fraud, memastikan penerapan strategi anti fraud yang meliputi pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dengan tujuan untuk mencegah risiko kejadian fraud dan melakukan upaya recovery atas kerugian fraud.

Adapun struktur organisasi IT & Fraud Risk saat ini sebagai berikut :



*) untuk ruang lingkup seluruh fraud

Dalam rangka implementasi Three Lines Model, bentuk kolaborasi dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) selaku third line model mempunyai arti penting dalam penerapan manajemen risiko operasional. SKAI berfungsi sebagai enabler yang bertugas melakukan assurance dalam penerapan manajemen risiko. Selanjutnya, SKMRO sebagai second line juga diminta untuk memberikan sumber data dan informasi berupa peta risiko untuk membantu SKAI dalam melaksanakan risk based audit.

3	Penjelasan sistem pengukuran untuk risiko operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung risiko operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk risiko operasional). Sehubungan dengan kewajiban Bank memperkirakan beban modal untuk risiko operasional melalui perhitungan ATMR Risiko Operasional menggunakan Pendekatan Standar sesuai dengan SEOJK No.6/SEOJK.03/2020, BRI melaksanakan pengukuran dan perhitungan risiko operasional yang menjadi bagian dari proses manajemen risiko operasional, yaitu identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan. Proses manajemen risiko operasional dijalankan sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan dalam framework manajemen risiko operasional dan menggunakan perangkat sesuai dengan ketentuan regulator serta best practices. Proses pengukuran dan perhitungan risiko operasional dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut: Penilaian Risk and Control Self Assessment (RCSA) RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (impact) dan kemungkinan kejadian (likelihood), RCSA di BRI telah diterapkan di Kantor Pusat BRI, Regional Office, Kantor Cabang Khusus, UKLN, Regional Audit Internal, Regional Campus, Kantor Cabang yang juga mewakili BRI Unit, Kantor Cabang Pembantu dan Sentra Layanan BRI Prioritas. RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independen risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan. Pengkajian risk issue dan control pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis, perubahan ketentuan internal/eksternal, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Penilaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data Loss Event Database (LED), Key Risk Indicator (KRI) dan Laporan Hasil Audit (LHA). RCSA dilaksanakan secara periodik setiap semester, dan frekuensinya akan ditingkatkan apabila terjadi perubahan eksposur risiko yang signifikan. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk Bank Baru (PBB) Penerapan proses manajemen risiko atas setiap rencana penerbitan PBB di BRI dilakukan melalui pelaksanaan Risk Self Assessment PBB oleh Product Owner dan dimintakan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PBB kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk kemudian direkomendasikan kepada Direktur Manajemen Risiko BRI dalam rangka mendapatkan persetujuan. Pencatatan Kerugian Risiko Operasional pada Loss Event Database (LED) LED BRI mencakup proses pencatatan data kejadian kerugian yang dilakukan untuk setiap jenis kerugian finansial maupun non finansial yang meliputi actual loss, potential loss termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan. Berdasarkan data kejadian kerugian pada LED, dapat dilakukan analisa kejadian kerugian berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional, kategori kejadian (event type) dan lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah preventif pengendalian risiko berbasis pendokumentasian proses penanganan/penyelesaian insiden baik dari sisi non finansial, kerugian finansial dan recovery kerugian maupun proses litigasi.
---	---

	Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, BRI telah menerapkan Pengukuran Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) Pendekatan Standar yang berpedoman pada Basel III Framework. Ketentuan ATMR Risiko Operasional dengan pendekatan standar diatur melalui Surat Edaran Direksi No. SE.66-DIR/MPE/12/2022 Buku 2 tentang Perhitungan ATMR Operasional. d. Pemantauan Key Risk Indicator (KRI) KRI adalah perangkat Manajemen Risiko yang berupa indikator kuantitatif yang dapat memberikan informasi secara dini terhadap peningkatan atau penurunan risiko dan atau penurunan efektivitas kontrol terhadap limit threshold yang telah ditentukan. KRI dapat bersifat leading maupun lagging. Pemantauan risiko melalui KRI bertujuan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait pengendalian risiko sehingga dapat mencegah atau meminimalisir dampak kerugian. BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau limit risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (risk appetite) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (threshold) KRI dilakukan dengan menggunakan best judgement dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan risk appetite BRI. Penentuan threshold melibatkan audit internal, risk owner dan unit kerja terkait lainnya. KRI BRI antara lain tercermin dalam laporan profil risiko bankwide dan profil risiko regional office yang di-monitor secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan. e. Risk Assessment Plan (RAP) RAP merupakan bentuk aktivitas penyusunan risk strategy yang dilakukan oleh Regional Operational Risk & Compliance dengan output berupa daftar risiko utama, prioritas Unit Kerja berdasarkan risiko dan rencana kegiatan pengawalan risiko. f. Penilaian Risiko Ancaman Bencana (PRAB) BRI melaksanakan PRAB sebagai implementasi dari Business Continuity Management (BCM) guna mengidentifikasi ancaman gangguan/bencana baik internal maupun eksternal berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya ancaman tersebut serta pengendalian / kontrol yang dilakukan untuk mengurangi dampak gangguan/bencana. PRAB bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Sebagai salah satu implementasi BCM BRI telah memiliki pedoman Emergency Response Plan (ER Plan) dan kebijakan Business Continuity Plan (BC Plan) untuk Unit Kerja Kritis. g. Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Identifikasi kelemahan pengendalian internal (internal control) dapat dilakukan melalui walkthrough proses bisnis, test of design (ToD) oleh Tim ICoFR dan ToD serta test of operating effectiveness oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), maupun monitoring rutin yang dilakukan oleh setiap unit bisnis (Control Self Assessment yang dilakukan setiap enam bulan sekali) yang telah ditetapkan oleh control owner. Identifikasi Kelemahan Pengendalian Internal dibagi menjadi: i. Identifikasi Kelemahan Pengendalian Internal Sebagai Design Deficiency Design deficiency berarti menunjukkan bahwa desain pengendalian internal saat ini tidak memadai, atau tidak dapat memitigasi risiko asersi laporan keuangan yang relevan, sehingga dapat berpotensi terjadinya risiko salah saji atas laporan keuangan perusahaan. ii. Identifikasi Kelemahan Pengendalian Internal Sebagai Operating Deficiency Operating deficiency berarti menunjukkan bahwa praktik atau pelaksanaan atas aktivitas kontrol tidak dilakukan sesuai dengan desainnya, sehingga berpotensi terjadinya risiko salah saji atas laporan keuangan perusahaan.
--	--

4	Pengelolaan risiko operasional dilaporkan secara berkala kepada manajemen, pemimpin unit kerja, dan pihak lain yang berkepentingan sebagai alat monitoring. Operational Risk Group menyampaikan laporan risiko operasional baik yang bersifat mandatory maupun kepentingan laporan internal. Adapun ruang lingkup dan bentuk laporan pengelolaan risiko operasional, antara lain: Profil Risiko Operasional Bank Profil risiko operasional Bank disampaikan kepada Regulator, Direksi, dan Komisaris secara triwulanan yang dikoordinasikan oleh MPE Group. Profil risiko operasional tersebut mencakup parameter-parameter risiko yang menjadi fokus pemantauan eksposur risiko operasional Bank. Laporan profil risiko operasional Bank juga disampaikan pada Risk Management Committee (RMC) dan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR). Profil Risiko Regional Profil risiko regional berisi parameter dari 7 (tujuh) jenis risiko, salah satunya adalah risiko operasional. Penyusunan profil risiko operasional tersebut dikoordinasikan oleh RRM dan disampaikan kepada Regional Chief Executive Officer (RCEO) melalui forum Governance, Risk, and Compliance (GRC) setiap bulan. Operational Risk News (OPEN) OPEN disampaikan kepada Direksi dan Komisaris secara bulanan. Ruang lingkup OPEN yaitu laporan profil risiko operasional, pencapaian risk appetite statement (RAS), kejadian human error dan kejadian fraud, serta perbaikan kontrol yang dilaksanakan, kegiatan forum manajemen risiko, aktivitas BCM dan K3, aktivitas regional risk management, risk assessment atas Produk Bank Baru (PBB), RRM SMART, dan informasi kejadian eksternal. Laporan analisa risiko MRR Laporan analisa risiko MRR memuat daftar kelemahan kontrol yang masih terjadi di Unit Kerja sesuai hasil verification yang dilakukan oleh MRR. Laporan ini disampaikan oleh MRR kepada Pemimpin Unit Kerja yang diselenggarakan di Forum MR Unit Kerja setiap bulan. Selain itu, atas hasil verification MRR dengan indikasi fraud, laporan disampaikan RCEO dan Operational Risk Group untuk ditindaklanjuti oleh IT & Fraud Risk Group.
5	Proses mitigasi risiko merupakan bagian dari proses manajemen risiko yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan dalam rangka mencegah kejadian risiko dan meminimalkan dampak risiko. Langkah-langkah mitigasi risiko disesuaikan dengan hasil analisa terhadap penyebab kejadian atau potensi risiko. Sesuai dengan hal tersebut, maka mitigasi risiko secara umum dikelompokkan dalam 3 (tiga) sub, yaitu: People Mitigasi pada aspek people dilakukan dari sisi kuantitas maupun kualitas, antara lain: - Menetapkan dan mereviu kebutuhan formasi pekerja untuk melaksanakan proses bisnis di Unit Kerja. - Menetapkan persyaratan, mekanisme, serta background checking dalam proses rekrutmen pekerja. - Melakukan pemenuhan formasi pekerja di Unit Kerja. - Meningkatkan kapabilitas pekerja antara lain dengan cara: - Pendidikan dan pelatihan pekerja sesuai dengan level jabatan. - Mereviu kurikulum dan metode pendidikan. - Memberikan sertifikasi untuk pekerja dengan spesialis tertentu. - Mendorong implementasi budaya risiko melalui program-program internalisasi budaya risiko, antara lain: - Culture Activation Program (CAP). Setiap unit kerja telah menetapkan CAP untuk membentuk perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai KPI secara prudent melalui aktivitas yang telah ditetapkan pada CAP. - Membangun Risk Awareness Pekerja di Unit Kerja. SKMR secara rutin menyampaikan media risk awareness baik dalam bentuk

	surat, media infografis, webinar, podcast, e-learning, akun media sosial resmi Bank dan email/WA/sms blast. - Empowering Risk Officer. Diperlukan keterlibatan Risk Officer sebagai Tim Penggerak Transformasi dalam menginternalisasi dan memastikan penerapan budaya risiko telah terlaksana. Sehingga dilakukan penguatan fungsi MR melalui penyesuaian operasional prosedur serta upgrading pengetahuan dan technical skills melalui pendidikan/sosialisasi. - Early Detection. Penerapan budaya risiko perlu didukung oleh tools Early Warning System yang dapat membantu memitigasi maupun mengoreksi kejadian risiko secara lebih dini. - Business Process Review. Aktivitas budaya risiko tercermin melalui pelaksanaan operasional prosedur perbankan secara harian. Sehingga diperlukan reviu kecukupan kontrol atas operasional prosedur tersebut. b. Process Mitigasi risiko pada aspek process, yaitu: • Menyusun kebijakan dan standar prosedur operasional (SOP) untuk setiap produk dan aktivitas Bank yang didalamnya memuat business proses, internal control, dan tugas dan tanggung jawab pekerja sebagai maker, checker, signer. Setiap draft kebijakan dan SOP sebelum dilakukan pengesahan wajib mendapatkan penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). • Mitigasi risiko juga dilakukan dengan cara transfer risiko kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi yang menanggung kerugian Bank atau kepada pihak penyedia jasa tenaga kerja yang tentunya telah mempertimbangkan azas bonafiditas dan integritas dari penyedia jasa tersebut yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) di setiap kerjasama dengan pihak ketiga. c. Technology Pada prinsipnya pengendalian risiko digital erat kaitannya dengan upaya Bank untuk mengamankan aset yang dimiliki, termasuk memberikan perlindungan terhadap data/informasi nasabah. Pengelolaan risiko digital pada aktivitas pengelolaan TI/layanan TI meliputi, namun tidak terbatas pada: • Pengembangan, pembaharuan, dan penghapusan layanan perbankan elektronik/digital. • Pengembangan, pembaharuan, dan penghapusan infrastruktur (computing, network, satellite) dan sekuriti TI. • Pengembangan, pembaharuan, dan penghapusan layanan internal Bank. • Pengadaan penyedia jasa TI. • Penyedia jasa TI oleh Bank. • Aktivitas operasional TI. • Pengembangan dan/atau reviu rules Fraud Detection System (FDS). Selanjutnya untuk penguatan kontrol risiko digital, setiap pengembangan aplikasi didampingi oleh Digital Risk Group.
--	--

NARASI KPMR

TW IV Tahun 2025

Risiko Hukum

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum adalah **Satisfactory**

1) Tata Kelola Risiko Hukum Melalui Organisasi Manajemen Risiko Hukum

- a) Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) terkait risiko hukum sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan.
- b) Review terhadap risk appetite statement dan parameter limit terhadap risiko untuk level korporasi (bank wide) telah ditetapkan dalam Surat Edaran tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- c) Budaya manajemen risiko hukum diinternalisasi dengan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Wilayah beserta Uker binaan, dimana legal officer Kanwil mengkoordinasikan risiko hukum yang terdapat di masing-masing wilayah binaannya.
- d) Komite di bawah Dewan Komisaris telah mengadakan pertemuan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Adapun pertemuan untuk membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 21 Januari 2025 membahas Profil Risiko Triwulan IV – 2024 dan Tingkat Kesehatan Berbasis Risiko Semester II – 2024.
 2. Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 29 April 2025 membahas Profil Risiko Triwulan I – 2025.
 3. Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 22 Juli 2025 membahas Profil Risiko Triwulan II – 2025.
 4. Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 20 Oktober 2025 membahas Profil Risiko Triwulan III – 2025.

(sumber: Surat Market and Portofolio Enterprise Risk Group)

5. Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai dengan dilaksanakannya forum-forum yang dilakukan secara berkala. Forum tersebut antara lain adalah Risk Management Committee. Pembahasan di dalamnya termasuk membahas profil risiko hukum dan risk issue bidang hukum.

2) Kerangka Manajemen Risiko

- a) Tersedia fungsi manajemen risiko hukum bersifat independen, dengan adanya Legal Officer di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat serta Associate Legal Officer di masing-masing Kantor Wilayah.
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi manajemen risiko hukum diantaranya adalah penyampaian advis hukum, pemberian bantuan penanganan perkara dan pembinaan ke Unit Kerja binaan baik yang dilakukan oleh Legal

Group maupun seluruh Legal Officer Regional Office Selindo.

- c) Monitoring penanganan perkara, termasuk penggunaan biaya perkara yang dilakukan melalui laporan perkara yang disampaikan kepada Head Office setiap bulan oleh Regional Legal Team di Regional Office.
- d) Kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan risiko hukum antara lain:
 - 1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR)
 - 2. Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko
 - 3. Kebijakan tentang penulisan komparasi Dasar Pendirian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
 - 4. Kebijakan tentang Surat Kuasa Notaril Direksi BRI kepada Pinwil BRI atau Pemangku Jabatan Pinwil BRI atau Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pinwil
 - 5. Kebijakan tentang Surat Kuasa Notaril Direksi BRI kepada Pinca BRI atau Pemangku Jabatan Pinca BRI atau Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pinca
 - 6. Kebijakan tentang laporan adanya perkara/sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan/ lembaga di luar pengadilan
 - 7. Kebijakan tentang Penanganan Permasalahan Hukum
 - 8. Buku saku hukum bidang Perkreditan, Operasional, Agunan, Treasury, Bisnis Internasional dan Investment Services
 - 9. Surat-surat mengenai mekanisme pengendalian risiko hukum yang disampaikan kepada Unit Kerja terkait
 - 10. Legal Manual bidang perkreditan, Legal Manual Bidang Operasional, Legal Manual Penanganan Perkara (Perdata, Pidana), Legal Manual Permasalahan Hukum, Legal Manual Internasional, Treasury & Investment Services, Legal Manual Kepailitan & PKPU, Legal Manual Kegiatan Usaha, Legal Manual Pedoman
 - 11. Proses penyusunan ketentuan-ketentuan baru mengenai pengendalian risiko hukum, antara lain: SE Tata Kelola Laporan Penanganan Perkara, Gap Analysis Taksonomi Hak Kekayaan Intelektual, SE Kewenangan Menindaklanjuti Fraud Melalui Saluran Hukum di Unit Kerja BRI, SE Penanganan Permasalahan Hukum dan Pelindungan Hukum, dan Manual Group Hukum.

3) Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Penilaian Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum

- a) Proses manajemen risiko hukum telah mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Proses manajemen risiko hukum tersebut dilakukan unit kerja dan dikonsolidasikan oleh Legal Group selaku koordinator dari risiko hukum, diantaranya:
 - 1. Melaksanakan pembinaan/penyuluhan hukum baik regular maupun tematik kepada unit-unit kerja BRI secara berkala sesuai jadwal dan target yang ditetapkan melalui media online meeting.
 - 2. Melaksanakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan baik yang baru maupun yang sudah berlaku dan peristiwa-peristiwa hukum aktual yang terjadi di lapangan melalui surat selindo yang ditujukan kepada seluruh Unit Kerja BRI Selindo.
 - 3. Membuat/merevisi ketentuan/pedoman berimplikasi hukum dan membuat kompilasi SK/SE/Surat Selindo yang dikeluarkan oleh Legal Group.

4. Membuat surat risk awareness atas risiko hukum yang disampaikan kepada Unit Kerja terkait.
 5. Meningkatkan pengetahuan bidang hukum bagi pekerja BRI melalui pembuatan pedoman-pedoman berupa buku saku hukum bidang operasional, buku saku hukum bidang perkreditan dan pembuatan PKS & MoU, pembinaan dan penyuluhan hukum.
 6. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan Regional Office.
 7. Melakukan kegiatan pendampingan kepada seluruh jajaran unit kerja BRI.
 8. Memberikan/ menghadiri penanganan permasalahan hukum bagi BRI di pengadilan (saluran hukum) maupun di luar pengadilan.
 9. Berkoordinasi dengan pihak ketiga: Pengacara, Kepolisian, Kejaksaan, BPN dalam rangka penanganan permasalahan hukum.
 10. Meminta Second Opinion kepada konsultan hukum yang kompeten apabila diperlukan.
 11. Menyelenggarakan penyuluhan hukum terhadap permasalahan hukum yang actual untuk meningkatkan pemahaman aspek hukum.
 12. Penyampaian sharing materi hukum yang update melalui media komunikasi visual seperti infografis, dsb.
 13. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang merupakan program Sinergi Legal BRI Group.
 14. Melaksanakan Workshop, In House Training, Diskusi, dll untuk terus memperbaharui Pengetahuan Hukum pekerja BRI dengan narasumber eksternal yang expert di bidangnya.
- b) Legal Group BRI memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara kualitas memadai dan mampu mengelola risiko hukum melalui penanganan perkara-perkara Hukum dan pemberian advis/opini hukum. Setiap pekerja memiliki latar belakang Pendidikan Ilmu Hukum yang dilengkapi dengan pendidikan dasar hukum acara (dhi. Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan pengembangan keterampilan bidang hukum melalui kegiatan pelatihan, seminar, In House Training, sertifikasi bidang hukum, dan kuliah umum dengan narasumber/ahli yang memiliki kompetensi pada masing-masing kompetensi bidang hukum yang diajarkan.
- c) Untuk mendukung monitoring pelaksanaan gugatan sederhana gugatan sederhana telah diimplementasikan menggunakan aplikasi OSGS berikut rencana enhancement untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih baik.
- d) Untuk mendukung pengelolaan risiko hukum, Legal Group secara proaktif melakukan koordinasi dengan Lembaga penegak hukum secara berkala maupun insidentil sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Dari sisi tata kelola kebijakan, Legal Group secara berkala melakukan pengkajian terhadap regulasi dan ketentuan hukum yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis BRI. Dari sisi stakeholder Legal Group secara berkala melakukan kegiatan bersama dengan Legal Compliance Perusahaan anak sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan legal awareness dan mitigasi risiko hukum. Dari sisi improvement business process, Legal Group berkoordinasi dengan Group

terkait telah mengembangkan aplikasi DELEGASI (Data dan Informasi Legal Terintegrasi) untuk melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan penanganan perkara yang dilakukan oleh Legal Group.

4) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

Pelaksanaan kaji ulang independen (independent review) oleh satuan kerja audit internal dilakukan secara berkala terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko hukum telah dilaksanakan secara Triwulanan.

Risiko Reputasi - Pengungkapan Kualitatif Umum

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah **Satisfactory**

1) Tata Kelola Risiko

- a) Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) terkait risiko reputasi telah memadai serta sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis BRI secara keseluruhan.
- b) Review terhadap Risk Appetite Statement dan parameter limit risiko untuk level korporasi (bank wide) telah ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor SE.18-DIR/MPE/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko dan Risk Maturity Assessment.
- c) Budaya manajemen risiko reputasi BRI secara berkala diinternalisasi melalui berbagai media komunikasi seperti aplikasi digital office, social media, dll. Selain itu, Regional Office memiliki unit kerja yang berfungsi mengelola risiko reputasi yaitu Bagian Operasional, Jaringan, Layanan dan Performance Management, serta Bagian Logistik dan Umum.
- d) Dewan Komisaris memiliki Komite Pemantau Manajemen Risiko yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- e) Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi secara umum memadai dengan terselenggaranya forum bersama secara berkala. Forum tersebut antara lain Risk Management Committee. Profil risiko reputasi dan risk issue terkait risiko reputasi merupakan materi yang rutin dibahas dalam forum tersebut.
- f) Sebagai bentuk dasar ketentuan dalam Pengelolaan Komunikasi di BRI, maka CSC Group sebagai Koordinator bersama Unit Kerja lainnya sebagai Kontributor (Branding & Marketing Communication Group, Customer Experience Group, Human Capital Strategy & Policy Group, Subsidiary Management Group, Culture Transformation Group, dan Investor Relation Group) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE. 17-DIR/CSC/07/2024 Tanggal 31 Juli 2024 tentang Komunikasi.

2) Kerangka Manajemen Risiko

- a) Strategi manajemen risiko reputasi searah dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sesuai dengan RBB 2025-2027. Strategi dalam menjaga risiko reputasi BRI diantaranya:
 - i. Melakukan monitoring atas pemberitaan negatif untuk menentukan rekomendasi strategi tindak lanjut tepat.
 - ii. Mengelola media sosial X dan Instagram untuk memberikan tanggapan atas komentar pengguna medsos yang dianggap valid.
 - iii. Melakukan sinergi pengelolaan komunikasi BRI Group bersama dengan perusahaan-perusahaan Anak.
 - iv. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan media diantaranya dengan rutin menyelenggarakan Pemred Gathering.
 - v. Melakukan survey Corporate Image.
- b) Terdapat unit kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola nasabah dan para stakeholder lain dalam rangka mengendalikan risiko reputasi. Peran utama public relation BRI harus memadai dalam penanganan publikasi negatif, baik yang berskala lokal maupun nasional.
- c) Dalam rangka pengendalian risiko reputasi di masa depan, tindakan pencegahan dan pemulihan risiko reputasi antara lain dilakukan dengan penerbitan Top Risk Issue secara triwulanan, untuk meningkatkan risk awareness.
- d) Kecukupan perangkat organisasi ditetapkan secara struktural. Sesuai Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE. 17-DIR/CSC/07/2024 Tanggal 31 Juli 2024 tentang Komunikasi, bahwa juru bicara (spokeperson) yang ditunjuk untuk mewakili BRI ditetapkan sebagai berikut:
 - i. Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama;
 - ii. Direksi/Direktur Bidang/SEVP;
 - iii. Group Head Corporate Secretary;
 - iv. Department Head Corporate Communication Department – Corporate Secretary Group;
 - v. Chief Economist;
 - vi. Group/Desk Head di Kantor Pusat;
 - vii. Regional Chief Executive Officer;
 - viii. Pemimpin Cabang/Branch Manager; dan
 - ix. Overseas Branch Manager (Pemimpin Unit Kerja Luar Negeri)

Selain itu, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: 5581-DIR/PPM/11/2025 tanggal 05 November 2025 Tentang Organisasi, Formasi Jabatan dan Deskripsi Jabatan Corporate Secretary Group, Corporate Communication Departement bertanggung jawab pula terhadap aktivitas kehumasan, termasuk namun terbatas pada:

- i. Mengelola fungsi penyusunan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan strategi komunikasi Perusahaan;
 - ii. Mengelola fungsi membina hubungan baik dengan media cetak dan media elektronik, Lembaga/instansi/institusi maupun pihak eksternal lainnya;
 - iii. Mengelola fungsi (early warning system dan koordinasi) manajemen krisis komunikasi terkait reputasi Perusahaan;
 - iv. Mengelola fungsi penyediaan materi komunikasi terkait Perusahaan serta penyusunan dan analisis konsep jawaban/tanggapan/naskah berkaitan dengan isu Perusahaan yang muncul di media massa;
 - v. Mengelola fungsi publikasi laporan keuangan dan informasi/laporan penting lainnya di media cetak, media elektronik dan website Perusahaan sesuai ketentuan dan target;
 - vi. Mengelola fungsi pengelolaan website, media social Perusahaan -;
 - vii. Mengelola fungsi penyusunan dan publikasi Buku mengenai BRI dan Group;
 - viii. Mengelola fungsi riset dan analisis komunikasi Perusahaan.
 - ix. Mengelola fungsi pengelolaan Museum BRI Purwokerto sebagai corporate image BRI dan sarana komunikasi dengan pihak terkait;
 - x. Mengelola fungsi pengelolaan manajemen risiko.
- e) BRI telah memiliki kebijakan, prosedur dan limit risiko reputasi diantaranya melalui:
- i. Surat Edaran Nomor SE. 18-DIR/MPE/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko dan Risk Maturity Assessment.
 - ii. Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE. 17-DIR/CSC/07/2024 Tanggal 31 Juli 2024 tentang Komunikasi.
 - iii. Surat Edaran Direksi BRI Nomor: 09.c-DIR/KEP/03/2023 tanggal 31 Desember 2024 tentang Corporate Governance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - iv. Upaya sosialisasi risk awareness hingga penerapan praktik GCG dikomunikasikan melalui media sosial & press release untuk memitigasi risiko reputasi yang muncul telah dilakukan.
 - v. Pembentukan social media troopers dan peningkatan corporate image BRI memanfaatkan media sosial.
 - vi. Koordinasi dengan unit kerja untuk penyusunan standby statement oleh Corporate Secretary Group dalam menghadapi insiden yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi.

3) Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen

- a) Proses manajemen risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko reputasi, meliputi:
- i. Kegiatan identifikasi risiko reputasi secara berkala oleh Corporate Secretary Group dengan melihat jumlah pemberitaan negatif terhadap BRI, jumlah keluhan nasabah di media massa, baik cetak maupun elektronik, call center dan rating perusahaan.
 - ii. Pengukuran risiko reputasi menggunakan perangkat profil risiko yang dilakukan secara bulanan. Pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang berpotensi negatif ditindaklanjuti oleh beberapa Group diantaranya yaitu Corporate Secretary Group dan Customer Experience Group, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.
 - iii. Penerbitan ketentuan yang mengatur etika berkomunikasi di media sosial untuk Pekerja BRI.
 - iv. Pengukuran risiko reputasi untuk memperkirakan tingkat kerawanan (vulnerabilities) risiko reputasi yang dihadapi BRI. Setelah proses identifikasi, pengukuran risiko reputasi untuk menilai kategori risiko reputasi menggunakan beberapa parameter sesuai dengan limit yang ditetapkan dalam Laporan Profil Risiko Reputasi.
 - v. Pemantauan risiko oleh Corporate Secretary Group dilakukan secara berkala terhadap jumlah keluhan dan pemberitaan negatif di media massa dan menuangkannya dalam Laporan Profil Risiko Reputasi.
 - vi. Pemantauan risiko reputasi di Regional Office oleh Bagian OSE – Seksi Layanan dan Operasional dilakukan secara berkala setiap tahun terhadap kualitas layanan di Branch

	Office, KCP dan BRI Unit binaan masing-masing . Selain itu, dilakukan pelaporan secara triwulanan mengenai kompilasi laporan penanganan pengaduan nasabah pada LKPBU.
	vii. Pengendalian risiko reputasi BRI dengan penerbitan kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, serta koordinasi antara Corporate Secretary Group , Customer Experience Group dan unit kerja terkait penyelesaian pemberitaan negatif dan keluhan nasabah sesuai SLA yang telah ditetapkan.
	b) Kecukupan sistem informasi manajemen risiko reputasi telah tersedia secara berkala atau sesuai kebutuhan perusahaan. Dalam hal ini, Branch Office, KCP dan Kantor Kas BRI wajib menggunakan aplikasi CHS (Complain Handling System) untuk melakukan eskalasi laporan/pengaduan nasabah ke Kantor Pusat.
	c) Formasi Pekerja terpenuhi dan secara rutin dilakukan pendidikan sesuai kompetensi untuk mendukung efektifitas pengelolaan risiko reputasi. Hal tersebut meliputi staf Corporate Communication Department – Corporate Secretary Group untuk Kantor Pusat dan Service Ambassador (SA) di setiap Regional Office yang melakukan eskalasi kepada Customer Experience Group Kantor Pusat. Namun untuk fungsi kehumasan di Regional Office belum terakomodir dengan cukup.
	d) Terdapat aplikasi BRlpedia yang dapat dipergunakan dalam rangka melakukan pencarian ketentuan internal BRI.
	e) Terdapat Infographic Transformasi Budaya Customer Centric dalam rangka pemahaman seluruh Pekerja BRI terkait transformasi budaya kerja.
	f) Terdapat imbauan terkait larangan memberikan cendera mata/buah tangan/souvenir.
4)	Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko
	a) Audit Intern melakukan evaluasi dan menilai kecukupan pelaksanaan manajemen risiko reputasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan evaluasi dan menilai kecukupan sistem pengendalian intern atas manajemen risiko reputasi.
	b) Pelaksanaan audit wajib dilakukan secara berkala berdasarkan prosedur yang berlaku. Setiap kaji ulang independen harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan memadai.
	Terhadap hasil self assessment, risiko inheren reputasi berada pada peringkat risiko <i>low</i> . Sedangkan dalam pelaksanaan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko reputasi, sangat memadai (<i>strong</i>).

A. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan di BRI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Cakupan tugas dan tanggung jawab terkait fungsi kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi BRI.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan sebagai sistem ketentuan dan pedoman internal BRI.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BRI.
6. Melaksanakan sistem pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRI tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Kepatuhan didukung oleh Compliance Group yang merupakan organisasi Satuan Kerja Kepatuhan yang terpisah dari fungsi bisnis, operasional, maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI. Jajaran kepatuhan harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari unit kerja lain, bebas dari benturan kepentingan, serta bertindak profesional dan objektif.

Compliance Group merupakan organisasi yang independen. Fungsi manajemen risiko kepatuhan telah tertuang dalam Tugas dan Tanggung Jawab satuan kerja kepatuhan dalam Surat Keputusan Nokep: 3026-DIR/PPM/06/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Organisasi, Formasi Jabatan dan Deskripsi Jabatan Compliance Group PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Compliance Group melaksanakan fungsi kepatuhan di bidang Compliance, Good Corporate Governance, dan Integrated Governance. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Tata Kelola Perusahaan
2. Kebijakan tentang Good Corporate Governance (GCG).
3. Kebijakan Kode Etik BRI.
4. Kebijakan Whistleblowing System (WBS).
5. Kebijakan tentang Benturan Kepentingan.
6. Kebijakan tentang Pengujian Kepatuhan dan Analisa Dampak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
7. Surat Edaran tentang Budaya Kepatuhan BRI.
8. Pedoman Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi.
9. Pedoman Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI.

B. Strategi dan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan

Strategi penerapan manajemen risiko kepatuhan di BRI dilaksanakan melalui penguatan Sumber Daya Manusia, infrastruktur Sistem Informasi yang andal, serta proses manajemen risiko kepatuhan yang menyeluruh.

1. Penguatan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang dibekali dengan pengembangan kompetensi yang memadai serta memiliki latar belakang pendidikan dan sertifikasi yang sesuai dengan level jabatan. Sepanjang tahun 2025, pekerja di jajaran satuan

kerja kepatuhan secara reguler telah mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan guna pengembangan kompetensi, antara lain:

- a. Pelaksanaan training, short course, seminar, dan/atau workshop dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan.
- b. Pelaksanaan virtual training kepada jajaran fungsi kepatuhan Regional Office.
- c. Pelaksanaan sharing session dengan regulator serta pelaksanaan sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

2. Infrastruktur Sistem Informasi

Pada tahun 2025, Compliance Group melakukan penyempurnaan sistem informasi dalam rangka pengelolaan manajemen risiko kepatuhan yang lebih baik. Penyempurnaan sistem tersebut antara lain meliputi pengembangan sistem pemantauan implementasi tata kelola yaitu GCG Online System 2.0, Sistem Otomasi Pengujian Kepatuhan, Sistem Compliance Reminder Laporan Regulator, serta pengembangan system Nexure Modul Governance (Gratification, Annual Disclosure, Pakta Integritas, Kode Etik, Sistem Manajemen Anti Penyusapan).

3. Proses Manajemen Risiko Kepatuhan yang Menyeluruh

Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan di BRI dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

- a. Melakukan identifikasi dan monitoring risiko kepatuhan akibat adanya pelanggaran atas kepatuhan pelaporan terhadap Regulator melalui laporan profil risiko kepatuhan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Group / Unit Kerja Penanggung Jawab terkait untuk rencana tindak lanjut atas sanksi yang telah dikenakan Regulator kepada BRI.
- c. Memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) di BRI.
- d. Melakukan uji kepatuhan terhadap seluruh Putusan dan kebijakan internal BRI yang ditetapkan oleh Direksi.
- e. Melaksanakan Resume dan Analisa dampak terhadap ketentuan eksternal terbaru dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Selain itu juga memberikan advice/tanggapan kepatuhan terhadap rencana kebijakan, Perjanjian Kerja Sama dan Perijinan.
- f. Senantiasa meningkatkan kualitas dalam melakukan verifikasi dokumen Produk Bank Baru (PBB) yang diterima dari Product Owner sebelum disampaikan kepada Regulator.
- g. Meningkatkan koordinasi dengan pihak regulator khususnya sebagai penghubung (liaison) antara Product Owner/Bussines Owner dengan Regulator dalam proses persetujuan PBB, sehingga proses pemenuhan persyaratan dokumen dan informasi dapat segera terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Compliance Group juga sebagai liaison officer untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan koordinasi dengan pihak regulator dalam hal pemenuhan permintaan data/informasi dari regulator maupun menjembatani internal BRI dalam hal permintaan audiensi dengan OJK.
- h. Profil Risiko Kepatuhan di Desember 2025 yaitu Low to Moderate, dan hasil self assessment atas pelaksanaan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) kepatuhan berada pada peringkat memadai (Satisfactory).

C. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan

Pelaksanaan evaluasi terhadap pengendalian dan pengelolaan manajemen risiko kepatuhan dilakukan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Evaluasi dari pihak internal dilakukan oleh Direksi melalui Risk Management Committee (RMC), kaji ulang independen oleh Satuan Kerja Audit Internal, serta melalui Laporan Penerapan Fungsi Kepatuhan.

Selain itu, Dewan Komisaris melalui komite di bawah Dewan Komisaris secara berkala melakukan pengawasan terhadap manajemen risiko kepatuhan sesuai prinsip pengawasan yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan bank disampaikan Compliance Group melalui Laporan Pelaksanaan

Fungsi Kepatuhan Bank secara triwulanan kepada kepada Direktur Utama dengan tindasan Dewan Komisaris. Selanjutnya, sebagai bentuk pengawasan, Dewan Komisaris akan menyampaikan hasil evaluasi atas laporan dimaksud. Compliance Group juga menyusun Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara semesteran yang ditindaskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SESUAI POJK 45/POJK.03/2015

PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN REMUNERASI (HCS)

Proses penyusunan kebijakan remunerasi meliputi:

1. Latar belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi
Dalam rangka menjaga dan mempertahankan Pekerja, maka perlu diatur kebijakan Remunerasi yang dapat memelihara dan meningkatkan motivasi Pekerja serta mendorong terciptanya iklim kerja kondusif. Perseroan menyusun kebijakan Remunerasi dengan tujuan untuk menarik calon Pekerja potensial, mempertahankan Pekerja kompeten dan memelihara motivasi Pekerja untuk berkinerja unggul.
2. Pelaksanaan kaji ulang/evaluasi atas kebijakan remunerasi tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. Perseroan menyusun kebijakan Remunerasi berdasarkan praktek di pasar tenaga kerja bidang perbankan serta selalu mengkaji dan memperbaharunya sesuai dengan perubahan dan perkembangan bisnis dengan tetap memperhatikan kemampuan Perseroan.

CAKUPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN IMPLEMENTASINYA PER UNIT BISNIS, PER WILAYAH DAN PADA PERUSAHAAN ANAK ATAU KANTOR CABANG YANG BERLOKASI DI LUAR NEGERI

Dalam rangka menyelaraskan perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah, Perseroan memberikan bantuan penyesuaian tingkat kemahalan berupa Tunjangan Premium. Perseroan mengadakan peninjauan terhadap Tunjangan Premium apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan tingkat kemahalan di setiap wilayah dan kemampuan Perseroan. Perusahaan Anak memiliki kebijakan remunerasi terpisah dan disusun sendiri oleh Perusahaan Anak. Setiap Perseroan Anak memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi masing-masing dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip remunerasi Perseroan yang diatur dalam Human Capital General Policy BRI Group.

REMUNERASI DIKAITKAN DENGAN RISIKO

Remunerasi dikaitkan dengan risiko dan disusun berdasarkan pertimbangan *Corporate Band* dan/ atau *Job Grade* Pekerja dalam suatu struktur upah yang menggambarkan Remunerasi Pekerja dari jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi. Pada setiap jabatan ditentukan suatu rentang upah tertentu yang menggambarkan upah minimum, upah *midpoint* (nilai tengah) sampai dengan upah maksimum. Besaran remunerasi yang diterima oleh Pekerja mempertimbangkan/setara dengan beban dan potensi risiko jabatan yang melekat pada jabatan tersebut. Semakin tinggi jabatan tersebut maka akan semakin tinggi tugas dan tanggung jawab Pekerja dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil/eksposur risiko Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menetapkan pihak-pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT), berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan potensi risiko yang timbul atas suatu jabatan yang dimiliki. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka Perseroan akan menanggihkan pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat variabel.

PENGUKURAN KINERJA DIKAITKAN DENGAN REMUNERASI

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi meliputi:

1. **Kebijakan remunerasi terhadap penilaian kinerja.**

Guna mendorong Pekerja untuk berkinerja unggul, Perseroan memiliki program kompensasi variabel yang diberikan kepada Pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Pekerja berkinerja tinggi akan memperoleh kompensasi variabel yang tinggi pula. Sebaliknya, Pekerja yang berkinerja rendah akan memperoleh kompensasi variabel yang rendah atau tidak mendapatkan kompensasi variabel sama sekali.

2. **Metode remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.**

Metode pemberian kompensasi variabel kepada Pekerja disusun dengan konsep yang mendorong penerapan nilai-nilai kolaborasi serta kesesuaian antara pencapaian individu dan kinerja unit kerja, sehubungan pola kerja yang diterapkan di Perseroan adalah individual dan tim. Besarnya nilai kompensasi yang diterima oleh Pekerja dipengaruhi oleh pencapaian kinerja Perseroan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu dengan masing-masing komponen kinerja tersebut memiliki indikator pencapaian target, bobot, dan faktor pengali yang berdiri sendiri.

3. **Metode penyesuaian remunerasi terhadap kinerja yang tidak tercapai.**

Pada awal tahun Perseroan telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pekerja untuk memperoleh kompensasi variabel, salah satunya adalah target kinerja yang harus dicapai. Bagi Pekerja yang tidak memenuhi target kinerja tersebut, maka Pekerja tidak diberikan kompensasi variabel.

PENYESUAIAN REMUNERASI DIKAITKAN DENGAN KINERJA DAN RISIKO

Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko yang meliputi:

1. Kebijakan remunerasi terhadap besaran dan kriteria yang bersifat variabel yang ditangguhkan Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 09-KOM/BRI/11/2017 dan S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka sebagian remunerasi yang bersifat variabelnya akan ditangguhkan.
 - b. Besarnya penangguhan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah setinggi-tingginya 20% dari tantiem.
2. Perseroan dapat menunda pembayaran (malus) terhadap Remunerasi yang bersifat variabel kepada MRT apabila terjadi kondisi berupa :
 - a. Terbukti secara hukum terdapat penyalahgunaan jabatan dan atau wewenang dan atau melakukan tindak pidana oleh MRT yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.
 - b. *Restatement* laporan keuangan Perseroan yang menjadi dasar penetapan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel.
 - c. Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan adalah 4 (*Moderate to High*) atau lebih buruk atau pengaturan lain yang diatur Kementerian BUMN.
 - d. RUPS Tahunan memutuskan menolak pertanggung jawaban Direksi dan atau Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan untuk Tahun buku yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.
 - e. Pertimbangan lain yang dipandang penting oleh RUPS.

NAMA KONSULTAN EKSTERNAL DAN TUGAS KONSULTAN TERKAIT KEBIJAKAN REMUNERASI

Salah satu prinsip remunerasi Perseroan adalah kompetitif secara eksternal, yaitu pemberian remunerasi pada tingkat yang kompetitif terhadap industri perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bekerja sama dengan konsultan eksternal Willis Towers Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/ atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan Perseroan mengenai kebijakan remunerasi di Perusahaan setara (*Peers*).

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL

1. Bentuk dan alasan pemilihan remunerasi yang bersifat variabel
Kompensasi kepada Pekerja diberikan dalam kerangka sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Perseroan. Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja, yaitu dalam bentuk bonus tahunan. Bonus merupakan kompensasi variabel yang tidak dijanjikan oleh Perseroan. Bonus diberikan kepada Pekerja dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Perseroan.
2. Alasan perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel (Pekerja)
 - a. Dalam pemberian bonus kepada Pekerja, Perseroan menerapkan konsep Kelompok Jabatan terdiri dari kelompok Pemasar, Atasan Langsung Pemasar, *Business Support*, dan *Support*. Perhitungan *budget* bonus dibedakan antar Kelompok Jabatan dengan penerapan konstanta pengali tertentu yang besarnya ditentukan berdasarkan peran/fungsi Jabatan dalam menghasilkan pendapatan dan laba Perseroan. Konstanta tertinggi diberikan bagi kelompok Pemasar, sedangkan konstanta terendah diberikan bagi kelompok *Support*.
 - b. Perseroan memberikan kompensasi variabel yang lebih besar kepada Tenaga Pemasar dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :
 - Pemasar adalah lini utama penggerak bisnis, pencetak pendapatan dan laba Perseroan.
 - Stimulus bagi Pemasar agar dapat meningkatkan produktivitas dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.
 - Sebagai bentuk apresiasi kepada Pemasar dan strategi mempertahankan *Talent*.

JABATAN DAN JUMLAH PIHAK YANG MENJADI MATERIAL RISK TAKERS

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) yang ditetapkan berdasarkan jumlah manajemen pada periode tahun laporan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris (6 orang)
2. Direksi (13 orang)
3. Senior Executive Vice President (SEVP) yang menjabat selama periode laporan sejumlah 7 orang, sebagai berikut :

No	Nama	Periode Jabatan	Keterangan
1	Muhammad Candra Utama	01/08/2023 s/d sekarang	-
2	Aestika Oryza Gunarto	01/08/2023 s/d sekarang	-
3	Yulianto Setiawan	01/12/2024 s/d sekarang	-
4	I Nyoman Sugiri Yasa	01/08/2023 s/d 25/07/2025	Penugasan ke BUMN lain sejak 25 Juli 2025.
5	Steven Augustino Yudiyantho	01/12/2023 s/d sekarang	-

No	Nama	Periode Jabatan	Keterangan
6	Babas Bastaman	01/07/2025 s/d sekarang	Pekerja berstatus Kontrak diberikan Variable Pay sesuai perjanjian di kontrak kerja.
7	Tri Laksito Singgih	08/09/2025 s/d sekarang	Pekerja berstatus Kontrak diberikan Variable Pay sesuai perjanjian di kontrak kerja.

SHARES OPTION YANG DIMILIKI PEJABAT EKSEKUTIF

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham dalam bentuk opsi pembelian saham bagi Pejabat Eksekutif pada tahun 2025.

JUMLAH PENERIMA DAN JUMLAH TOTAL REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL YANG DIJAMIN TANPA SYARAT

Perseroan memberikan seluruh remunerasi yang bersifat variabel berdasarkan pencapaian kinerja.

JUMLAH TOTAL REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL YANG DITANGGUHKAN

No	Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan (tahun buku 2025)	
		Tunai (Rp Gross)	Saham (lembar saham)
1	SEVP	16.663.321.250	Tidak terdapat pemberian remunerasi dalam bentuk saham di Tahun 2025
2	Dewan Komisaris	22.169.949.013	2.088.500 (20.885 lot)
3	Direksi	-	18.321.711 (183.217 lot)

JUMLAH TOTAL REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL YANG DITANGGUHKAN YANG DIBAYARKAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN

No	Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan (tahun 2025)	
		Tunai dalam Juta Rupiah (<i>Unlock</i>) 2025	Lembar Saham (<i>Unlock</i>) 2025
1	Dewan Komisaris	14,445,370,226	1.492.335 (14.923 lot)
2	Direksi	-	10.352.430 (103.524 lot)
3	SEVP	5.107.891.401	Tidak terdapat pemberian remunerasi dalam bentuk saham di Tahun 2025

LAPORAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT

(efektif % per tahun)

No	Komponen ¹⁾	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (<i>Prime Lending Rate</i>)						
		Berdasarkan Jenis Kredit						
		Kredit NonUMKM		Kredit UMKM			KPR/ KPA	Non KPR/ Non KPA
		Korporasi	Ritel	Menengah	Kecil	Mikro		
1	Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK)	3.41%	N/A	3.41%	3.41%	3.41%	3.41%	3.41%
	1.1. Biaya Dana	3.38%	N/A	3.38%	3.38%	3.38%	3.38%	3.38%
	1.1.1. Biaya Dana Pihak Ketiga	3.04%	N/A	3.04%	3.04%	3.04%	3.04%	3.04%
	1.1.1.1. Biaya Dana Pihak Ketiga selain Biaya Giro Wajib Minimum dan Premi Lembaga Penjamin Simpanan	2.67%	N/A	2.67%	2.67%	2.67%	2.67%	2.67%
	1.1.1.2. Biaya Giro Wajib Minimum	0.19%	N/A	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%
	1.1.1.3. Biaya Premi Lembaga Penjamin Simpanan	0.18%	N/A	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%
	1.1.2. Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga	0.34%	N/A	0.34%	0.34%	0.34%	0.34%	0.34%
	1.1.2.1. Biaya Dana Liabilitas kepada Bank Indonesia	0.00%	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	1.1.2.2. Biaya Dana Liabilitas kepada Bank Lain	0.00%	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	1.1.2.3. Biaya Dana Surat Berharga yang Diterbitkan	0.24%	N/A	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
	1.1.2.4. Biaya Dana Pinjaman yang Diterima	0.01%	N/A	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	1.1.2.5. Biaya Dana Liabilitas Lainnya	0.09%	N/A	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%
	1.99. HPDK Lainnya	0.03%	N/A	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
2	Biaya Overhead	1.33%	N/A	3.67%	3.38%	8.29%	3.84%	3.66%
	2.1. Peningkatan Nilai Wajar Liabilitas Keuangan	0.00%	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	2.2. Kerugian terkait Risiko Operasional	0.00%	N/A	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%
	2.3. Komisi/Provisi/Fee dan Administrasi	0.00%	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	2.4. Penyusutan/Amortisasi	0.08%	N/A	0.22%	0.20%	0.49%	0.23%	0.22%
	2.5. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya (Nonkeuangan)	0.00%	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	2.6. Beban Tenaga Kerja	0.50%	N/A	1.37%	1.27%	3.10%	1.44%	1.37%
	2.7. Beban Hadiah	0.04%	N/A	0.12%	0.11%	0.27%	0.13%	0.12%
	2.7.1. Beban Promosi selain Hadiah dan Iklan dan Promosi	0.04%	N/A	0.12%	0.11%	0.27%	0.13%	0.12%
	2.7.2. Hadiah	0.00%	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	2.7.3. Iklan dan Promosi	0.00%	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	2.8. Kerugian Penjabaran Transaksi Valuta Asing	0.00%	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	2.9. Beban Lainnya	0.63%	N/A	1.75%	1.61%	3.95%	1.83%	1.74%
	2.99. Biaya Overhead Lainnya	0.07%	N/A	0.20%	0.18%	0.45%	0.21%	0.20%
3	Marjin Keuntungan (<i>Profit Margin</i>)	3.46%	N/A	3.17%	3.41%	2.11%	2.65%	2.03%
4	Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (1+2+3)	8.20%	N/A	10.25%	10.20%	13.80%	9.90%	9.10%
5	Estimasi Premi Risiko	0.39%	N/A	4.84%	5.18%	5.24%	3.29%	2.16%
	5.1. Estimasi Premi Risiko Kredit	0.39%	N/A	4.84%	5.18%	5.24%	2.59%	1.48%
	5.99. Estimasi Premi Risiko Tidak Terkait Risiko Kredit	0.00%	N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.67%
	Suku Bunga Kredit (SBDK + Estimasi Premi Risiko)	8.59%	N/A	15.09%	15.38%	19.04%	13.19%	11.26%
	Rata-Rata Suku Bunga Kredit Realisasi	6.11%	N/A	8.16%	11.20%	16.22%	7.13%	9.40%